

ANALISA

1979 — 6

PERJUANGAN DUNIA BARU



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab : Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi : Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR,
J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, M. Hadi SOESASTRO, B. SUNARIO, Harry TJAN SILALAH dan Jusuf WANANDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, B. SUNARIO

STT : S.K. Menpen R.I. No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tgl. 28—8—1978
ISSN 0126 — 222X

Harga per.eks : Rp. 500,—

Harga langganan 1 tahun (12 nomor) : Rp. 6.000,— (bayar di muka), untuk Mahasiswa Rp. 4.800,— sudah termasuk ongkos kirim.

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telepon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR REDAKSI 452

DARI KEKACAUAN DUNIA MENUJU TATA INTER-
NASIONAL 455

DIALOG UTARA — SELATAN: SEGI POLITIK DAN
EKONOMI TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU
CSIS 471

TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU: SUATU
KONFRONTASI YANG BERKEPANJANGAN 485

NEOKOLONIALISME LAWAN TATA EKONOMI
DUNIA BARU
Kirdi DIPOYUDO 509

AKSES KE PASAR JEPANG: SUATU "MISSION
IMPOSSIBLE"?
J. PANGLAYKIM 537

PENGANTAR REDAKSI

Konperensi Perdagangan dan Pembangunan PBB atau UNCTAD V yang berlangsung di Manila pada 7 Mei — 3 Juni 1979 ini, biarpun hasilnya mengecewakan Dunia Ketiga, adalah suatu kejadian penting. Dalam forum ini negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok 77 mendapat suatu kesempatan untuk meningkatkan perjuangan mereka bagi terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru sebagai ganti sistem ekonomi internasional yang berlaku selama ini. Pada hakikatnya perjuangan ini adalah tahap kedua proses dekolonisasi dan melibatkan tiga perempat umat manusia. Dia berakar pada kesadaran bahwa sistem ekonomi internasional sekarang ini sangat tidak adil dan oleh sebab itu perlu dirombak.

Sistem ini adalah warisan jaman kolonial dan disusun ketika negara-negara imperialis Barat menjajah negara-negara Asia dan Afrika. Dalam sistem ini negara-negara itu menguasai perekonomian dunia karena bukan saja memiliki kekuasaan politik atas negara-negara jajahan mereka tetapi juga kekuasaan ekonomi berupa modal, teknologi dan alat-alat pengangkutan. Secara demikian mereka dapat menyusun suatu sistem pembagian kerja internasional yang menempatkan negara-negara berkembang sebagai penghasil dan pengeksport bahan-bahan mentah serta komoditi primer lain dan negara-negara maju sebagai penghasil

dan pengekspor barang-barang jadi, lagi pula menentukan terms of trade dan tarif pengangkutan yang sangat menguntungkan mereka. Sebagai akibatnya mereka menjadi semakin makmur, sedangkan negara-negara jajahan tetap miskin dan bahkan semakin menurun daya beli mereka karena harga komoditi ekspor mereka tetap, kalau tidak menurun, sedangkan harga barang-barang jadi impor mereka terus meningkat sejalan dengan meningkatnya upah-upah dan kesejahteraan sosial di negara-negara industri.

Sesudah Perang Dunia II negara-negara penjajah memberikan kemerdekaan politik kepada negara-negara jajahan mereka, tetapi tetap menguasai perekonomian mereka dengan mempertahankan sistem ekonomi internasional tersebut. Negara-negara berkembang yang baru merdeka ini menyadari kepincangan-kepincangan itu dan menuntut agar sistem ekonomi dunia tersebut dirombak secara mendalam. Berkat perjuangan mereka, Majelis Umum PBB pada tahun 1974 mengadakan suatu sidang khusus dan mengeluarkan Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Aksi. Deklarasi ini memuat 20 asas bagi penyusunan Tata Ekonomi Dunia Baru, antara lain kedaulatan dan penguasaan penuh masing-masing negara atas sumber-sumber daya dan eksploitasinya, kompensasi bagi pemerasan di masa lampau, keseimbangan antara harga barang-barang ekspor dan harga barang-barang impor negara-negara berkembang, syarat-syarat yang lebih baik bagi transfer teknologi dan lain sebagainya. Bagaimana asas-asas itu harus diterapkan dijelaskan dalam Program Aksi. Dengan demikian Tata Ekonomi Dunia Baru bukanlah soal belas kasihan atau kemurahan hati negara-negara industri yang kaya, tetapi soal keadilan baik keadilan tukar menukar (komutatif) maupun keadilan sosial. Asas pokok yang mendasarinya ialah bahwa kekayaan dunia adalah untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk negara-negara yang kuat kedudukannya, dan oleh sebab itu harus dikembangkan dan dibagi demikian rupa, sehingga setiap bangsa mendapatkan bagian yang wajar. Bahwa keadilan sosial itu juga berlaku bagi masyarakat dunia, telah disadari sepenuhnya oleh para pendiri Negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 mereka menetapkan bahwa Pemerintah Indonesia selain mengemban tugas-

tugas dalam negeri juga wajib "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Akan tetapi negara-negara maju sejauh ini menolak tuntutan akan Tata Ekonomi Dunia Baru itu seperti terlihat dalam perdebatan-perdebatan pada UNCTAD IV di Nairobi tahun 1976, Konperensi Kerjasama Ekonomi Internasional [CIEC] di Paris tahun 1975-1977 dan UNCTAD V di Manila. Hal itu dapat dimengerti karena Tata Ekonomi Dunia Baru berarti bahwa negara-negara maju itu akan kehilangan kedudukan dominan dalam perekonomian dunia yang sangat menguntungkan mereka. Seperti ditegaskan oleh Gunnar Myrdal, Tata Ekonomi Dunia Baru hanya dapat diwujudkan kalau negara-negara maju bersedia mengurangi konsumsi mereka. Oleh sebab itu perjuangan Tata Ekonomi Dunia Baru itu akan lama dan berat, akan tetapi akhirnya akan berhasil juga karena seperti dekolonisasi politik dekolonisasi ekonomi pun adalah suatu proses sejarah yang bisa dihambat tetapi tidak bisa dibendung.

Perjuangan tata dunia baru itulah tema pembahasan kita kali ini. Sehubungan dengan itu ANALISA menurunkan beberapa karangan yang membahasnya dari berbagai segi. Yang pertama mengulas perlunya Tata Ekonomi Dunia Baru. Yang kedua mengemukakan pandangan Selatan atau Dunia Ketiga, sedangkan yang ketiga membahas segi pandangan Utara. Dalam karangan yang keempat disoroti neo-kolonialisme sebagai lawan utama perjuangan tata dunia baru itu dan sikap serta peranan Indonesia. Karangan yang kelima dan terakhir membahas hambatan-hambatan di Jepang terhadap masuknya barang-barang jadi negara-negara lain. Politik impor Jepang ini berlaku secara umum, tetapi khususnya merupakan suatu pukulan berat bagi negara-negara berkembang yang ingin mengekspor barang-barang jadi mereka ke negara itu. Sikap yang sama diambil oleh banyak negara industri lain. Sikap semacam ini jelas ikut menghambat usaha industrialisasi negara-negara berkembang.

Juni 1979

REDAKSI

DARI KEKACAUAN DUNIA MENUJU TATA INTERNASIONAL*

"..... sistem ekonomi internasional tidaklah sebebas seperti sering dikatakan dan pilihan kita bukanlah antara suatu sistem bebas yang didasarkan atas usaha bebas dan suatu perekonomian yang sepenuhnya direncanakan di pusat. Pilihan sebenarnya yang harus kita lakukan adalah antara mempertahankan sistem kita sekarang ini, yang secara luas dibimbing dan dimanipulasi demi keuntungan negara-negara kaya, dan memilih suatu sistem yang diarahkan untuk menemukan penyelesaian masalah-masalah pembagian wajar pendapatan dan milik, kelangkaan sumber-sumber daya alam dan penggundulan lingkungan."

PM Belanda, Joop den Uyl, 1975

DUNIA INDUSTRI: DARI CORNUCOPIA KE KOTAK PANDORA

Seruan untuk membentuk suatu Tata Ekonomi Internasional Baru diajukan dalam suatu periode pergolakan ekonomi tanpa preseden di dunia menyusul perang. Negara-negara industri mengalami kekacauan ekonomi yang tidak dikenal sejak penderitaan Depresi Besar tahun 1930-an. Sistem internasional, yang sebagian besar mereka ciptakan dan nampak melayani mereka dengan baik, berada dalam ketidakseimbangan yang serius.

Di belakang mereka adalah suatu periode pertumbuhan ekonomi yang tiada taranya. Produksi dunia, yang untuk sebagian terbesar adalah tanggung jawab mereka, menjadi tiga kali lipat selama 20 tahun antara 1950 dan 1970, suatu periode di mana sebagian besar kapasitas industri dunia diciptakan. Pertumbuhan ini mendatangkan kemakmuran material bagi kebanyakan warganegara mereka, suatu pembagian pendapatan yang lebih wajar dalam masyarakat-masyarakat mereka, dan prestasi-prestasi dalam banyak bidang ilmu pengetahuan (lihat Tabel 1).

* Diambil dari laporan untuk Club of Rome *Reshaping the International Order* yang diterbitkan di New York tahun 1976 dengan Jan Tinbergen sebagai koordinator dan Anthony J. Dolman sebagai editor

Negara-negara industri telah menciptakan suatu mesin industri yang sangat kuat. Diumpun dengan permintaan yang digalakkan, di dunia Barat mesin itu digerakkan dengan suplai minyak yang melimpah dan murah. Dengan harga 1 dollar sebarrel lebih sedikit, suplai minyak menggalakkan pertumbuhan konsumsi energi antara 6 dan 11 prosen setahun. Murahanya suplai itu menjamin pertumbuhan yang cepat. Dia juga mendorong penghamburan dan pemborosan.

Tabel 1

GNP DAN PENDUDUK 1973 (prosentase)

Kawasan/Negeri	GNP	Penduduk
Amerika Utara	30,0	6,1
Eropa (tidak termasuk Uni Soviet)	31,8	13,2
Uni Soviet	10,7	6,5
Asia (tidak termasuk Jepang)	10,2	52,7
Jepang	8,3	2,8
Amerika Tengah dan Selatan a	5,2	7,9
Afrika	2,4	10,2
Oseania	1,5	0,6
Jumlah	100,0	100,0
Negara-negara ekonomi pasar maju b	65,7	17,9
Negara-negara perencanaan pusat c	20,2	32,0
Negara-negara berkembang	14,2	50,1
Jumlah	100,0	100,0

a termasuk Meksiko

b Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, Perancis, Jerman Barat, Inggeris, Islandia, Irlandia, Itali, Jepang, Luksemburg, Nederland, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Porto Rico, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Amerika Serikat, Kanada

c Albania, Bulgaria, RRC, Kuba, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hungaria, Korea Utara, Polandia, Rumania, Uni Soviet, Vietnam

Catatan: Tahun 1973 GNP dunia adalah US\$ 4.800 milyar, penduduk 3,8 milyar

Sumber: didasarkan atas *World Bank Atlas, 1975: Population, per Capita Product, and Growth Rates* (Washington, D.C., 1975)

Suatu sejarah kolonial juga membuka jalan bagi banyak negara di dunia Barat ke suplai-suplai murah bahan-bahan mentah Dunia Ketiga. Dari sembilan mineral penting (tidak terma-

suk minyak) yang dibutuhkan untuk memelihara suatu perekonomian industri, negara-negara ekonomi pasar industri menghabiskan sekitar 70% produksi dunia. Dunia Ketiga, yang secara ekonomis terikat dengan mesin industri itu, terpaksa menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mekanisme-mekanisme pasar internasional yang beroperasi demi keuntungan negara-negara industri pengimpor.

Kedua negara yang paling kuat mampu membangun suatu kemampuan militer yang sangat besar dan membuat senjata-senjata dengan daya menghancurkan yang luar biasa dengan maksud untuk melindungi sistem-sistem sosial mereka yang bersaing satu sama lain. Kemampuan militer ini bukan saja membutuhkan mesin industri untuk mempertahankannya, tetapi juga memungkinkan mesin itu berkembang lebih lanjut. Lagi pula kemampuan itu mengancam hidup setiap pria, wanita dan anak.

Pada awal 1970-an menjadi jelas bahwa kemakmuran berlimpah (*cornucopia*) pertumbuhan ekonomi berubah menjadi Kotak Pandora atau sumber bencana. Sokoguru-sokoguru tempat sistem ekonomi bersandar mulai runtuh dengan cepatnya, terlalu cepat untuk negara-negara industri. Sistem moneter dunia, yang disepakati oleh negara-negara Barat di Bretton Woods menjelang akhir Perang Dunia II, telah roboh pada tahun 1971. Walaupun hal ini menjadi dasar bagi kekacauan-kekacauan keuangan raksasa, inflasi di seluruh dunia, kekacauan perdagangan dan, untuk sementara negara, kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang luar biasa, negara-negara Barat merasa sulit bekerjasama untuk pembaruan-pembaruan moneter internasional.

Gangguan-gangguan itu ikut mengakibatkan perubahan-perubahan liar dalam harga kebanyakan komoditi primer, yang akibat pasar-pasar mereka yang tidak mantap telah cenderung untuk fluktuasi-fluktuasi serius. Harga barang-barang industri semakin meningkat, sebagian akibat meningkatnya permintaan dan sebagian akibat tuntutan-tuntutan kenaikan upah yang jauh melebihi kenaikan produktivitas tenaga kerja. Perkembangan-perkembangan ini bukan saja membahayakan prospek pertum-

buhan negara-negara industri tetapi juga mengakibatkan terus meningkatnya biaya impor kebanyakan negara Dunia Ketiga.

Strategi Pembangunan untuk Dasawarsa Pembangunan Kedua PBB, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1971, dan ditinjau kembali pada tahun 1973, tidak dianggap serius oleh negara-negara industri yang penting dan di antara negara-negara Dunia Ketiga terdapat suatu perasaan frustrasi yang umum. Akan tetapi terjadi suatu perubahan yang mendasak dan mempunyai arti sejarah yang penting ketika pada tahun 1973 Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengambil prakarsa untuk menggunakan kekuasaannya dan meningkatkan harga minyak mentah — yang secara nyata menurun antara 1950 dan 1970 — sekitar empat kali lipat dari pada sebelumnya. Perkembangan ini, yang dipermudah oleh suatu koincidensi kepentingan yang bersifat sementara dan mungkin tidak diperkirakan antara perusahaan-perusahaan minyak Barat dan negara-negara OPEC, mendatangkan kesulitan besar bagi negara-negara industri dan memancing ancaman-ancaman pembalasan militer yang terselubung. Akan tetapi sebagai akibatnya terjadi suatu pengalihan dua prosen GNP dari negara-negara industri ke negara-negara OPEC untuk sementara waktu; hal itu juga ikut mempercepat resesi dalam kegiatan ekonomi yang mulai pada tahun 1972.

Situasi dunia menjadi lebih parah akibat keadaan cuaca yang buruk yang mendatangkan bencana kegagalan panen di banyak bagian dunia, dan akibat aksi bersama penghasil-penghasil utama pangan baku yang memungkinkan mereka meningkatkan harganya pada tahun 1974 ke suatu tingkat yang tiga empat kali lebih tinggi daripada tahun 1970. Hal ini merupakan suatu tekanan hebat atas cadangan pangan dunia - yang hampir habis pada tahun 1972 maupun 1975 — dan atas para pengimpor pangan baku, khususnya negara-negara yang paling miskin.

Impak penuh semua perkembangan ini dirasakan di dunia industri pada tahun 1974 dan 1975 ketika resesi mengambil proporsi-proporsi yang lebih besar daripada yang dialami sejak Perang Dunia II. Para ahli ekonomi berusaha untuk menerang-

kan 'stagflasi', kombinasi unik inflasi tinggi dan resesi industri; teori ekonomi Keynesian, yang menolong menghindari krisis-krisis di masa lampau, kali ini ternyata tidak memadai. Produksi industri di banyak negara industri menurun pada tahun 1975 untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II. Bulan September tahun itu tujuh belas juta orang membanjiri kantor-kantor penempatan tenaga kerja di negara-negara yang paling kaya. Mesin industri juga bukanlah satu-satunya yang seret; sementara sektor pertanian Barat, yang hanya beberapa tahun sebelumnya nampak kuat juga mengalami kesulitan-kesulitan.

Untuk banyak orang menjadi semakin jelas, bahwa krisis ekonomi yang menimpa Dunia Barat lebih daripada suatu gejala sementara, suatu kantong pergolakan ekonomi sepanjang jalan menuju kekayaan yang semakin besar. Mereka menilainya sebagai suatu krisis dalam struktur-struktur dan mekanisme-mekanisme internasional itu sendiri, yang untuk sebagian besar diciptakan oleh Dunia Barat. Kalau aksi kekuatan-kekuatan pasar yang keras ikut menciptakan masalah-masalah itu, adalah jelas bahwa kekuatan-kekuatan pasar itu, kalau dibiarkan sendirian, tidak akan mampu mengatasinya. Sementara ahli ekonomi bahkan memperingatkan kita bahwa 'recovery' yang banyak didengung-dengungkan itu boleh jadi tidak melebihi suatu pernafasan singkat, suatu saat tenang sebelum suatu taufan ekonomi yang bahkan lebih besar, yang di ambang pintu dan akan lebih merugikan daripada yang terakhir.

Kemakmuran telah mendatangkan kecemasan di Dunia Barat, suatu ketakutan yang mencekam bahwa waktu-waktu baik boleh jadi telah berakhir, biarpun aspirasi akan keuntungan-keuntungan material yang lebih besar lagi tetap. Kalau bermaksud untuk menghadapinya, dengan memanjangnya daftar masalah — sosial maupun ekonomi — demi kepentingan-kepentingan jangka panjangnya, Dunia Barat harus berusaha menciptakan struktur-struktur internasional baru berdasarkan kerjasama global.

DUNIA KETIGA: DARI HORMAT KE SIKAP MENANTANG

Kalau periode sesudah Perang Dunia II merupakan suatu era pertumbuhan di dunia industri, dia adalah jaman pembebasan politik di Dunia Ketiga. Dalam satu dasawarsa lebih sedikit sekitar sepertiga penduduk dunia dibebaskan dari kekuasaan asing. Akan tetapi negara-negara miskin merasa bahwa dengan lebih sedikit sumber-sumber daya, know-how dan kesempatan untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki, dalam kenyataan mereka kurang bebas daripada negara-negara kaya. Mereka menemukan bahwa pembebasan politik tidak mesti mendatangkan pembebasan ekonomi dan bahwa keduanya tak terpisahkan: bahwa tanpa kemerdekaan politik adalah tidak mungkin untuk mencapai kemerdekaan ekonomi, dan tanpa kekuatan ekonomi kemerdekaan politik suatu bangsa tidaklah lengkap atau aman.

Ketergantungan ekonomi berakar pada lembaga-lembaga pokok sistem internasional yang sebagian besar diciptakan oleh negara-negara industri untuk pertama-tama menangani masalah-masalah mereka sendiri pada waktu suara-suara bangsa-bangsa miskin di dunia tidak didengar di forum-forum internasional. Bangsa-bangsa yang miskin terpaksa mempersoalkan premis-premis dasar suatu sistem internasional yang mengakibatkan semakin lebarnya perbedaan-perbedaan antara negara-negara yang paling kaya dan paling miskin dan ditolaknya persamaan kesempatan secara persisten. Mereka mengemukakan bahwa pasar "bebas" dalam kenyataan tidaklah "bebas", tetapi beroperasi demi keuntungan negara-negara industri, yang menggunakannya untuk membangun suatu tembok perlindungan sekitar kemakmuran dan gaya-gaya hidup mereka. Dan bahkan seandainya "bebas", pasar itu masih akan beroperasi secara yang menguntungkan negara-negara industri berkat kekuatan politik dan ekonomi mereka yang luar biasa. Seperti di tingkat nasional, mekanisme pasar itu cenderung untuk mengejek kemiskinan, atau menganggapnya sepi begitu saja, karena kaum miskin tidak mempunyai daya beli untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pasar. Hal ini lebih berlaku di tingkat internasional karena

tiada pemerintah dunia dan tiada mekanisme yang terdapat dalam negara-negara yang menciptakan tekanan-tekanan untuk pembagian kembali pendapatan dan kesempatan.

Secara tak terhindarkan dan tepat Dunia Ketiga menuntut perubahan dalam sistem internasional, yang menurut pendapatnya secara sistematis melakukan diskriminasi terhadap kepentingan-kepentingannya dan yang bercirikan distorsi-distorsi institusional, yang menurut sementara perkiraan mendatangkan kerugian sekitar US\$ 50 — US\$ 100 milyar setahun bagi negara-negara miskin. Dia menuntut agar diadakan perubahan mendasar; bukan perbaikan lembaga-lembaga internasional tetapi suatu tata dunia baru yang akan memperbaiki pola-pola lama ketergantungan tanpa harapan dan memberikan kesempatan-kesempatan nyata untuk mendapatkan bagian yang lebih wajar dari pertumbuhan dunia.

Dalam pertemuan di Dakar tahun 1975 bangsa-bangsa miskin menyatakan bahwa untuk mencapai "kemerdekaan ekonomi mereka yang penuh dan lengkap" mereka harus "mendapatkan kembali dan menguasai sumber-sumber daya alam dan kekayaan mereka, dan sarana-sarana untuk perkembangan ekonomi." Mereka sepakat bahwa "secara mendesak negara-negara berkembang harus mengubah pendekatan tradisional mereka dalam perundingan-perundingan dengan negara-negara maju, yang sejauh ini hanya berupa penyampaian suatu daftar permintaan kepada negara-negara maju dan suatu himbauan kepada kemauan baik politik mereka yang dalam kenyataan jarang ditunjukkan."

Harus dijelaskan bahwa Dunia Ketiga tidak menuntut suatu pembagian kembali secara besar-besaran dari pendapatan dan kekayaan bangsa-bangsa kaya di masa lampau. Dia tidak minta belas kasihan dari yang makmur atau pun persamaan pendapatan. Dia minta persamaan kesempatan dan menuntut hak atas bagian dalam pertumbuhan mendatang. Sasaran dasar munculnya 'serikat buruh' bangsa-bangsa miskin ialah merundingkan suatu 'persetujuan baru' dengan bangsa-bangsa kaya atas dasar tuntutan-tuntutan yang masuk akal lewat mekanisme tawar

menawar dan partisipasi kolektif. Dalam usaha mereka untuk mendapatkan persamaan yang lebih besar, mereka hanya menuntut hak untuk duduk sebagai pihak-pihak yang sama di meja perundingan dunia.

BANGSA-BANGSA DENGAN PERENCANAAN PUSAT: KITA TIDAK HIDUP DALAM RUMAH-RUMAHAN KACA

Krisis-krisis ekonomi dan keuangan yang menimpa dunia industri terasa pula di Eropa Timur. Akibat meningkatnya harga minyak OPEC misalnya dirasakan oleh semua negara pengimpor minyak dari CMEA, khususnya Hungaria, Cekoslowakia, Republik Demokrasi Jerman dan Bulgaria. Karena kebanyakan mendapatkan minyak mereka dari Uni Soviet, kejutannya sedikit tertunda; baru tahun 1973 CMEA meningkatkan harga minyak secara berarti sesuai dengan pasar dunia. Polandia dan Rumania paling sedikit menderita: Polandia mendapatkan lebih dari 80% energinya dari sumber-sumber batubaranya sedangkan Rumania menghasilkan minyak mentah. Akan tetapi bahkan Rumania tidak lolos dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Kemampuan kilangnya adalah lebih besar daripada produksinya dan selisihnya harus ditutup dengan impor dari Timur Tengah.¹

Kebanyakan negara Eropa Timur mengalami defisit neraca pembayaran terhadap Barat pada tahun 1974 dan 1975 dan sangat terpuak oleh inflasi dunia. Suatu editorial yang tidak biasa dalam suatu harian Hungaria di bawah judul "Kita tidak hidup dalam rumah-rumahan kaca" mencatat: "Beberapa waktu yang lalu kita mengira bahwa kita tidak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di pasar kapitalis dunia. Inflasi dapat dihentikan, sebagai seorang tamu yang tidak disenangi, di perbatasan dan di negeri kita ini kita dapat hidup dan bekerja dalam

¹ Sedangkan di masa lampau Rumania membayar US\$ 21 per ton untuk impor serupa itu, pada tahun 1974 harganya meningkat menjadi US\$ 126, suatu kerugian yang harus ditutup dengan ekspor hasil-hasil minyak. Bersama-sama dengan meningkatnya harga impor bahan-bahan mentah lain, itu pada tahun 1974 membiarkan Rumania dengan suatu defisit neraca pembayaran dengan negara-negara dengan perencanaan pusat yang melebihi US\$ 200 juta

keadaan yang sama seperti sebelumnya. Suasana 'rumah-rumahan kaca' itu harus kita bayar dengan 20 milyar forin."¹

Situasinya sedikit berbeda dengan Uni Soviet, suatu kekuatan ekonomi global. Orang-orang Soviet setiap hari menghasilkan sekitar 8 juta barrel (hampir sama seperti Arab Saudi), tetapi hanya mengekspor seperlimanya. Meningkatnya harga emas juga menguntungkan Uni Soviet seperti naiknya harga bahan-bahan mentah pada umumnya. Ekspor Soviet ke Barat mencapai US\$ 3 milyar tahun 1974 untuk minyak saja dan diperkirakan akan meningkat menjadi US\$ 3,5 milyar tahun 1975.²

Kendati semuanya itu, bangsa-bangsa Eropa Barat mengalami US\$ 1,6 milyar surplus perdagangan dengan Eropa Timur pada tahun 1973.³ Perdagangan Amerika-Soviet tahun 1975 menghasilkan US\$ 1,5 milyar surplus untuk Amerika Serikat, terutama akibat impor gandum Soviet yang besar. Persetujuan gandum Amerika-Soviet menunjukkan terus berlangsungnya surplus perdagangan Amerika Serikat.

Sebab pokok defisit perdagangan Eropa Timur terletak dalam struktur asimetris perdagangan Timur-Barat. Bagian barang-barang jadi dalam ekspor Eropa Timur relatif kecil (kurang dari 20% pada akhir 1960-an dan awal 1970-an), sedangkan mesin-mesin yang diimpor dari Barat merupakan lebih dari 40% seluruh perdagangan Timur-Barat. Struktur perdagangan yang sangat tidak menguntungkan itu menjadi lebih parah akibat kedudukan istimewa matauang-matauang Barat dalam transaksi-transaksi keuangan. Seperti ahli ekonomi Soviet Pichugin mengatakan: "..... situasi serupa itu bisa menjadi suatu rem bagi perluasan ekspor dari negara-negara industri kapitalis ke negara-negara sosialis sejauh daya beli negara-negara terakhir ini terhadap negara-negara kapitalis pada analisa terakhir ditentukan oleh besarnya pendapatan ekspor mereka dari negara-negara itu."⁴

1 *Magyar Nemzet*, Budapest, 1974

2 "Oil and Gold-Price Increases Russians Windfall Profits," *The New York Times*, 11 Januari 1975

3 *Economic Bulletin for Europe*, no. 1, vol. 26 (1974)

4 B. Pichugin, "East West Economic Cooperation," *International Affairs* (Moskwa), no. 8, 1975

Bangsa-bangsa dengan perencanaan pusat kurang beruntung dalam pasar internasional dengan barang-barang jadi industri awal mereka, yang tidak dapat bersaing baik dalam harga maupun mutu teknologi dengan hasil-hasil bangsa-bangsa industri yang telah maju. Selain itu, hutang-hutang negara-negara Eropa Timur pada bank-bank Barat telah mencapai tingkat yang tinggi dan meliputi bermilyar-milyar dollar. Mau tak mau catatan-catatan itu membawa kita pada kesimpulan bahwa di sini kita menghadapi suatu *pola khusus hasil perbedaan perkembangan* dan bahwa kesulitan-kesulitan dalam hubungan-hubungan ekonomi Timur-Barat dalam sementara kasus adalah lebih akibat tingkat-tingkat perkembangan yang berbeda daripada akibat perbedaan-perbedaan dalam sistem sosial dan ekonomi.¹ Sungguh-sungguh, perkembangan bukanlah semata-mata masalah Utara-Selatan atau Barat-Selatan yang hanya mempengaruhi benua-benua berkembang. Eropa mempunyai '*jurang perkembangannya*' sendiri, memang dalam versi yang lebih lunak, namun merupakan suatu faktor penting untuk memahami dengan tepat taruhan vital Eropa Timur dalam penyusunan kembali hubungan-hubungan ekonomi internasional.

Dalam keadaan sekarang ini, biarpun bangsa-bangsa Eropa Timur melakukan usaha-usaha luar biasa untuk mengadakan industrialisasi dan mengembangkan suatu perekonomian modern, indikator-indikator ekonomi utama mereka masih ketinggalan dibandingkan dengan lawan-lawan Barat mereka. Sedangkan GNP per jiwa di Eropa Timur adalah antara US\$ 1.000 dan US\$ 3.000 setahun, indikator yang sama di Eropa Barat adalah setinggi US\$ 2.500 sampai US\$ 6.000.² Hal itu adalah suatu ketimpangan dengan akibat-akibat ekonomi, sosial dan ideologi yang serius.

Untuk mengerti sungguh-sungguh kekhususan gejala itu, perlu disadari bahwa silsilahnya adalah lebih panjang daripada

1 Lihat Gunnar Adler-Karlsson, *Economic and Trade Policies*, International Institute for Peace (Vienna), September 1972, hal. 36-37

2 Angka-angka ini didasarkan atas nilai tukar resmi dan tidak mencerminkan perbedaan-perbedaan daya beli

perkiraan para penulis yang memandang konflik Timur-Barat seolah-olah konflik ini adalah antagonisme ideologi yang murni dan semata-mata, yang mulai dengan revolusi Rusia dan mengambil bentuk menyusul Perang Dunia II dengan perluasan revolusi itu ke Eropa Timur. Pendekatan serupa itu paling banter menolong menerangkan asal mula Perang Dingin, tetapi bukan latar belakang ekonomi yang menjadi dasarnya. Ini berasal dari awal sistem negara internasional yang modern, ketika kedua proses konvergen yang penting, yaitu ekspansi luar biasa kapitalisme dan pembentukan negara-negara bangsa di Eropa, memberikan kepada bagian barat benua suatu keunggulan atas bagian timurnya.

Adalah Renaissance dengan ramuan watak kuno dan feodalisme yang sekaligus menghasilkan banyak pendobrakan (breakthrough) dalam ilmu pengetahuan dan titik balik sejarah dari mana Eropa meninggalkan benua-benua lain. Dan oleh sebab Renaissance adalah suatu gejala Eropa Barat, baik awal negara absolutis sebagai pembuat bangsa-bangsa modern maupun gerak ekspansionis kapitalis mendirikan di situ pusat sistem internasional yang baru.

Itulah kondisi sejarah yang memungkinkan bangsa-bangsa Barat menarik keuntungan penuh dari revolusi industri. Bangsa-bangsa Eropa Timur (kebanyakan masih berjuang untuk menjadi bangsa) tinggal dalam perekonomian yang terutama bersifat agraris dengan struktur-struktur feodal yang kuat yang bertahan sampai abad kedua puluh. Dan oleh sebab revolusi sosialis mulai di Rusia yang terbelakang dan kemudian meluas ke negara-negara yang belum atau kurang berkembang, semua bangsa itu menghadapi tugas industrialisasi yang luar biasa dengan kecepatan setinggi mungkin, suatu tugas yang begitu dominan sehingga seluruh bangunan ekonomi dan politik masyarakat-masyarakat baru itu ditandainya.

Adalah logis bahwa Eropa Timur mempunyai kepentingan vital dengan dibentuknya Tata Ekonomi Internasional Baru yang akan menghapus ketimpangan-ketimpangan antara bangsa-bangsa sekarang ini. Memang, semua bangsa dengan perencanaan-

an pusat mendukung perjuangan yang dimulai oleh Kelompok 77; baru-baru ini Rumania bahkan bergabung dengan kelompok ini.

TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU SUATU KEHARUSAN

Ketidakadilan-ketidakadilan dalam sistem internasional mempunyai arti yang besar sekali. Sebagai akibatnya telah muncul dua dunia dan perbedaan-perbedaan di antara mereka terus meningkat. Yang satu adalah dunia kaum kaya, yang lain dunia kaum miskin, yang bersatu akibat warisan penderitaan bersama. Suatu tirai kemiskinan membagi dunia secara material maupun filosofis. Dunia yang satu melek huruf, yang lain sebagian besar buta huruf; yang satu industrial dan urban, yang lain terutama agraris dan rural; yang satu berorientasi pada konsumsi, yang lain berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Di dunia kaya orang memikirkan mutu hidup, di dunia miskin hidup itu sendiri yang diancam oleh penyakit, kelaparan dan kekurangan pangan. Di dunia kaya orang memikirkan konservasi sumber-sumber daya yang tidak dapat dibaharui dan buku-buku terpelajar yang ditulis tentang bagaimana mempertahankan dunia dalam keadaan stasioner. Di dunia miskin terdapat kecemasan, tidak tentang habisnya sumber-sumber daya, tetapi tentang eksploitasi dan distribusinya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan bukan untuk sedikit bangsa yang diistimewakan. Sedangkan dunia kaya memikirkan dampak kegiatan-kegiatan yang mengotori sistem-sistem penunjang hidup, dunia miskin memikirkan pengotoran kemiskinan, karena masalah-masalahnya tidak timbul dari kelebihan perkembangan dan teknologi tetapi dari kurangnya perkembangan dan teknologi dan penguasaan yang tidak memadai atas gejala-gejala alam (lihat Tabel 2).

Dewasa ini sekitar dua pertiga dari umat manusia hidup — kalau hal itu dapat disebut hidup — dari kurang dari 30 sen (dollar Amerika) sehari. Kini kita menghadapi suatu situasi di mana terdapat sekitar satu milyar orang buta huruf di dunia,

biarpun dunia mempunyai sarana-sarana maupun teknologi untuk menyebarkan pendidikan. Hampir 70% dari anak-anak di

Tabel 2

MENINGKATNYA PERBEDAAN PENDAPATAN: PENDAPATAN PER JIWA (US\$) DI BERBAGAI KAWASAN, 1913 dan 1957

Kawasan	1913		1957	
	penduduk (juta)	pendapatan per jiwa	penduduk (juta)	pendapatan per jiwa
Amerika Utara	105	917	188	1.868
Eropa Barat Laut	184	454	211	790
Asia Selatan dan Timur	323	65	518	67
Cina	370	50	640	61
Penduduk dunia	1.463		2.373	

Sumber: L.J. Zimmerman, *Arme en Rijke Landen* (Den Haag, 1959), hal. 29,31

Dunia Ketiga menderita kekurangan pangan, biarpun dunia mempunyai sumber-sumber daya untuk memberi pangan kepada mereka. Terdapat kepincangan pembagian sumber-sumber daya dunia pada skala di mana negara-negara industri menghabiskan sekitar duapuluh kali lebih banyak sumber-sumber daya per jiwa daripada negara-negara miskin. Kita menghadapi suatu situasi di mana, di Dunia Ketiga, berjuta-juta orang bekerja di bawah terik matahari dari pagi sampai petang dengan balas karya yang menyedihkan dan kematian sebelum waktunya tanpa mengetahui alasan mengapa demikian.

Baik dunia kaya maupun miskin menghadapi masalah-masalah yang mendesak dan tiada taranya. Masalah-masalah itu tidak terpisah dan tidak dapat dipecahkan yang satu lepas dari yang lain. Nasib umat manusia berakar pada masa lampainya, pada struktur-struktur ekonomi dan sosial yang muncul dalam dan antara bangsa-bangsa. Krisis sekarang ini, dalam perekonomian dunia dan dalam hubungan-hubungan antar bangsa, adalah suatu krisis struktur-struktur internasional. Yang harus dihadapi oleh kedua dunia itu pada dasarnya adalah suatu sistem sakit yang tidak dapat disembuhkan dengan bantuan pertama

ekonomi yang cepat. Perubahan-perubahan marginal tidak akan mencukupi. Yang diperlukan ialah pembaruan-pembaruan institusional yang fundamental, yang didasarkan atas diakuinya kepentingan bersama dan urusan bersama, di dunia yang semakin interdependen. Yang diperlukan ialah suatu tata internasional baru di mana semua orang akan mendapat keuntungan dari perubahan.

Persetujuan-persetujuan mana pun akhirnya akan dirundingkan, harus ada keseimbangan antara kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa kaya dan miskin. Semua bangsa harus menimbang dengan saksama biaya disrupsi dengan biaya akomodasi dan memperhatikan kenyataan bahwa segala biaya suatu persetujuan baru yang dapat dibayangkan akan merupakan bagian sangat kecil dari pertumbuhan mendatang dalam suatu kerangka kerjasama yang teratur.

Bukan saja sangat diperlukan perubahan, tetapi juga terdapat lebih banyak kesempatan untuk mengorganisasi perubahan. Sejarah umat manusia adalah ceritera suatu proses perubahan yang terus menerus dan evolusi di hadapan ancaman-ancaman dan bahaya-bahaya. Adalah proses ini yang memberikan dinamisme dalam perjuangan untuk terus menerus memperbaiki kondisi hidup dan meningkatkan penguasaan atas alam. Proses yang selalu terbuka untuk campur tangan manusia yang otonom kadang-kadang juga tunduk pada 'gangguan-gangguan sejarah', pemotongan atau 'perubahan' kecenderungan-kecenderungan yang memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengambil prakarsa-prakarsa baru dalam mengarahkan kembali proses evolusi. Empat gangguan serupa itu terjadi baru-baru ini dan mempunyai arti internasional yang besar sekali.

Pertama, salah satu superpower dunia terpaksa meninggalkan bagian dunia di mana dia turun tangan mendukung suatu pemerintah yang tidak representatif. Bahwa bangsa yang kuat ini tidak mampu menggunakan kemampuannya sepenuhnya adalah sangat penting. Kedua, terdapat tuntutan-tuntutan Dunia Ketiga, yang diperkuat oleh tindakan-tindakan OPEC, suatu perkembangan yang akan semakin dirasakan di forum-forum

internasional dalam dasawarsa mendatang ini. Ketiga, bangsa-bangsa yang kaya dan diistimewakan, dunia industri, menjadi semakin tidak mampu untuk menangani ketimpangan-ketimpangan ekonomi dalam sistem internasional sekarang ini dan menghadapi secara kreatif jatuhnya penemuan mereka sendiri; ini bersama-sama dengan meningkatnya alienasi dan frustrasi serta ancaman-ancaman terhadap nilai-nilai manusiawi dasar dan lingkungan manusiawi yang bersumber pada tekanan-tekanan untuk konsumsi. Dan keempat, orang semakin mengakui interdependensi-interdependensi global dan kenyataan bahwa tiada bangsa, betapa berkuasa pun dia mungkin merasa dirinya sendiri, dapat menjalankan politiknya dalam isolasi.

Tuntutan akan suatu Tata Ekonomi Internasional Baru harus ditempatkan dalam proses sejarah ini. Di satu tingkat penalaran, dia adalah suatu evolusi alamiah filsafat yang telah diterima di tingkat nasional: bahwa pemerintah harus aktif turun tangan untuk lapisan-lapisan penduduknya yang paling miskin (40% lapisan bawah) yang kalau tidak akan dilewati perkembangan ekonomi. Pada planit yang dengan cepat menjadi kecil, tak terhindarkan bahwa filsafat 'baru' ini tidak akan berhenti pada perbatasan-perbatasan nasional; dan oleh sebab tiada pemerintah dunia, bangsa-bangsa yang miskin mengadakan keprihatinan mereka kepada substitutnya yang paling dekat, PBB. Pada tingkat lain, tuntutan akan perubahan struktural, seperti telah kita lihat, adalah suatu keadaan kedua yang alamiah dalam evolusi negara-negara Dunia Ketiga; suatu gerak dari persamaan politik ke persamaan ekonomi.

Sudah barang tentu tiada sesuatu baru dalam adanya kaya dan miskin. Sejarah tidak mengenal sesuatu lain dan untuk sebagian dibentuk oleh pertarungan antara mereka. Akan tetapi si kaya dan si miskin di masa lampau pokoknya terdapat dalam masyarakat masing-masing. Yang relatif baru ialah perbedaan-perbedaan yang besar sekali antara masyarakat-masyarakat. Lagi pula perbedaan-perbedaan itu nampak; kaum kaya tidak dapat menyembunyikan kekayaan mereka dalam satu "desa global". Perbedaan-perbedaan menyolok diketahui oleh kaum miskin berkat ketrampilan teknologi dunia kaya. Dan persepsi

ANALISA

mereka mengenai perbedaan-perbedaan itu, dalam dunia yang menyusut, akan melakukan tekanan yang meningkat atas lembaga-lembaga internasional yang telah rapuh.

Hari depan umat manusia bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu, untuk mengembangkan suatu pengertian dan kesadaran baru, yang didasarkan atas interdependensi dan minat bersama untuk bekerja dan hidup bersama. Gangguan-gangguan dalam proses perubahan baru-baru ini telah menempatkan umat manusia di gerbang pilihan-pilihan baru. Dalam memilih di antaranya, dia harus menerima kenyataan keras bahwa, mungkin bertentangan dengan waktu-waktu yang lampau, dia hanya mempunyai satu hari depan atau tiada hari depan sama sekali.

SUDAH TERBIT :



**SITUASI PENDIDIKAN
DI INDONESIA
SELAMA SEPULUH TAHUN
TERAKHIR
BAGIAN I (PERMASALAHAN)**

**Onny S. PRIJONO
A.M.W. PRANARKA**



Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS), tebal 176 hal., kertas HVS, harga @ Rp. 1.750,00

"Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir" akan dikemukakan di dalam tiga bagian. *Bagian Pertama* telah terbit dan membahas masalah-masalah penting selama 1968-1978. Bagian Pertama ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai pendidikan nasional, terutama yang dikeluarkan oleh lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengungkapkan permasalahan pendidikan nasional selama periode tersebut. *Bagian Kedua* akan terbit dalam waktu singkat dan akan membahas mengenai langkah-langkah kebijakan pendidikan nasional selama periode tersebut. Sedangkan *Bagian Ketiga* sebagai bagian terakhir merupakan evaluasi.

Persediaan terbatas! Dapatkan segera di toko-toko buku atau pesan langsung disertai pembayaran tambah ongkos kirim 15% ke :

BIRO PUBLIKASI CSIS, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telp. 349489

DIALOG UTARA-SELATAN: SEGI POLITIK DAN EKONOMI TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU*

CSIS

PENGANTAR

Dialog Utara-Selatan bukan hanya nama lain bagi Konpersi Kerja Sama Ekonomi Internasional (CIEC). Walaupun yang terakhir ini rupanya lebih tepat untuk menunjukkan sasaran pertemuan, yaitu menyusun suatu kerja sama ekonomi di tingkat global, yang pertama menunjukkan sarana-sarana atau proses mencapai sasaran-sasaran itu. Sampai batas-batas tertentu yang pertama lebih mengena dan juga menantang. Utara adalah nama baru bagi kelompok negara-negara industri dengan pendapatan tinggi, yang kebanyakan secara kebetulan terdapat di Utara. Selatan terdiri atas negara-negara dengan pendapatan rendah yang terletak di Selatan. Kata dialog mempunyai banyak nuansa. Kata Yunani aslinya terdiri atas *dia* — berdebat, dan *lego* — berbicara. Menurut *Webster*, suatu dialog bisa berarti suatu pembicaraan biasa antara dua pihak atau lebih atau suatu komposisi di mana dua pihak atau lebih mewakili untuk membicarakan suatu topik. Tetapi dia juga bisa berarti suatu pembicaraan formal dalam suatu pagelaran di panggung.

Suatu evaluasi sidang CIEC Nopember 1976 di Paris mengungkapkan status dialog sekarang ini. Adalah menyolok mata bahwa kedua pihak dialog itu lebih berbeda pendapat daripada

* Salinan sebuah kertas kerja pada *Seminar Amerika Serikat-Asia Tenggara* di Bali, 30 Mei — 1 Juni 1977

sepakat. Mungkin tidak begitu mengherankan kalau kita mengikuti lain-lain perundingan internasional serupa itu di forum-forum seperti UNCTAD dan Konperensi Hukum Laut. Tetapi CIEC berbeda dari lain-lain perundingan internasional karena bipolaritas Utara dan Selatan dijadikan terang-terangan. Selama tahun-tahun yang lampau, bipolaritas ini merupakan agenda terselubung di hampir semua pertemuan internasional. Dilihat dari sudut pandangan ini Dialog Utara-Selatan perlu mendapat perhatian serius. Sekalipun *isu-isu* dalam dialog itu penting — paling tidak untuk Selatan — *isu-isu* itu tidak mempunyai arti utama. *Penyelenggaraan* dialog ini merupakan esensi usaha itu. Isyu-isunya hanyalah pohon-pohon; Selatan menekankan hutannya. Sukses-sukses pertemuan-pertemuan CIEC tidak hanya bernilai bagi pertemuan-pertemuan itu sendiri tetapi akan juga mempunyai *akibat-akibat ekstern* yang mempengaruhi hasil lain-lain perundingan internasional yang sedang berlangsung dan yang akan diadakan pada tahun-tahun mendatang.

Bagi Selatan, CIEC lebih dilihat dan harus dilihat sebagai suatu forum *politik* daripada suatu forum untuk membicarakan soal-soal teknis. Perbedaan-perbedaan pendapat antara Utara dan Selatan mengenai soal-soal prosedur mengungkapkan pandangan Selatan mengenai wewenang CIEC terhadap badan-badan internasional lain. Pada pertemuan Nopember 1976 Utara tidak mau membicarakan alokasi SDR dan ciri-ciri SDR maupun usul Selatan mengenai perdagangan antara negara-negara maju dan berkembang atas dasar bahwa soal-soal ini masing-masing adalah di bawah wewenang IMF dan GATT.

Bagi Selatan, Dialog Utara-Selatan mempunyai empat unsur dasar. *Pertama*, Tata Ekonomi Internasional yang berlaku sekarang ini adalah suatu alat Utara, dan sebagai alat Utara dia mengabdikan kepada kepentingan-kepentingan Utara di luar proporsi. *Kedua*, substansi dialog itu adalah ekonomi politik; dia berurusan dengan produksi dunia, alokasi sumber-sumber dunia, dan distribusi hasil-hasil dunia. *Ketiga*, tuntutan-tuntutan Selatan adalah pernyataan-pernyataan perang melawan kemiskinan pada tingkat global. *Keempat*, dialog itu dipolitisasi oleh

Selatan karena kenyataan bahwa kekuasaan politik adalah satu-satunya kekuatan yang dapat digunakan Selatan.

Asumsi-asumsi Selatan adalah ganda. Selatan yang lebih makmur dan swadaya secara positif harus memasuki fungsi manfaat Utara. Asumsi ini menunjuk pada *argumen kesejahteraan umum*; Utara tidak akan merasa enak di dunia negara-negara yang putus asa. Asumsi kedua menyangkal argumen mengeluarkan (*crowding out argument*); kue dunia dapat diperbesar di bawah suatu rezim ekonomi internasional yang tepat. Dengan perkataan lain, dunia terpaksa memainkan suatu permainan zero-sum hanya di bawah *status quo*. Penyaluran sumber-sumber daya dari Utara ke Selatan tidak berarti menguras sumber-sumber daya dunia, sebaliknya, dia dapat meningkatkan pendapatan dunia dengan meningkatkan produktivitas dunia. Akibat Penrose (*Penrose-effect*) penurunan produktivitas jika investasi digalakkan terlalu cepat hanyalah suatu gejala sementara.

Analisa-analisa penyaluran sumber-sumber daya harus membedakan antara akibat-akibat sepiantas lalu dan permanen. Penyaluran sumber-sumber daya dari Utara ke Selatan pada prinsipnya dapat dilakukan secara lengkap, dan dalam banyak kasus bahkan terlalu karena Selatan cenderung untuk mengimpor barang-barang dagangan Utara. Suatu penyaluran yang kurang memadai tidak akan menetap secara abadi; suatu penggunaan tepat alat-alat kebijaksanaan yang tersedia bagi Utara dapat menjamin bahwa penyaluran dapat dilaksanakan secara penuh tanpa menurunkan tingkat pendapatan Utara.

SUATU PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ATAS TATA "LAMA"

Satu perbedaan pokok antara Utara dan Selatan yang muncul pada pertemuan Nopember 1976 di Paris adalah tentang masalah stabilitas harga-harga komoditi yang dibicarakan dalam Komisi Bahan Mentah. Utara menolak usul Selatan mengenai harga mantap dalam rangka Program Terpadu UNCTAD dengan menandakan bahwa negara-negara industri tidak ingin

membahayakan fungsi pasar. Secara ironis, orang mengetahui bahwa pasar-pasar internasional sejak lama digantikan oleh serangkaian *mekanisme alokatif non-pasar*, serangkaian pengaturan institusional yang bersama-sama kini merupakan *tata* internasional. Tiada artinya berpura-pura bahwa pengaturan-pengaturan internasional sekarang ini menjamin berfungsinya pasar secara relatif "bebas".

Menganalisa kegagalan pasar untuk menemukan penyakit-penyakit dasar perekonomian dunia adalah sukar karena akibat-akibat yang membingungkan dan dominan dari alokasi-alokasi nonpasar yang dipaksakan. Lagi pula, alokasi-alokasi nonpasar rupanya telah memperkuat dan meningkatkan besarnya kegagalan alokasi-alokasi pasar. Kekurangan-kekurangan, baik dalam arti pola produksi Utara dan Selatan atau dalam arti alokasi sumber-sumber dunia antara Selatan dan Utara maupun dalam arti distribusi hasil dunia antara Selatan dan Utara adalah akibat gabungan kekurangan-kekurangan pasar dan nonpasar. Karena kekurangan pasar dan nonpasar berlainan hakikatnya dan memerlukan jenis penyelesaian yang berlainan pula. Mengabaikan akibat-akibat gabungan kekurangan-kekurangan pasar dan nonpasar dengan kekurangan-kekurangan pasar "murni" cenderung untuk membuat yang terakhir lebih parah. Sebagai akibatnya kemungkinan-kemungkinan penyelesaian jurang Utara-Selatan rupanya membutuhkan penyaluran-penyaluran besar di luar proporsi.

Sumber-sumber kekurangan-kekurangan tipe pasar "murni" telah diulas dalam konteks jurang Utara-Selatan. Ini terjalin dengan soal sebab-sebab mengapa orang-orang miskin tetap miskin. Kegagalan negara-negara Selatan untuk ikut dan mengambil manfaat sebagai bagian perekonomian dunia adalah dua macam. Jenis pertama kegagalan itu dapat disebutkan sebagai "kegagalan kurangnya kekayaan alam"; dalam kasus ini adalah tautologis tetapi benar bahwa sementara negara adalah miskin karena miskin. Jenis kedua dapat disebut "kegagalan karena struktur"; di sini kekakuan-kekakuan struktural merupakan hambatan yang mengikat. Dalam arti kegagalan pasar "murni", negara-negara Selatan jenis pertama sama sekali "ter-

singkirkan" dari pasar-pasar internasional: mereka tidak dapat membeli barang-barang investasi dari luar negeri karena tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pendapatan valuta asing; mereka tidak dapat meminjam dari pasar-pasar modal internasional karena tingkat keuntungan yang dapat dihasilkan terlalu rendah; mereka tidak dapat menanam modal untuk meningkatkan kemampuan mereka memasuki pasar-pasar internasional karena tidak memiliki sesuatu pun untuk ditabung. Berlainan dengan negara-negara Selatan jenis pertama, negara-negara Selatan jenis kedua telah menjadi bagian perekonomian dunia, sekalipun hanya secara marginal. Kekakuan-kekakuan struktural menghambat mereka untuk mengubah pola-pola produksi mereka, dan oleh sebab itu mereka terpaksa memasuki perekonomian dunia lewat pola-pola perdagangan yang sangat lemah.

Pernyataan di atas itu sudah jelas karena telah dikenal para pembaca buku-buku populer dan buku-buku teks tentang perkembangan ekonomi. Apa yang hampir analisa tidak memasukkan ialah akibat-akibat organisasi-organisasi nonpasar internasional sebagai keseluruhan. Satu-satunya segi penting alokasi-alokasi non-pasar internasional yang mendapat perhatian luas adalah peranan *bantuan luar negeri*. Bantuan luar negeri, betapa pun pentingnya, hanyalah sebagian perangkat total mekanisme-mekanisme alokatif nonpasar internasional. Dalam suatu jenis analisa keseimbangan umum orang mungkin dapat melacak akibat-akibat mekanisme nonpasar ("tata" internasional) maupun akibat-akibat yang melumpuhkan bantuan luar negeri. Pengamatan akan menunjukkan bahwa akibat akhir bagi negara-negara Selatan sebagai keseluruhan, cenderung menjadi negatif.

Terdapat tiga keterangan bagi gejala ini. Keterangan pertama ialah *akibat penyerapan tidak produktif* dan terutama berlaku bagi negara-negara Selatan jenis pertama. Dalam kasus ini, bantuan luar negeri hanya cukup untuk menopang suatu tingkat minim eksistensi, maka penyaluran diserap untuk konsumsi dan mengakibatkan pengurusan sumber-sumber daya dalam arti investasi dunia. Keterangan kedua ialah *akibat ekstern yang mengacaukan* dan berlaku bagi negara-negara Selatan jenis

kedua. Dalam kasus ini sumbangan bantuan luar negeri untuk pertumbuhan dan perkembangan dikacaukan oleh pengaturan-pengaturan non-pasar internasional yang di luar kekuasaan negara-negara itu. Keterangan terakhir berhubungan dengan *akibat-akibat kebocoran dalam negeri*, di mana sebagian sumbangan bantuan luar negeri diselewengkan. Tetapi akibat ini kiranya bersifat sementara. Bagi penerima (negara-negara Selatan) akibat-akibat itu merupakan biaya belajar, dan bagi pemberi (negara-negara Utara) dapat dilihat sebagai biaya sosial.

Dua masalah berlainan muncul dari diskusi di atas. Yang pertama mengenai soal "Betapa banyak bantuan adalah cukup?" dan bertugas untuk meneliti jumlah sumber-sumber yang perlu disalurkan dari Utara ke Selatan. Yang kedua berhubungan dengan masalah strategi ganda: (a) kemampuan Selatan untuk *menghapus akibat-akibat ekstern yang mengganggu* atas usaha-usaha pembangunannya, terhadap mana — dalam tata sekarang ini — dia sekarang praktis tak berdaya dan: (b) kesediaan Utara untuk mengurangi atau melenyapkan akibat-akibat itu. Mengenai masalah pertama umumnya diakui bahwa soal tentang jumlah "optimal" penyaluran dari Utara ke Selatan belum dipecahkan. Perhitungan-perhitungan kebutuhan-kebutuhan modal negara-negara berkembang jauh dari sempurna, dan validitasnya bagi bantuan sebagai dasar keputusan-keputusan kebijaksanaan dipersoalkan. Untuk menghindari dilema itu PBB menentukan suatu target internasional. Dalam Strategi Pembangunan Internasionalnya target itu didasarkan atas "a rule of the thumb", suatu kriterium yang menghubungkan kebutuhan modal Selatan dengan tersedianya suplai, yang dibatasi sebagai 0,7% GNP negara-negara Utara. Ini merupakan suplai modal dalam bentuk Bantuan Pembangunan Resmi (ODA). Sekalipun kriterium ini tidak mempunyai dasar analitis yang sehat, dia diterima oleh Selatan, dan sampai batas-batas tertentu digunakan oleh Utara (Komite Pembangunan OECD) untuk menilai pelaksanaan Utara. Berdasarkan prinsip itu, dua masalah lain diidentifikasi. Pertama, ODA dari negara-negara Utara sebagai keseluruhan tidak mencapai target itu. Pada 1975 jumlah ODA dari negara-negara DAC hanya mencapai 36% GNP, suatu kecenderungan yang tak berubah sejak awal 1970-

an. Kedua, sebagai prosentase arus sumber-sumber total dari Utara ke Selatan, bagian ODA menunjukkan suatu kecenderungan menurun, dan kini mencapai suatu tingkat di bawah 50%. Ini berarti bahwa syarat-syarat pinjaman negara-negara Selatan dari Utara rata-rata menjadi lebih berat.

Lebih mengandalkan pasar-pasar modal swasta (komersial) telah merugikan negara Selatan jenis pertama, yaitu mereka yang per definisi tidak dapat memasuki pasar-pasar internasional. Negara-negara Selatan yang *dapat memasuki pasar-pasar modal internasional* hanya sedikit negara yang memiliki ciri-ciri tertentu (seperti Brazil, Meksiko, Iran dan Indonesia). Mengingat hal itu, dua isu langsung harus diteliti. Pertama, haruskah ODA melengkapi modal swasta atau apakah modal swasta harus melengkapi ODA. Suatu penelitian masalah ini akan mengisyaratkan bahwa yang terakhir itu adalah suatu skema yang lebih baik bagi negara-negara Selatan sebagai keseluruhan, asal ODA, yang — kenyataannya adalah hasil politik anggaran kompleks negara Utara masing-masing, dibuat lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan pembangunan negara-negara Selatan. Tetapi yang paling baik ialah agar ODA diperiksa tidak lepas dari perkembangan di pasar-pasar modal internasional. Ini membawa kita ke masalah kedua, yaitu ketidaksempurnaan dalam pasar-pasar modal internasional itu sendiri.

Sesuai dengan orientasi umum analisa ini, ketidaksempurnaan dalam pasar-pasar modal internasional dapat dipecah menjadi pasar-pasar tipe pasar-pasar "murni" dan tipe yang bersumber pada pengaturan-pengaturan nonpasar. Kekurangan-kekurangan tipe pasar "murni" harus diselidiki dalam kerangka tata internasional yang lebih luas. Ketidakpastian-ketidakpastian mengenai perkembangan-perkembangan di pasar-pasar modal internasional mempunyai akibat-akibat mendalam atas pasar-pasar asuransi internasional. Rezim moneter internasional sekarang ini adalah salah satu sebab utama ketidakpastian-ketidakpastian itu. Dikemukakan bahwa suatu rezim pertukaran tetap akan mengurangi tingkat ketidakpastian, biarpun dengan biaya tambahan. Pengembangan yang diatur (atau "kotor") antara mata-mata uang dunia yang penting, biarpun mengurangi biaya

bagi dunia sebagai keseluruhan, tidak mengalokasikan beban secara proporsional antara Utara dan Selatan. Kekurangan nonpasar ini mempunyai akibat-akibat buruk yang berat bagi negara-negara Selatan, biarpun negara-negara Utara tidak dapat menetralisasi akibat-akibatnya di antara mereka sendiri. Perbedaan penting dalam hakikat akibat-akibat ini bagi Utara dan bagi Selatan berakar pada asimetri dalam kemampuan mereka untuk mengendalikan perkembangan-perkembangan itu. Terlepas dari akibat indirek pasar uang atas berfungsinya pasar-pasar modal internasional, pengaturan-pengaturan nonpasar yang langsung mempengaruhi kecakapan negara Selatan untuk memperbaiki akses mereka ke pasar asuransi internasional; antara lain pengaturan-pengaturan itu diidentifikasi dengan peraturan-peraturan untuk menetapkan suatu plafon dan lain-lain jenis pembatasan atas pinjaman-pinjaman internasional.

Hal di atas itu hanya suatu contoh akibat mengganggu internasional yang dihadapi negara-negara Selatan. Akibat-akibat lain perlu diselidiki lebih lanjut. Satu masalah utama adalah akibat-akibat gangguan-gangguan ekstern itu atas usaha-usaha negara-negara Selatan (terutama tipe kedua) untuk menyingkirkan pembatasan-pembatasan struktural dan untuk mengubah pola produksi mereka, seperti untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi mereka dalam perekonomian dunia. Usaha-usaha serupa itu adalah ungkapan pengakuan Selatan untuk mengobati penyakit-penyakit fundamental perekonomian dunia. Tetapi mereka juga mengakui bahwa banyak usaha serupa itu dinetralisasi pengaturan-pengaturan nonpasar yang merupakan akibat kebijaksanaan-kebijaksanaan Utara. Tidak banyak berguna memperbaiki prestasi bantuan luar negeri, jika pada waktu yang sama tidak dapat dilakukan sesuatu untuk mengurangi atau melenyapkan akibat pengganggu ekstern utama, yang akibat hubungan-hubungan asimetris yang terdapat antara Utara dan Selatan adalah di luar kemampuan Selatan untuk menguasainya.

Contoh *hambatan-hambatan perdagangan*, tarif dan non-tarif, sangat dikenal. Akibat-akibat jenis alokasi nonpasar internasional ini bagi negara-negara Selatan adalah luas lingkup-

nya. Investasi-investasi dalam negeri, baik dalam modal maupun kerja (investasi manusia), yang menjadi mungkin berkat arus masuk modal keuangan dan barang-barang modal luar negeri maupun berkat tabungan dalam negeri yang meningkat terutama ditujukan untuk melenyapkan hambatan-hambatan struktural. Strategi dominan negara-negara Selatan meliputi pembangunan industri pengolahan bahan mentah dan industri semi-manufacturing yang berorientasi ekspor, yang keduanya — atas dasar *keuntungan komparatif* — harus dan dapat mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar-pasar barang di negara Utara. Alokasi-alokasi non pasar internasional yang berlaku tidak memberi hati kepada jalan perkembangan ini, dan banyak mencegahnya. Sebagai akibatnya, negara-negara Selatan mengalami akibat-akibat berikut: (a) usaha-usaha pembangunan mengalami frustrasi; (b) hasil investasi manusia — faktor input utama adalah kerja — ditekan; (c) dan oleh sebab itu pendapatan negara-negara Selatan dikurangi dari potensinya. Tetapi di negara-negara Utara itu sendiri, konsumen-konsumen mengalami penurunan kesejahteraan yang berarti; kenyataannya mereka dipajaki untuk menopang sistem yang memboroskan sumber-sumber dunia. Pajak-pajak itu akan semakin meningkat sejalan dengan semakin ketatnya sistem. Karena perekonomian dunia sebagai keseluruhan pendapatan akan menurun lebih lanjut dari potensinya, sedangkan penurunan kesejahteraan akan meningkat sejalan dengan itu: perekonomian dunia telah menjadi segi tiga Bermuda dunia yang terus-menerus menguras sumber-sumber daya.

Persepsi-persepsi populer berbeda dengan pandangan ini. Negara-negara Selatan disalahkan sebagai satu-satunya penguasaan sumber daya dunia. Peningkatan bantuan asing meningkatkan potensi produktivitas negara-negara Selatan, tetapi mengingat kekurangan-kekurangan alokasi-alokasi nonpasar, makin besar potensi makin besar pengurangan pendapatan dan kesejahteraan dunia. Di permukaan: suatu peningkatan bantuan asing... lebih lanjut mengurangi pendapatan dan kesejahteraan dunia. Oleh sebab itu untuk mencegahnya, penyaluran sumber-sumber dari Utara ke Selatan tidak boleh ditingkatkan. Jenis penalaran berputar-putar ini menemukan lawannya dalam bidang diskriminasi; lingkaran diskriminasi beroperasi seperti berikut: orang

mengenakan diskriminasi terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga akibat-akibatnya dapat digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminasi.

Kenyataan bahwa transformasi struktural tidak dapat dilaksanakan tidak memberikan pilihan lain kepada negara-negara Selatan kecuali mengandalkan pola tradisional produksi mereka. Ini berarti bahwa partisipasi negara-negara Selatan dalam perekonomian dunia tetap lemah: pendapatan valuta asing dari perdagangan bahan mentah berubah-ubah, dan oleh sebab itu pendapatan mereka tidak pasti, dan investasi-investasi jangka panjang tidak dianjurkan dan seterusnya pertumbuhan lebih kecil dan stagnasi dalam pembangunan. Dengan demikian stabilisasi harga-harga komoditi merupakan soal penting bagi negara-negara Selatan, termasuk Indonesia.

Pada esensinya, *stabilisasi harga-harga komoditi* — maupun *indeksasi* — untuk menjamin pendapatan ekspor negara-negara Selatan bersifat "perbaikan teknologi"; dia tidak menyembuhkan penyakit-penyakit dasar perekonomian dunia. Tetapi cara-cara itu dimaksud menetralkan cara-cara lain, yaitu alat-alat alokatif nonpasar yang diciptakan Utara. Apakah ini berarti bahwa Tata Ekonomi Internasional Baru hanyalah perluasan tata yang lama, tetapi ditambah dengan serangkaian peraturan teknologi yang hakikatnya mirip dengan peraturan-peraturan yang merupakan tata lama? Ataukah tata baru itu adalah tata yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit dasar perekonomian dunia? Jawabannya jelas sederhana: "Itu bergantung".

Dialog Utara-Selatan adalah seperti suatu dialog dalam suatu sandiwara, di mana seorang ayah dan ibu menghadapi suatu keputusan untuk berbuat sesuatu bagi anak mereka yang sakit. Anak itu membutuhkan suatu operasi, tetapi ayahnya (Utara) tidak mengizinkannya. Dia mengemukakan bahwa suatu operasi akan disusul operasi lain. Ibu (Selatan) berusaha membujuknya dengan seluruh bakat dan taktik wanitanya. Dia berusaha keras karena lebih menderita dari situasi itu daripada suaminya.

Jika perekonomian dunia tidak dapat disembuhkan (dengan suatu operasi), Selatan tidak akan membiarkan dirinya sebagai pihak yang menderita karenanya. Dalam keadaan putus asa, penenang rasa nyeri (fixes) cukup. Ibu dalam sandiwara di atas berbuat yang sama. Intuisinya memberitahukan kepadanya agar berbuat demikian. Anaknya kurang menderita, tetapi tetap sakit. Sebagai seorang ibu dia tidak akan putus asa. Tirai ditutup, dan babak pertama berakhir.

PERNYATAAN PERANG SELATAN MELAWAN KEMISKINAN

Biarpun dilakukan berbagai usaha, dunia dewasa ini menyaksikan fakta-fakta berikut:

1. 1,2 milyar penduduk negara-negara Selatan berpendapatan kurang dari US\$ 200 per jiwa setahun dibandingkan dengan 700 juta orang di negara-negara Utara yang berpendapatan rata-rata US\$ 5.500 per jiwa setahun;
2. 750 orang di negara-negara Selatan hidup dalam keadaan kemiskinan mutlak, yang berarti hidup pada eksistensi fisik marginal dibandingkan dengan kurang dari 20 juta orang di negara-negara Utara;
3. 600 juta orang negara-negara Selatan kurang makan dibandingkan dengan kurang dari 20 juta orang negara-negara Utara;
4. 62% penduduk negara-negara Selatan adalah orang dewasa yang buta huruf dibandingkan dengan 1% penduduk negara-negara Utara;
5. hampir 300 juta orang penganggur atau setengah menganggur di negara-negara Selatan.

Yang menyolok di belakang angka-angka itu ialah bahwa tata internasional yang ada sekarang ini tidak hanya gagal meningkatkan taraf hidup negara-negara Selatan, tetapi juga

menciptakan suatu kondisi di mana perbedaan kekayaan di antara bangsa-bangsa dunia terus meningkat, dan kini mencapai ratio 35 lawan 1 dan mungkin mencapai ratio 45 lawan 1 pada pertengahan 1980-an, kalau tidak terjadi suatu perubahan fundamental dalam tata ekonomi sekarang ini.

Kenyataan-kenyataan suram itu menggerakkan kekuatan-kekuatan, terutama di antara negara-negara berkembang yang biasa dikenal sebagai "Kelompok 77", untuk menuntut dan mengusahakan suatu perubahan mendalam dan struktural dalam tata ekonomi internasional. Sejak Kelompok 77 negara dibentuk (informal lebih banyak negara bergabung. Dewasa ini kelompok itu mencakup lebih dari 100 negara; bersama-sama mereka merupakan kelompok negara Selatan dan menunjukkan suatu tingkat kohesi dan solidaritas yang cukup mengagumkan, biarpun terdapat berbagai perbedaan dalam kelompok ini. Mungkin merupakan suatu tugas yang menggairahkan bagi ahli-ahli politik dan sejarah untuk meneliti dan menerangkan gejala itu. Sementara orang mengemukakan bahwa embrio solidaritas kelompok ini telah mulai pada Konperensi Bandung 1955. Apa pun kesimpulan ahli-ahli politik dan sejarah, kiranya masuk akal mengisyaratkan bahwa kekuatan-kekuatan sentrifugal besar yang terus meningkatkan solidaritas dan kohesi Selatan adalah pengakuan bahwa harus dilakukan sesuatu oleh kelompok sebagai kesatuan. Negara masing-masing tak berdaya, tetapi sebagai kelompok akal berhasil. Pengakuan ini meningkat secara menyolok terutama akibat dua faktor. Pertama, negara-negara Selatan membayangkan suatu gambaran menakutkan perekonomian dunia pada pertengahan 1980-an. Pernyataan perang Selatan melawan kemiskinan pada intinya adalah suatu tuntutan untuk memutar trend ini segera mungkin. Tuntutan akan penyaluran sumber-sumber daya sekarang juga dari Utara ke Selatan, khususnya ke negara-negara yang paling miskin dan paling menderita terungkap dalam: (a) *muratorium hutang*, yang dimaksud untuk "menghentikan jam", untuk memperlambat laju melebarnya jurang Utara-Selatan; (b) peningkatan ODA sesuai dengan target Strategi Pembangunan Internasional, dan agar kepada ODA diberikan unsur grant 90%.

Faktor kedua ialah kesadaran Selatan bahwa tata internasional menjadi semakin berkeras kepala. Trend ini juga harus diputar. Politisasi Dialog Utara-Selatan adalah ungkapan keyakinan negara-negara Selatan bahwa mereka harus menggunakan kekuasaan potensial mereka. Tuntutan Selatan akan suatu *partisipasi dalam pengambilan keputusan internasional* yang lebih wajar dimaksud untuk mempercepat perubahan tata internasional.

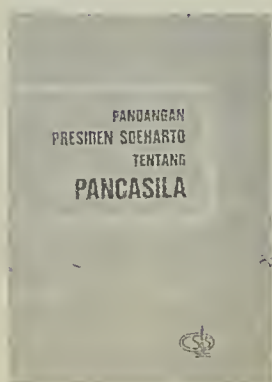
Bagaimanakah tuntutan-tuntutan ini berhubungan dengan struktur suatu Tata Ekonomi Internasional Baru? Muratorium hutang per definisi bersifat sementara; dia tidak bisa menjadi bagian tata internasional baru, tetapi merupakan suatu titik tolak bagi negara-negara Selatan yang paling miskin untuk bergabung dengan tata internasional baru. Di lain pihak, suatu partisipasi yang lebih wajar dalam pengambilan keputusan internasional antara Utara dan Selatan akan menjadi dasar Tata Ekonomi Internasional Baru. Prinsip kewajaran, sekalipun mulai pada dirinya sendiri, merupakan suatu prasyarat bagi kerja sama antara Utara dan Selatan.

CATATAN-CATATAN PENUTUP

Untuk menilai Dialog Utara-Selatan, kita tidak dapat memfokuskan perhatian kita pada isu-isu (daftar tuntutan-tuntutan Selatan) secara terpisah dari iklim total dialognya. Untuk mendapatkan suatu pengertian yang lebih dalam mengenai posisi Selatan kita harus melihat isu-isu itu dari sudut sebenarnya. Dialog Utara-Selatan adalah seperti suatu intan, dia harus diperiksa dari semua sudut.

Anatomi Dialog Utara-Selatan tidaklah kompleks. Dia dapat dimengerti dengan sedikit usaha. Bagi Selatan dia terus terang: Sesuatu harus dilakukan sebelum terlambat. Suatu tata internasional adalah perlu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit perekonomian dunia. Suatu "tata" per definisi adalah serangkaian pengaturan-pengaturan nonpasar; dia perlu karena jika tiada, "pasar" adalah esensial tidak sempurna. Pasar gagal mencapai skema-skema alokasi yang optimal — termasuk suatu

distribusi wajar — sumber-sumber dan produk-produk dunia. Tata sekarang ini tidak menguntungkan dunia sebagai keseluruhan dan merugikan khususnya bagi negara Selatan. Dalam arti bahwa tata sekarang ini membuat lebih parah penyakit-penyakit fundamental perekonomian dunia kita dihadapkan dengan suatu tugas yang lebih mendesak untuk melenyapkan *kekurangan-kekurangan tata* ini agar lambat laun mampu melenyapkan *kekurangan-kekurangan pasar*.



Masih tersedia:

Buku **PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA**, disusun dan diterbitkan oleh CSIS, tebal 95 halaman.

Edisi biasa (kertas koran)	a Rp. 350,—
Edisi lux (kertas HVS)	a Rp. 1.200,—

Juga masih tersedia Analisa-Analisa tentang:

- | | |
|--|-------------|
| "Pancasila Arti dan Penerapannya" (A3/78);
memuat karangan tentang ' <i>Negara dan Ideologi Negara (Suatu Pengantar)</i> ' ' <i>Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia</i> ' ; ' <i>Pancasila Moral Bangsa Indonesia</i> ' (Suatu Pengantar)' - ' <i>Menuju Sistem Ekonomi Pancasila</i> ' | a Rp. 700,— |
| "Beberapa Segi Pembangunan" (A3+4/77); a.l. memuat karangan tentang ' <i>Demokrasi Pancasila</i> ' | a Rp. 700,— |
| "Beberapa Segi Pembangunan Nasional" (A7/78);
a.l. memuat karangan tentang ' <i>Pancasila Moral Bangsa Indonesia-Arti Materilnya</i> ' | a Rp. 700,— |
| "Sumpah Pemuda dan Persatuan Indonesia" (A10/78)
a.l. memuat karangan tentang ' <i>Pancasila dan Kebudayaan Nasional Indonesia</i> ' | a Rp. 700,— |
| "Pembinaan Generasi Muda" (A12/78); a.l. memuat karangan tentang ' <i>Manusia Pancasila Sasaran Pembinaan Generasi Muda</i> ' | a Rp. 700,— |

Pesanlah segera ke BIRO PUBLIKASI CSIS, Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telepon 349489

TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU : SUATU KONFRONTASI YANG BERKEPANJANGAN*

I

Selama seabad literatur Marxis meramalkan jatuhnya kapitalisme. Dia menggariskan proses yang akhirnya akan menghancurkan sistem sosial yang dibangun oleh pasar dan didasarkan atas "milik perorangan atas sarana-sarana produksi". Tetapi kebanyakan dalil yang disusun penulis-penulis Marxis yang dapat dinilai disanggah oleh kejadian-kejadian. Sudah barang tentu dalil-dalil itu secara seenaknya ditafsirkan kembali *ex post facto* untuk menyelamatkan bahasa yang dibutuhkan untuk "maksud-maksud revolusioner". Di antara penyesuaian itu muncul pengakuan baru atas peranan kaum cendekiawan dan penggunaan fasilitas-fasilitas pendidikan massa sebagai alat. Perhatian bagi "perjuangan sosialis untuk membebaskan manusia dan mengakhiri prasejarah" secara berangsur-angsur bergerak melintasi "proletariat industri". Konsep politik memperbaiki dan menampung pranata-pranata dan kelompok-kelompok sosial lain.

Fungsi penting kaum cendekiawan dalam erosi kapitalisme sepenuhnya dipahami oleh Joseph Schumpeter. Doktrin mengenai "gerak maju lewat pranata-pranata intelektual" muncul di

* Saduran karangan Karl Brunner, "The New International Economic Order: A Chapter in a Protracted Confrontation", dalam *Orbis*, Spring 1976, hal. 103-121. Karl Brunner adalah Profesor Ilmu Ekonomi pada Universitas Rochester, New York, dan Universitas Bern, Swiss.

Jerman hampir dua dasawarsa sesudah analisa profetis Schumpeter. Laporannya mengenai peranan yang dimainkan oleh "para perumus profesional" dalam evolusi yang menghancurkan kapitalisme masih menunjukkan pengertian-pengertian mendalam dan banyak saran yang menarik bagi pembaca-pembaca kontemporer. Peranan inteligensia juga menerangkan gejala lain yang tidak dapat dimasukkan dalam skema Marxis yang baku. Serangan sosialis terhadap kapitalisme, terlepas dari sikap permusuhan agresif blok komunis yang telah berakar dan diamati dengan baik, tahun-tahun belakangan ini dipelopori oleh Dunia Ketiga. Kita mengakui keadaan itu berkat penelitian mendalam Daniel P. Moynihan dalam suatu karangan yang dipuji secara luas dan tepat.¹

Keterbukaan elite intelektual di Dunia Ketiga bagi pengaruh tradisi-tradisi intelektual Barat memperluas jangkauan "proses Schumpeter" atas kawasan-kawasan nonkomunis di luar bangsa-bangsa industri yang telah mapan. Retorika sosialis yang dipelihara oleh wakil-wakil banyak "negara baru" hampir tidak mungkin tidak dikenal. Lagi pula, konsepsi-konsepsi sosialis jelas diungkapkan oleh trend dalam politik ekonomi dan bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang berlaku. Evolusi ini mungkin mempengaruhi kedudukan Amerika Serikat dalam beberapa segi. Bertahun-tahun golongan inteligensia dunia membina sikap anti Amerika dan menyatakan simpati-simpati politik melawan kepentingan-kepentingan lama kita. Sebagai negara kapitalis terkemuka, Amerika Serikat merupakan lawan atau mungkin hambatan besar bagi aspirasi-aspirasi sosialis. Namun, tanpa aparatur kelembagaan luas yang disediakan organisasi-organisasi PBB evolusi yang dilukiskan di atas itu kiranya hanya akan mempunyai arti kecil bagi Amerika Serikat. Infiltrasi aparatur itu dan pemanfaatannya meningkatkan kekuatan serangan sosialis. Secara demikian Amerika Serikat menghadapi suatu konflik yang serius dan berkepanjangan atas isu-isu dasar masyarakat.

Evolusi Organisasi PBB merupakan contoh baik "senjata institusional". Sekali diciptakan sesuai dengan maksud-maksud

1 Lihat "The United States in Opposition", dalam *Commentary*, Maret 1975

baik, lembaga-lembaga menentukan insentif-insentif yang membimbing penggunaan dan perkembangannya dalam arah-arrah yang sangat berbeda dan tidak diperkirakan sebelumnya. Selama 15 tahun terakhir PBB semakin banyak menyarankan atau menyetujui gagasan-gagasan mengenai keharusan memindahkan kekayaan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Prasangka ini menghadapkan AS semakin banyak dengan konflik dasar tentang hari depan masyarakat AS. Fasilitas-fasilitas institusional PBB digunakan secara sistematis untuk melancarkan serangan-serangan yang tegas dan luas terhadap "ketidakadilan dan sifat menindas" kapitalisme AS yang kelihatan bertentangan secara tajam dengan "keadilan dan pembebasan" yang dicapai di "negara-negara sosialis".

Orang bertanya-tanya apakah media massa dan wakil-wakil kita mengerti seriusnya tantangan itu. Kaum birokrat tradisional dan diplomat-diplomat di Departemen Luar Negeri rupanya tidak bersedia atau tidak mampu menghadapi situasi itu. Setiap perhatian tegas atas tantangan itu melanggar pola tradisional prosedur diplomasi, dan ini mungkin menerangkan sikap tidak menentu yang dibina pada beberapa kesempatan oleh wakil-wakil AS.¹ Ketidakpastian serupa itu sampai batas-batas tertentu mungkin juga dipengaruhi oleh insentif-insentif institusional yang menentukan serangkaian kepentingan yang bertumpang tindih bagi birokrasi-birokrasi nasional maupun internasional dan beroperasi untuk memperlemah perhatian yang dicurahkan oleh sementara birokrasi nasional untuk kepentingan-kepentingan nasional. Ini juga menerangkan reaksi birokrasi-birokrasi dan diplomat-diplomat gaya lama dari Eropa terhadap kekecualian penting dalam pemerintahan kita. Moynihan rupanya memahami hakikat tantangan itu dan prospek konfrontasi. Dalam

1 Laporan yang diterbitkan oleh koresponden *Neue Zürcher Zeitung* Agustus 1975 pada kesempatan Konferensi PBB tentang Pencegahan Kejahatan yang diadakan di Jenewa sangat baik mengutarakan hal itu. Laporan ini meringkas serangan-serangan terhadap negara-negara Barat dan Amerika Serikat khususnya serta mencatat bahwa wakil-wakil Barat diam, sambil menyatakan bahwa mereka tidak mau menanggapi serangan-serangan itu untuk "menghindari polemik". Sikap ini mengungkapkan suatu kegagalan serius untuk memahami kenyataan internasional, atau suatu putusan salah yang serius mengenai strategi Barat untuk menghadapi serangan-serangan itu.

kegagalan pemerintah-pemerintah dan wakil-wakil AS terlibat lebih banyak daripada semata-mata penerimaan retorika sosialis yang menghukum masyarakat kita. Retorika itu menyertai usaha-usaha tekun untuk memperluas aparatur institusional organisasi-organisasi internasional. Lagi pula, perluasan itu secara berangsur-angsur akan memaksakan, paling tidak menurut maksud yang dinyatakan, pembatasan-pembatasan yang meningkat atas pengaturan intern kita. Dengan demikian "gerak maju lewat lembaga-lembaga internasional" menjadi salah satu sarana untuk lambat laun mengalahkan kapitalisme AS dan mengubah masyarakat AS ke tingkat "keadilan, persamaan dan kebebasan" yang harus dicapai menurut teori sosialis yang membimbing banyak wakil Dunia Ketiga. Bahkan jika retorika itu hanya merupakan alat untuk membina perasaan salah inteligensia AS dengan maksud untuk mendorong pemindahan kekayaan, pemindahan serupa itu memerlukan pengaturan institusional yang mengubah sifat lama masyarakat Amerika Serikat.

II

Pola umum yang memerintah lembaga-lembaga PBB kiranya dapat dijelaskan dengan dua resolusi yang diterima Majelis Umum pada 9 Mei 1974. Pada hari itu Majelis Umum menerima "Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru" yang dimaksud untuk "menghilangkan jurang yang makin lebar antara negara-negara maju dan berkembang". Deklarasi itu mengakui bahwa "sisa-sisa . . . dominasi kolonial . . . dan neokolonialisme dalam segala bentuknya" termasuk "hambatan-hambatan paling besar bagi pembebasan dan kemajuan negara-negara berkembang". Juga dikatakannya bahwa "suatu perkembangan yang tenang dan berimbang" tidak mungkin dicapai di bawah "tata ekonomi internasional yang berlaku", dan ditanhaskan bahwa warisan tata ekonomi itu "bertolak belakang dengan perkembangan-perkembangan dalam hubungan-hubungan politik sekarang ini". Dengan demikian dituntut agar negara-negara berkembang ikut serta secara aktif, penuh dan sama "dalam perumusan dan penerapan keputusan-keputusan yang menyangkut masyarakat internasional". Dan dengan demikian kita membaca bahwa "kerja sama internasional bagi pem-

bangunan adalah tujuh bersama dan kewajiban bersama semua negara". "Kerja sama seluas mungkin semua negara di mana perbedaan-perbedaan yang ada dapat dihilangkan" harus dipelihara; demikian pun "kedaulatan permanen setiap negara atas sumber-sumber daya alamnya dan semua kegiatan ekonominya".

Seminggu kemudian Majelis Umum PBB itu sendiri melontarkan suatu resolusi pelengkap yang diperkenalkan sebagai "Aksi Program Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru". Kolonialisme dan neokolonialisme sekali lagi dikutuk dan diserang dengan hebatnya. Tindakan-tindakan yang diusulkan dibagi dalam sektor-sektor yang meliputi perdagangan dan bahan mentah, pengangkutan, sistem moneter internasional, pengaturan perusahaan-perusahaan multinasional, dan serangkaian sarana untuk memperkuat PBB dalam bidang kerja sama ekonomi internasional. Ketentuan-ketentuan di bawah item pertama hendaknya menjamin pendapatan nyata yang lebih tinggi dari ekspor, lebih banyak bantuan dan sumbangan keuangan dalam salah satu bentuk. Biaya pengangkutan (bagaimana juga) harus diturunkan, paling tidak untuk negara-negara berkembang. Dalam sektor masalah-masalah moneter internasional, negara-negara berkembang ingin "dilibatkan sepenuhnya sebagai partner yang sama" dalam seluruh pembuatan keputusan. Langkah kembali ke suatu sistem nilai tukar yang tetap disebutkan dengan sedikit tekanan. Usul ini minta perhatian tambahan bagi persediaan likuiditas internasional yang akan dikaitkan dengan grant keuangan kepada negara-negara berkembang. Jadi kaitan ini dihubungkan dengan pemulihan sistem nilai tukar tetap. Seksi terakhir Program Aksi menyebutkan suatu jadwal luas untuk menggunakan atau memperluas lembaga-lembaga PBB dan secara demikian meningkatkan kedudukan tawar-menawar negara-negara Dunia Ketiga.

Dalam kasus beberapa pembaca resolusi-resolusi PBB tidak mengerti arti penggunaan kedudukan itu yang ditutupi dengan kalimat-kalimat bagus tentang keadilan, persamaan, perdamaian

an, kebebasan dan kemanusiaan yang diucapkan oleh wakil-wakil suatu kumpulan besar tiran kecil maupun besar, kita beruntung dapat menyebutkan tafsir berguna yang diberikan oleh seorang moralis. Pada 17 Maret 1975 Gunnar Myrdal menyampaikan suatu Kuliah Peringatan Nobel tentang "Isyu Persamaan dalam Perkembangan Dunia". Pandangan dunia Myrdal mulai dengan "imperia kolonial" lama yang mengabaikan atau mungkin memeras negara-negara jajahan mereka yang kurang berkembang, yang "mengalami stagnasi kemiskinan". Meluasnya kemerdekaan dalam periode sesudah perang mendorong timbulnya suatu kesadaran akan kepincangan antara negara-negara maju dan berkembang. Suatu isyu moral muncul yang harus mendapat perhatian kita. Myrdal mengakui bahwa beberapa bantuan diberikan selama tahun-tahun itu, tetapi menganggap bantuan serupa itu sama sekali tidak memadai dan biasanya diberikan dengan motif-motif salah (kecuali, sudah barang tentu, oleh Swedia). Baik moralitas maupun akal sehat pada hematnya menuntut pembentukan suatu tata dunia baru. Tata dunia baru ini harus dirancang untuk menghilangkan ketidaksamaan dan memasukkan keadilan sama rata (egalitarian).

Asas sama rata secara langsung mengungkapkan moralitas yang wajar, dan akal sehat diungkapkan dalam pendapat Myrdal bahwa pengurangan berarti dalam tingkat konsumsi masyarakat-masyarakat Barat adalah demi "kepentingan individual dan kolektif" semua anggota masyarakat-masyarakat itu. Implementasi moralitas dan akal sehat itu memerlukan suatu perencanaan nasional untuk mencapai tingkat konsumsi yang lebih rendah untuk melepaskan sumber-sumber daya guna disalurkan ke negara-negara berkembang. Khususnya dia mencatat bahwa AS harus disiapkan "untuk memulai dan bekerja sama dalam aksi berencana antar pemerintah secara yang menuju 'suatu tata dunia baru' yang diminta oleh negara-negara berkembang, yang pada gilirannya akan memaksa pembatasan rasional penggunaan sumber-sumber daya kita secara berlimpah". Jadi tata dunia baru itu memasukkan suatu sistem "perencanaan nasional terpadu" semata-mata untuk menghasilkan suatu penyaluran masif kekayaan dari negara-negara industri ke kebanyakan anggota organisasi PBB. Myrdal cukup jelas memahami bahwa tata

dunia baru itu tidak dapat diwujudkan tanpa perubahan-perubahan institusional besar yang terkandung dalam "perencanaan antar pemerintah nasional". Sepintas lalu dia mencatat bahwa suatu organisasi ekonomi yang mengandalkan pasar rupanya tidak kondusif untuk tindakan-tindakan rasional atas permintaan-permintaan konsumsi.

Dengan demikian isu yang dihadapi AS dibatasi dengan jelas. Kita diminta oleh kebanyakan anggota PBB dan "pemimpin-pemimpin intelektual dan moral" untuk menerima dan memulai suatu transisi ke suatu dunia sosialis dan suatu masyarakat sosialis. Ada baiknya di sini menerangkan cara kita menggunakan istilah "sosialis" yang dilakukan dalam diskusi ini. Dua ciri organisasi sosial yang erat berkaitan menentukan segi-segi penting kehidupan manusia: sejauh mana alokasi dan penggunaan sumber-sumber daya dibimbing oleh harga-harga yang dibentuk dalam pasar dan luas atau isi hak-hak milik perorangan. Tiada masyarakat tanpa pasar dan kegiatan-kegiatan yang dibimbing harga-harga, tiada masyarakat tanpa milik perorangan atas sumber-sumber daya atau penggunaan sumber-sumber daya itu.¹ Adalah penting dalam hubungan ini memahami hakikat dan akibat-akibat suatu "struktur hak"; akibat-akibat sangat berbeda-beda menurut jangkauan, keterbukaan, kemungkinan diramalkan, stabilitas dan kemungkinan diperdagangkannya hak-hak itu.

Program-program sosialis pada pokoknya menurunkan berbagai dimensi hak-hak perorangan dan jangkauan mekanisme pasar. Pembatasan ini secara implisit menolak konsepsi Lange-Lerner tentang masyarakat sosialis yang berorientasi pada pasar. Pengertian mereka pasti mungkin, tetapi hendaknya juga diakui

¹ Pengamat-pengamat Republik Demokrasi Jerman mencatat bahwa para penjaga pintu pada Pekan Raya Dagang Leipzig menuntut US\$ 80 "untuk pemakaian pribadi," kamar kecil selama pekan raya itu. Agar dapat pergi ke dokter dengan cepat orang harus membayar ekstra; demikian pun agar mendapat pelayanan yang lebih cepat dari montir-montir mobil. Di samping sistem yang resmi dan ditetapkan secara formal, telah muncul suatu sistem pasar informal yang didasarkan atas apa yang dianggap hak penjaga pintu, dokter, montir, dan lain-lain. Mereka semua menguasai suatu dimensi pemakaian sumber-sumber daya tertentu yang menentukan kesempatan-kesempatan transaksi.

bahwa pengertian itu hanya mempunyai sedikit relevansi empiris. Erosi hak-hak perorangan atas sumber-sumber daya dan penggunaannya biasanya disertai, sebagai fakta pengalaman, dengan digantikannya pasar dan harga-harga yang ditentukan pasar dengan suatu mekanisme alokasi politik-administratif. Pengekangan hak-hak perorangan ini, menurut literatur dan retorika sosialis, merupakan suatu kondisi yang perlu bagi transisi dari "pra-sejarah ke sejarah manusia" — suatu kondisi yang perlu untuk menjamin martabat manusia dan suatu "tingkat mutu hidup yang berarti".

Pandangan ini memasuki diskusi pada konperensi-konperensi PBB mengenai banyak isu seperti penduduk, pangan, polusi atau kejahatan. Hal itu juga terungkap dengan jelas dalam dokumen-dokumen yang dikeluarkan UNCTAD, UNIDO atau Majelis Umum mengenai TEIB yang harus dibentuk. Tantangan yang dihadapi AS harus diakui sepenuhnya dan diterima. Kita hendaknya juga menerima tanpa ragu-ragu kriteria yang diajukan untuk menilai suatu organisasi sosial, yaitu kriteria yang dirumuskan dalam istilah-istilah "martabat manusia dan mutu hidup". Biarpun kabur, sedikit ambivalen dan memerlukan uraian lebih lanjut bagi analisa yang memadai, istilah-istilah ini bukanlah maksud diskusi sekarang ini. Di sini cukup kiranya menandakan setegas-tegasnya bahwa perjuangan kapitalisme tidak boleh takut akan ukuran-ukuran itu. Sebaliknya, dirumuskan secara jelas, ukuran-ukuran itu harus diterima sepenuhnya sebagai ukuran penilaian kita yang relevan.

Dalam hubungan ini sungguh-sungguh ada suatu isu moral dalam memilih antara organisasi-organisasi sosial, dan adalah suatu kewajiban untuk mengetahui guna mengulas dengan sarana-sarana yang bisa diandalkan *perbandingan* berfungsinya berbagai struktur institusional. Analisa ini meliputi pola manusiawi yang dibina oleh berbagai pengaturan, sikap-sikap yang diperkuat lagi dan nilai-nilai yang diijinkan. Justru dalam istilah-istilah ini pembelaan kapitalisme harus dan dapat dilakukan. Tetapi sejauh ini kita mempunyai sedikit bukti bahwa wakil-wakil AS pada organisasi-organisasi dan konperensi-konperensi internasional mengerti hakikat tantangannya atau menganggap

berguna untuk menyesuaikan konfrontasi itu dalam percaturan politik mereka yang lazim. Kelalaian mereka pada hemat kami tidaklah sama sekali tidak merugikan bagi kepentingan-kepentingan jangka panjang kita. Serangan terhadap sistem sosial kita adalah suatu fakta yang persisten dan pervasif seperti terungkap dalam kata-kata dan kalimat-kalimat yang dimasukkan dalam dokumen-dokumen PBB.

III

Suatu tema yang dominan dan mendasar yang dinyatakan oleh banyak rumusan yang dijumpai dalam retorika Dunia Ketiga berkisar pada ide Marxis Leninis "pemerasan". Perluasan gagasan asli Marx oleh Lenin ke hubungan-hubungan internasional menerangkan adanya perbedaan kekayaan antara bangsa-bangsa industri Barat dan Dunia Ketiga dengan istilah-istilah sejarah kolonial, atau lebih umum, dengan istilah-istilah bentuk-bentuk paksaan politik yang halus dan pervasif. Pemerasan Barat membuat miskin Dunia Ketiga dan memperkaya bangsa-bangsa Barat. Cerita itu secara mengesankan dapat diterima dan telah sangat mempengaruhi sikap-sikap umum di luar anggota-anggota setia cabang Leninis dari kaum Marxis. Orang sering menjumpai pernyataan bahwa koloni-koloni dan wilayah-wilayah yang dijajah mengalami stagnasi dalam kemiskinan, sedangkan kemajuan hanya terjadi sesudah kemerdekaan. Kuliah Nobel Myrdal memaparkan tema ini, dan retorika resolusi-resolusi PBB tersebut di atas jelas mengungkapkan pandangan itu.

"Dekolonisasi" digambarkan sebagai suatu kondisi yang perlu dan primer bagi kemajuan ekonomi. Kemajuan itu rupanya tidak mungkin dicapai di bawah rezim kolonial. Akan tetapi juga nampak bahwa penghapusan kolonialisme tidak cukup. Doktrin sosialis mengklaim bahwa pemerasan berlangsung terus dalam bentuk baru, yang dicakup dalam istilah "neokolonialisme". Neokolonialisme muncul bilamana terjadi transaksi swasta antara bangsa-bangsa "maju" dan "berkembang". Khususnya bilamana perusahaan-perusahaan swasta melakukan bisnis di negara-negara berkembang. Dalam arti tertentu label itu diberikan kepada setiap transaksi yang terjadi dengan harapan

quid pro quo. Penghapusan neokolonialisme pada hakikatnya jadi mencakup penyaluran kekayaan ke Dunia Ketiga yang diinginkan — suatu arus nyata tanpa *quid* untuk *quo*-nya.

Orang akan mudah mengakui adanya unsur rasional dalam gagasan-gagasan itu. Gagasan-gagasan itu memberi peluang untuk membenarkan penyedotan kekayaan. Juga memberikan kepada kaum elite dan birokrasi yang mapan di Dunia Ketiga kesempatan untuk memperkaya diri.¹ Kesempatan-kesempatan itu untuk sebagian disebabkan oleh tanggapan-tanggapan bengong yang dijumpai di kalangan intelegensia Amerika Serikat. Tema dasar itu juga membenarkan klaim akan "ganti rugi" yang diajukan kepada negara-negara maju sebagai kompensasi bagi "kerugian-kerugian jelas" yang disebabkan kolonialisme dan neokolonialisme. Definisi elastis "neokolonialisme dalam segala bentuknya" dan tuntutan akan ganti rugi yang terdapat dalam resolusi-resolusi PBB membatasi suatu undangan terbuka dengan insentif pervasif untuk menggunakan fasilitas-fasilitas PBB yang semakin luas bagi suatu arus program aksi tanpa akhir yang menimbulkan tekanan-tekanan politik atas pemerintah-pemerintah Barat. Tuntutan yang persisten itu juga memelihara perhatian media dan perumus-perumus profesional Barat.

Prospek konfrontasi berlarut-larut itu mengisyaratkan bahwa retorika sosialis dengan tuntutan-tuntutan yang kelihatan penting itu tidak boleh dianggap sepi dengan cara yang dikembangkan oleh wakil-wakil AS pada kejadian-kejadian di PBB. Rupanya adalah penting bahwa klaim-klaim dan retorika yang menyertainya disanggah dengan tegas dan secara eksplisit. Kadang-kadang orang bertanya-tanya apakah wakil-wakil Barat cukup sadar akan perjuangan dubius di bawah retorika itu. Catatan-catatan tertentu tentang kelemahan yang inherent pada klaim sosialis rupanya wajar dalam konteks ini.

Pertama kita harus mencatat bahwa "pemerasan" menurut pembatasan doktrin sosialis terjadi bilamana sumber-sumber

1 Pembaca mungkin ingin menunjuk pada penelitian Omotunde Johnson mengenai "The Economics of Corrupt Government", *Kyklos*, 28 (1975), nomor 1

daya (sarana-sarana produksi) dimiliki swasta. Luasnya pemerasan itu dapat diukur dengan bagian pendapatan nasional yang ditelan oleh pemilikan sumber-sumber daya. Jadi segala transaksi yang terjadi di bawah pengaturan kapitalis sudah barang tentu memeras. Adalah penting untuk mengakui bahwa bahasa ini memiliki maksud motivasi yang membimbing tindakan-tindakan moral politik. Dia digunakan untuk mengemukakan bahwa penghapusan "pemilikan sarana-sarana produksi oleh swasta" membebaskan massa pekerja dan umumnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun martabat manusia. Akan tetapi cerita Marxis, biarpun plausibel seperti banyak dongeng lain, justru gagal dalam keutamaan-keutamaan yang paling dipuji. Penulis-penulis Marxis menekankan pengertian yang unggul mengenai hubungan-hubungan sosial penting yang diringkas dalam Produktionsverhältnisse, yaitu hubungan antar manusia yang ditentukan oleh hubungan manusia dengan sumber-sumber daya produksi. Tetapi keterangan Marxis itu sama sekali melupakan struktur hak-hak penting yang membentuk proses politik, sosial dan ekonomi, dan oleh sebab itu gagal memberikan suatu keterangan sistematis bagi kejadian-kejadian politik ekonomi atau proses-proses di bawah sosialisme.

Bukan suatu kebetulan bahwa tulisan-tulisan dan retorika sosialis tentang negara sosialis hanya sedikit melintasi suatu uraian yang pada pokoknya metaforis atau metafisis bercampur dengan sedikit pendekatan Nirvana. Juga bukan kebetulan bahwa literatur Marxis, dan lebih umum sosialis, mengembangkan suatu "kesalahan Karamasov". Orang mencatat contoh-contoh ketidakadilan, frustrasi atau tiadanya kebahagiaan yang diajukan sebagai bukti menentang kapitalisme. Orang juga mencatat bahwa di suatu negara sosialis kelompok-kelompok penduduk tertentu menikmati perumahan yang lebih baik daripada sebelum "pembebasan sosialis". Ini digunakan secara sugestif untuk mengatakan bahwa seluruh pola umumnya menjadi lebih baik. Komentar-komentar dan observasi-observasi serupa itu merupakan suatu siasat yang berguna dalam suatu perjuangan politik, tetapi sedikit memberikan informasi berupa penilaian sistematis tentang alternatif-alternatif pengaturan institusional dan organisasi-organisasi ekonomi. Penilaian serupa itu

tidak mungkin di bawah suatu konsepsi Marxis atau sosialis. Doktrinnya tidak memberikan sarana intelektual dan persepsi analitis mengenai berfungsinya lembaga-lembaga sosialis maupun pengertian tentang insentif-insentif yang muncul di bawah lembaga-lembaga itu dan hakikat proses sosial yang diakibatkannya. Oleh sebab itu dia biasanya gagal memberikan suatu tafsir yang relevan atas masalah-masalah yang secara tipis muncul di bawah organisasi-organisasi sosialis. Krisis pertanian yang permanen di US merupakan suatu contoh baik situasi umum itu.

Usaha-usaha filsuf-filsuf Marxis untuk bergulat secara serius dan jujur dengan operasi institusional dan pola tingkah laku yang ditentukan di bawah rezim-rezim sosialis mengungkapkan secara terperinci kelemahan-kelemahan sosiologi Marxis. Model sosiologis manusia yang digunakan dalam literatur itu menyembunyikan kenyataan dan mencegah akses intelektual ke jawaban-jawaban manusia atas insentif-insentif yang inherent pada pengaturan-pengaturan institusional yang berbeda-beda. Tidaklah mungkin menerangkan sistem pembayaran-pembayaran sambilan atau ekstra dan transaksi-transaksi "tidak resmi atau swasta" yang terjadi di bawah lembaga-lembaga sosialis, pola korupsi akibat pengaturan-pengaturan ini, struktur kekuasaan atau hakikat kompetisi politik, dan masalah-masalah serupa.¹

IV

Suatu sikap atau komitmen semi-religius yang sering menggantikan analisa dan bukti yang dibutuhkan tidak banyak menolong suatu penilaian yang bermanfaat dan rasional tentang alternatif-alternatif sistem sosial. Tetapi penilaian yang luas

¹ Suatu pembahasan model sosiologis ini dapat diketemukan dalam sebuah prasaran yang disiapkan oleh William Meekling untuk Seminar Interlaken Internasional Kedua tentang Analisa dan Ideologi, yang diadakan Juni 1975. Prasaran itu diterbitkan tahun 1976 oleh *Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik*. Suatu sidang pleno Seminar Interlaken Internasional Ketiga tentang Analisa dan Ideologi akan menjajaki persoalan itu lebih lanjut dengan prasaran-prasaran yang disampaikan oleh Gerard Gafgen-Hans Georg Monissen bersama-sama dan oleh Willi Meyer. Di antara tulisan-tulisan serius yang diterbitkan oleh filsuf-filsuf Marxis adalah yang diterbitkan oleh kelompok di Universitas Beograd, khususnya Stojanovich.

serupa itu menentukan argumen pokok kapitalisme. Ini bukan suatu pembelaan yang berdasarkan keadilan, kebahagiaan, kebebasan dan sebagainya yang dijamin dan seragam; dia lebih menekankan keadaan bahwa suatu sistem yang didasarkan atas hak-hak perorangan yang luas secara lebih efektif meniadakan kekuasaan sewenang-wenang daripada alternatif organisasi sosial mana pun. Sekalipun "keadilan, kebebasan dan persamaan" tidak dijamin, semuanya itu memberikan lebih banyak kesempatan dan kesempatan-kesempatan yang lebih persisten bagi keadilan dengan biaya lebih kecil (daripada nilai-nilai manusia yang direbut atau dikorbankan). Dia juga memberikan lebih banyak alternatif dengan harga lebih ringan daripada pengaturan-pengaturan institusional yang dipaksakan oleh rezim sosialis. Khususnya lebih banyak alternatif untuk pekerjaan dan untuk menyatakan bermacam-macam gaya hidup merongrong pola-pola perbudakan dan penjajahan.

"Lembaga-lembaga terbuka" kapitalisme tidak menjamin "persamaan", tetapi mengendorkan lebih banyak warisan perbedaan-perbedaan yang mapan daripada "lembaga-lembaga tertutup", masyarakat-masyarakat sosialis yang dibenarkan dengan suatu retorika sama rata. Lagi pula biaya perbedaan pendapat — diungkapkan dalam kesempatan-kesempatan yang dikorbankan oleh perbedaan pendapat politik, intelektual, moral atau artistik — pasti positif dalam setiap sistem sosial yang pernah diwujudkan atau akan diwujudkan. Keadaan ini sering mendukung suatu kebutaan khusus yang diungkapkan dengan dalil-dalil absolutis bahwa kebebasan atau kemerdekaan juga tidak terdapat di kebanyakan sistem sosial. Besarnya secara sistematis dikaitkan dengan pola struktur hak-hak yang berlaku, dan biasa berbeda dengan luas, isi dan terandalkannya hak-hak milik swasta. Suatu erosi persisten hak-hak itu akhirnya meningkatkan biaya perbedaan pendapat dan tingkah laku nonkonformis dalam politik, moral, literatur dan kesenian.

Akhirnya, kesempatan-kesempatan yang lebih besar dan lebih banyak alternatif yang tersedia dengan harga lebih ringan bagi rata-rata orang di bawah sistem hak-hak milik perorangan menjamin perlindungan martabat manusia yang lebih baik daripada yang dapat diharapkan di bawah suatu aparat yang esensial politik-administratif. Bahwa kaum birokrat dan elite intelektual

yang mapan di Dunia Ketiga lebih menyukai pengaturan-pengaturan sosialis kiranya mudah dimengerti karena serangan terhadap hak-hak milik perorangan dan penggantian pasar dengan lembaga-lembaga politik administratif, meningkatkan kekuasaan birokrasi maupun elite. Secara luas mengandalkan pasar merongrong kekuasaan serupa itu dan mengurangi kesempatan untuk memindahkan kekayaan dan menjadi kaya lewat kegiatan-kegiatan politik. Beberapa anggota elite dan birokrasi mengakui adanya potensi bagi imbalan-imbalan luas — secara yang merugikan warga negara biasa — di bawah pengaturan sosialis.

Suatu retorika yang sesuai dan sangat jelas menyembunyikan pemindahan kekayaan intern ke tangan elite dan birokrat yang mapan. Dia juga merupakan alat penting dalam ofensif intelektual untuk pemindahan kekayaan internasional. Dalam keadaan ini adalah vital untuk memahami secara saksama prestasi manusia organisasi sosial yang diberi merek (label) "kapitalisme". Sudah barang tentu kita menemukan kantong-kantong penindasan dan ketidakadilan dalam perekonomian-perekonomian kapitalis. Inteligencia dunia tak henti-hentinya menekankan kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Chili, Yunani di bawah junta militer, Rhodesia, Afrika Selatan, Spanyol dan mungkin juga Brazil. Orang memang dapat melihat penindasan di negara-negara itu, dan biaya perbedaan pendapat rupanya lebih tinggi daripada di negara lain di Eropa Barat atau AS. Tetapi retorika histeris inteligensia dunia jelas membuang rasa proporsi dalam menilai situasi manusia. Biaya tingkah laku nonkonformis di negara-negara itu jauh di bawah tingkat yang terdapat di negara-negara yang menerima dogma Marxis atau di banyak negara sosialis yang mengaku anggota Dunia Ketiga.

Observasi ini tidak membenarkan sikap puas dengan lembaga-lembaga kita atau penerimaan pola-pola sosial di negara-negara tersebut, tetapi perlu ditekankan. Dia memperingatkan kita bahwa lebih banyak hak milik perorangan tidak cukup untuk membuang paksaan dari pembatasan-pembatasan politik atas kegiatan-kegiatan perorangan. Namun negara-negara itu juga menyajikan uraian-uraian tema kita yang berguna. Pertama, di negara-negara itu suatu bidang penting hidup sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan ekonomi

tetap bebas dari paksaan dan gangguan terperinci. Diskusi-diskusi politik dalam kelompok-kelompok kecil atau privat sangat mungkin dengan sedikit risiko dan harga. Bahkan terdapat diskusi umum segi-segi sosial atau politik yang bukan tidak penting. Lagi pula — dan ini adalah sangat penting — tetap adanya banyak hak swasta yang dapat diandalkan mengurangi atau memperkecil kemungkinan sistem politik yang membatasi untuk bertahan. Hak-hak milik yang pervasif mencegah terjadinya "pelembagaan" sistem politik dan secara demikian meningkatkan kemungkinan transisi ke suatu organisasi politik sosial dengan lebih banyak kebebasan, yaitu mengandung biaya lebih ringan bagi tingkah laku nonkonformis.

Kita mencatat beberapa diskusi serius dan harapan-harapan baik mengenai munculnya Spanyol dari bentuk-bentuk membantu diktatur Falangis. Perkembangan-perkembangan serupa di Chili dan Brazil juga sangat mungkin. Adakah orang yang secara serius mengemukakan bahwa sesudah Tito meninggal Yugoslavia akan membuka lembaga-lembaganya, atau bahwa US akan mengizinkan "beribu-ribu bunga mekar" sesudah Brezhnev meninggal? Jawaban adalah jelas, dan perbedaan dalam kesempatan-kesempatan dan prospek berakar pada pola hak-hak yang berlaku. Kita akhirnya disadarkan bahwa suatu *Gulag Archipelago* secara tipis muncul di bawah suatu rezim sosialis dan dengan itu berkembang penggunaan teror sewenang-wenang secara sistematis untuk memaksa warga-warga negara ke dalam suatu pola konformitas.¹

¹ Suatu ulasan singkat kiranya perlu ditambahkan sehubungan dengan Rhodesia-Zimbabwe dan Afrika Selatan. Bahwa apartheid mengandung pemindahan kekayaan kepada penduduk kulit putih dengan jelas diakui oleh serikat-serikat buruh Afrika Selatan pada 1920-an. Pada waktu itu pasar beroperasi menuju integrasi berangsur-angsur, dan hal ini khususnya terjadi di "pasar perkawinan". Tetapi pengakuan bahwa suatu pemindahan kekayaan intern adalah inheren dalam apartheid tidak boleh membuat kita lupa bahwa kesejahteraan ekonomi rakyat kulit hitam di Afrika Selatan rata-rata adalah lebih tinggi daripada tingkat yang dicapai di negara Afrika mana pun. Orang juga harus mencatat pernyataan menarik yang dikeluarkan di Mozambik oleh salah satu pemimpin kulit hitam Rhodesia-Zimbabwe. Sambil menegaskan bahwa di Zimbabwe akan dibentuk suatu rezim sosialis yang ketat, dia memperingatkan bahwa tiada tempat bagi politisi kulit hitam yang bersaing yang ideologi sosialisnya dicurigai. Suatu perbandingan pola-pola menda tang di Mozambik, Zimbabwe dan Angola dengan pola-pola kehidupan yang mungkin di "Rhodesia kulit putih yang menindas" atau apartheid Afrika Selatan pasti menarik.

Rupanya adalah penting untuk menandakan bahwa pola-pola perbudakan dan penjajahan yang dikembangkan oleh mekanisme politik administratif yang luas mengurangi akses ke alternatif-alternatif di banyak bidang kehidupan. Suatu trend menuju munculnya mekanisme serupa itu adalah implisit dalam program Myrdal. Pendapat otoriterinya jelas terungkap dalam konsepsi khususnya tentang "rasionalitas" — artinya penilaian-nya dan penilaian kelompok teman-temannya harus menang. Konsumen rata-rata "harus diberi tahu apakah yang baik baginya". Myrdal secara efektif menjadi model perumus profesional yang gagal mengetahui bahwa kebanyakan orang mempunyai gagasan pasti tentang mutu hidup mereka. Banyak orang lebih suka dengan kebiasaan-kebiasaan konsumsi yang memperpendek hidup daripada dengan kemungkinan mengalami usia tua yang tidak berguna. Banyak orang lebih suka main ski, naik gunung, balap mobil atau terbang daripada dengan suatu eksistensi yang aman dan berat "rasional". Myrdal memusatkan perhatiannya atas suatu isu sentral jaman kita dengan mengajukan klaim sombong "pemimpin-pemimpin intelektual dan moral" untuk menguasai nasib masyarakat-masyarakat kita. Usul-usul untuk membentuk suatu aparat administratif yang menyeluruh secara logis berpangkal pada klaim ini dan pada pandangan pendukung bahwa kebanyakan orang adalah tidak tahu dan tidak mampu menangani kepentingan-kepentingan mereka sendiri.

V

Dalam konteks ini "tema kolonial" yang dikembangkan dengan semangat begitu besar oleh Dunia Ketiga perlu mendapat perhatian khusus kita. Dia menentukan semangat moral dan memberikan suatu pembenaran kepada klaim akan suatu TEIB, tetapi retorika pemerasan "kolonial" atau "neokolonial" oleh bangsa-bangsa industri Barat adalah suatu dongeng yang dibuktikan kepalsuannya oleh kejadian-kejadian sejarah. Menurut dalil pemerasan yang baku, kemiskinan dan stagnasi ekonomi akan meningkat sejalan dengan ramainya transaksi dengan ekonomi-ekonomi kapitalis. Namun kita mengamati secara sistematis kebalikannya. Selama 100 tahun terakhir kawasan-kawas-

an dengan paling sedikit perdagangan, paling sedikit pengaruh kapitalisme dan hanya dengan transaksi-transaksi marginal dengan bangsa-bangsa Barat tetap tinggal kawasan-kawasan yang paling miskin dan macet (misalnya Ethiopia dan Afghanistan). Hampir tanpa kekecualian koloni-koloni mengalami banyak kemajuan dalam kedudukan kolonial dan mengambil untung dari suatu arus sumber-sumber daya yang nyata dari negara-negara industri. Perkembangan dramatis penduduk, perbaikan harapan hidup, munculnya pengangkutan umum dan kota-kota modern adalah akibat hubungan ekonomi dengan Barat. Investasi-investasi Barat menaikkan pendapatan nyata di atas tingkat yang akan dicapai tanpa investasi itu.

Lukisan ini berlaku tak peduli repatriasi keuntungan tertentu dari investasi-investasi itu. Demikian pun penggunaan sumber-sumber daya yang tak habisnya ikut meningkatkan pendapatan nyata, paling tidak pada waktunya. Dan dengan investasi tabungan yang berasal dari tingkat pendapatan yang meningkat pendapatan nyata dapat terus menerus ditingkatkan. Soal ini dapat dirumuskan secara efektif dalam kata-kata Peter Bauer, yang telah mempelajari masalah-masalah yang dihadapi ekonomi-ekonomi berkembang selama bertahun-tahun. Khususnya mengenai Afrika dia berkata:

"Semua dasar dan komponen kehidupan ekonomi dan sosial modern yang ada di sini dewasa ini dibawa oleh orang-orang Barat, hampir seluruhnya dalam era penjajahan. Hal itu meliputi dasar-dasar seperti keamanan umum dan hukum serta tertib; lalu lintas beroda (Afrika di sebelah selatan Sahara tidak pernah menemukan roda); pengangkutan mekanis (pengangkutan dengan uap atau bensin sebagai ganti otot — hampir seluruhnya otot manusia di Afrika Hitam); jalan-jalan, jalan-jalan kereta api, dan pelabuhan-pelabuhan buatan manusia; bentuk-bentuk baru uang (ganti barter atau uang komoditi seperti kece-kece, lempengan besi atau botol jenever); aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan ekonomi; kota-kota dengan gedung-gedung besar, air dan jaringan got; kesehatan masyarakat dan rumah-rumah sakit, dan pengendalian penyakit-penyakit endemi dan epidemi; dan pendidikan formal.

Pendeknya, selama seratus tahun yang lalu, kontak dengan Barat telah mengubah bagian-bagian luas Dunia Ketiga menuju perbaikan. Asia Tenggara dan Afrika Barat merupakan suatu contoh dengan dokumentasi yang baik. Misalnya pada 1890-an Malaya adalah suatu daerah kampung-kampung dan desa-desa nelayan yang sedikit penduduknya. Sekitar 1930 dia telah menjadi suatu negara dengan kota-kota yang padat, perdagangan ramai dan suatu sistem jalan-jalan yang hebat, terutama berkat industri karet yang didatangkan dan dikembangkan oleh orang-orang Inggeris. Contoh lain, sebelum 1890-an tiada produksi kakao di negara yang kini adalah Ghana dan Nigeria,

ataupun ekspor kacang atau kapas, dan hanya sedikit ekspor minyak kelapa dan kopra. Barang-barang itu kini adalah komoditi perdagangan dunia, semuanya hasil orang-orang Afrika, tetapi mula-mula dimungkinkan oleh orang-orang Eropa. Impor barang-barang modal maupun konsumsi massa yang dimaksud untuk konsumsi rakyat Afrika, juga meningkat dari jumlah kecil menjelang akhir abad ke-19 menjadi volume luar biasa pada 1950-an. Perubahan-perubahan dengan akibat-akibat jangka jauh ini terungkap dalam statistik-statistik pendapatan pemerintah, kaum melek huruf, jumlah murid, kesehatan umum, kematian kanak-kanak dan banyak indikator lain seperti pemilikan mobil dan barang-barang konsumsi yang awet.”¹

Kita simpulkan bahwa tidak banyak kebenaran terdapat dalam gagasan yang banyak disiarkan bahwa negara-negara Barat melakukan pemindahan kekayaan dari koloni-koloni ke perekonomian-perekonomian mereka, suatu pemindahan yang membuat miskin koloni-koloni dan membuat kaya negara-negara induk. Kemajuan ekonomi perekonomian-perekonomian kapitalis yang mengesankan selama 150 tahun terakhir rupanya menopang dalil pemerasan, tetapi hanya kalau orang melupakan perkembangan yang sejalan di koloni-koloni. Ketika pendapatan nyata per kapita terus meningkat biarpun teori Marxis meramalkan kebalikannya, kemajuan ekonomi itu juga menguntungkan koloni-koloni. Bagaimanapun juga, semua indikator relevan menunjukkan suatu kenaikan dalam kesejahteraan ekonomi bagi negara-negara itu. Berlawanan dengan sementara pendapat rakyat, perdagangan saling menguntungkan. Lagi pula, dekolonisasi sering mengakibatkan stagnasi ekonomi dan bahkan kemerosotan ekonomi. Kawasan di sebelah Selatan Sahara, Sri Lanka, Birma, Uganda, Bangladesh dan Pakistan merupakan contoh-contoh baik. Negara-negara lain mungkin nasibnya lebih baik, tetapi bahkan negara-negara itu seperti Aljazair atau India menunjukkan sedikit kemajuan dibandingkan dengan perkembangan ekonomi mereka tahun-tahun sebelumnya, sedangkan suatu koloni seperti Hongkong terus berkembang.

Pola-pola yang berlainan itu mengungkapkan bahwa status kolonial dan dekolonisasi tidak relevan bagi kemajuan ekonomi. Sebagai gantinya, kemajuan serupa itu sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan dan lembaga-lembaga yang di-

¹ Peter Bauer, "Western Guilt and Third World Poverty", dalam *Commentary*, Januari 1976

kembangkan. Stagnasi yang menyusul dekolonisasi di banyak kasus adalah akibat suatu pergeseran penting menuju "program-program dan lembaga-lembaga sosialis", atau cepat meningkatnya ketidakstabilan politik atau ketidakpastian mengenai "aturan-peraturan permainan sosial".

Suatu gagasan yang jelas disenangi dalam resolusi-resolusi PBB menunjuk pada hak yang harus dimiliki oleh negara anggota atas "kedaulatan atas sumber-sumber dayanya" agar dihormati oleh negara-negara lain. Orang dapat menanggapi dengan mengangkat bahu dan mudah menyetujui artinya yang jelas. Tetapi kalimat itu memuat suatu arti khusus yang secara halus digabungkan dengan dalil pemerasan. "Kedaulatan atas sumber-sumber" dilaksanakan lewat nasionalisasi dan pemilikan yang sesuai oleh pemerintah. Lagi pula, "penentuan nasib ekonomi sendiri" dilaksanakan lewat suatu sistem kontrol politik-administratif atas besarnya dan alokasi sumber-sumber daya (manusia dan alam). Retorika yang dibina resolusi-resolusi PBB dengan demikian menunjuk pada pemusatan hak untuk menggunakan sumber-sumber itu pada oligarki yang berkuasa, perumus-perumus dan birokrasinya. "Kedaulatan" dan "penentuan" mengandung pembentukan suatu perekonomian sosialis dengan pengurangan hak-hak milik swasta dan suatu mekanisme politik-administratif yang menggantikan pasar atas suatu ruang kegiatan yang luas. Usaha mendapatkan "kedaulatan atas sumber-sumber daya" dan "penentuan aktif nasib ekonomi bangsa" menempatkan mayoritas besar penduduk di bawah intrik politik oligarki berkuasa yang menggunakan sarana-sarana itu untuk mengukuhkan kedudukan politik mereka dan memperkaya pengikut-pengikut dan langganan-langganan mereka.

Namun gagasan itu menarik bagi kalangan-kalangan luas yang sulit mengerti bahwa suatu perekonomian berkembang tidak dapat memajukan kesejahteraannya lebih baik daripada membiarkan orang-orang asing membeli sumber-sumber daya alamnya dan secara demikian melibatkan kepentingan-kepentingan aktif mereka dalam pembangunan ekonomi. Apakah arus modal asing itu pasti menghasilkan pengaruh dan dominasi

politik banyak bergantung pada lembaga-lembaga yang berlaku. Firma-firma bisnis asing akan menanamkan modal untuk mendapatkan pengaruh politik dan manipulasi hanya sejauh investasi-investasi itu bisa memberikan keuntungan. "Kerapatan relatif" pemerintah dalam masyarakat adalah suatu faktor penting. Di hadapan suatu sektor pemerintah yang relatif kecil dan kekuasaan-kekuasaan untuk mengatur yang moderat, investasi dalam manipulasi-manipulasi politik hanya sedikit menguntungkan dan tetap pada skala kecil atau bahkan lenyap. Masalah politik yang timbul akibat firma-firma bisnis asing yang beroperasi di suatu negara berkembang terutama bersumber pada pengaruh birokrasi dan pejabat-pejabat pemerintah yang mapan dan pervasif. Dia meningkat dengan trend sosialis dalam politik dan lembaga-lembaga, dan menjadi suatu "penyakit endemi" lembaga-lembaga itu karena operator-operator mekanisme administrasi pemerintah merasa menguntungkan untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ditentukan oleh posisi mereka. Namun transaksi-transaksi (tak halal) serupa itu rupanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi di atas tingkat yang dapat dicapai dalam konteks "kedaulatan atas sumber-sumber daya" yang kaku dan "penentuan nasib ekonomi" yang militan.

Tema pemerasan juga menimbulkan isu yang diajukan tentang terms of trade. Kadang-kadang dikemukakan bahwa bangsa-bangsa industri Barat memanipulasi terms of trade demi keuntungan mereka dan membuat miskin Dunia Ketiga yang menghasilkan bahan mentah. Tetapi terms of trade produsen-produsen barang-barang primer, menurut Sir Arthur Lewis, adalah lebih baik pada 1950-an daripada selama 80 tahun sebelumnya dan bahkan menjadi semakin baik pada 1960-an. Gambaran keseluruhan meliputi berbagai pengalaman di berbagai bagian kawasan berkembang. Lagi pula, manipulasi sengaja terms of trade oleh bangsa-bangsa industri demi keuntungan mereka akan menuntut tarif ekspor yang meningkat atas barang-barang jadi bersama-sama dengan naiknya tarif impor bahan mentah dan baku. Namun kita tidak menemukan pola serupa itu. Dalam kenyataan AS, Australia dan Kanada adalah pensuplai utama sementara komoditi primer di pasaran dunia. Dalam

keadaan itu "manipulasi terms of trade" harus ditolak sebagai suatu isapan jempol yang berguna secara politik. Komentar Bauer dalam hubungan ini juga pantas dicatat:

"Bila perubahan-perubahan dalam biaya produksi, perbaikan penting dalam lingkup dan mutu impor, dan peningkatan luar biasa dan volume perdagangan diperhitungkan, daya beli ekstern dan ekspor Dunia Ketiga sebagai keseluruhan kini adalah sangat baik, mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Pada gilirannya hal itu mempermudah pemerintah-pemerintah untuk menahan bagian yang lebih besar dari pendapatan ekspor lewat peningkatan penting dalam tarif royalti, pajak ekspor dan pajak perusahaan."¹

VI

Sengketa mengenai dasar-dasar organisasi sosial dan ekonomi tidak dapat disingkirkan dengan kalimat-kalimat salah. Kita mungkin lebih suka dengan ketenangan, kejernihan dan kesunyian tanpa gangguan jauh dari keterlibatan kontroversial, tetapi isu itu menyentuh kehidupan dan prospek masyarakat kita. Bagaimanakah seharusnya posisi AS dalam persoalan-persoalan itu? Sudah barang tentu sangat baik bagi Washington untuk meninjau kembali trend yang muncul pada tahun-tahun terakhir di berbagai organisasi PBB. Kita hendaknya secara serius mempersoalkan kebijaksanaan untuk mengikuti trend itu dengan reservasi-reservasi bisu. Tapi manakah alternatif yang mungkin bagi suatu akomodasi yang kurang dipikirkan? Suatu alternatif program aksi yang mengungkapkan kepentingan-kepentingan jangka panjang AS, pada hemat kami, meliputi lima komponen penting berikut:

Perekonomian AS merupakan pusat vital perekonomian dunia, dan akibat-akibat politik dalam negeri AS terasa di seluruh dunia. Ketidakstabilan finansial AS secara substansial ikut mengakibatkan inflasi dunia pada tahun-tahun terakhir 1960-an dan pada awal 1970-an. Kebijakan-kebijaksanaan finansial yang ditempuh di AS juga menentukan rusaknya sistem yang ditetapkan di Breton Woods dan akhirnya — diperkuat oleh pemindahan kekayaan masif yang dilancarkan OPEC —

¹ *Ibid.*

menghasilkan "stagflasi" yang terlihat dalam perekonomian negara-negara Barat. Penyelewengan-penyelewengan dan ketidakpastian ekonomi serupa itu menuntut biaya penyesuaian yang berat dari banyak negara. Oleh sebab itu pemulihan atau penyelamatan kestabilan finansial merupakan kewajiban pertama yang harus diterima oleh penyusun-penyusun politik AS. Hal ini berarti bahwa Washington harus mengembangkan serangkaian kebijaksanaan dan lembaga yang menjamin suatu pertumbuhan moneter yang mantap pada tingkat noninflasioner, dan suatu anggaran terkontrol dengan paling banyak suatu defisit kecil. Usaha memulihkan suatu pola kestabilan finansial yang dapat diandalkan akan menuntut suatu usaha politik penting dan suatu penyimpangan substansial dari trend-trend yang baru dan berlaku sekarang ini.

Komponen-komponen kedua dan ketiga program positif hendaknya diarahkan untuk membuka perekonomian kita secara substansial. Semua hambatan perdagangan harus disingkirkan atau dikurangi secara drastis. Kuota impor segala jenis dan hambatan impor harus dihapus secara sistematis — termasuk pengurangan dan penghapusan tarif-tarif. Penghapusan hambatan-hambatan perdagangan akan memberikan peluang kepada negara-negara lain untuk menjual hasil-hasil mereka dan mendapatkan sarana untuk membiayai suatu lingkup impor yang meningkat dan membantu memperluas tingkat pendapatan nyata mereka. Kebijakan-kebijaksanaan itu juga akan ikut memungkinkan penggunaan sumber-sumber daya perekonomian AS yang lebih efisien dan lambat laun akan menguntungkan rakyat AS. Lagi pula, penghapusan perdagangan secara sistematis harus dilengkapi penghapusan hambatan-hambatan investasi swasta di luar negeri atau hambatan terhadap pinjaman-pinjaman swasta kepada bisnis dan penduduk asing. Arus modal akan bergantung sebagian besar pada kondisi di negara-negara asing dan khususnya pada prediktabilitas dan stabilitas aturan-aturan permainan yang berlaku bagi bisnis dan investor asing. Dengan demikian kebijakan-kebijaksanaan dan lembaga-lembaga Dunia Ketiga akan merupakan suatu penentu penting bagi arus modal dan sumbangan oleh perekonomian-perekonomian industrial bagi laju pertumbuhan.

Mengenai komponen keempat program, adalah perlu bahwa AS merumuskan suatu konsepsi koheren tentang kondisi-kondisi yang relevan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang meningkat. Pertumbuhan yang tidak pasti dan "stagnasi kemiskinan" bukanlah akibat sejarah kolonial atau akibat "neokolonialisme dalam segala bentuknya". Dalam periode sesudah Perang Dunia II kebanyakan negara berkembang melaksanakan politik dan suatu pola pranata-pranata yang secara sistematis menghambat dan memperlambat perkembangan ekonomi. Di semakin banyak negara kenyataan ekonomi dikorbankan demi tuntutan-tuntutan ideologi yang meningkat. Wakil-wakil Pemerintah AS harus belajar membela alternatif-alternatif program dan politik yang akan menyingkirkan belenggu-belenggu yang mengikat perekonomian-perekonomian berkembang. Program-program dan saran-saran itu harus dirumuskan dengan pengakuan penuh bahwa anggota-anggota Dunia Ketiga mempunyai hak untuk bergerak menurut keyakinan mereka. Tetapi apabila mereka tetap menekankan politik dan pranata-pranata yang menghambat perkembangan mereka dan menurunkan kesejahteraan mereka, tiada kewajiban moral pada bangsa-bangsa Barat untuk menyelamatkan mereka dengan injeksi sumber-sumber daya secara masif. Kegagalan bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah menunjukkan bahwa bantuan itu tidak efisien dan suatu pemborosan.¹ Segala bantuan harus diganti dengan transaksi-transaksi sukarela yang diadakan di pasar-pasar modal dan kredit yang terbuka.²

- 1 Lihat prasaran Peter Bauer, "Politicization of Knowledge: Development Economics", yang disiapkan untuk Seminar Interlaken Internasional Pertama tentang Analisa dan Ideologi Juni 1974, dan kemudian diterbitkan dalam *Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik*, 1975
- 2 Keprihatinan mengenai suatu krisis pangan yang permanen harus mendorong wakil-wakil Amerika Serikat untuk mengajukan alternatif-alternatif bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan pertanian dan penguasaan tanah di Dunia Ketiga. Tanzania belum lama berselang menerima model Soviet dan membentuk pertanian kolektif. Akibatnya hasil pertaniannya dapat diperkirakan. Ramifikasi-ramifikasi lebih halus yang mempengaruhi hasil pertanian dan penduduk timbul dari lain-lain sistem penguasaan tanah. Arthur DeVany misalnya menunjukkan dalam suatu studi menarik yang menggunakan data Meksiko (yang disiapkan untuk Konperensi Carnegie-Rochester mengenai Politik Pemerintah bulan April 1976) bahwa sistem pemakaian hasil yang terdapat di mana-mana menciptakan insentif-insentif untuk menurunkan hasil dan meningkatkan ukuran keluarga rata-rata.

Perhatian atas politik yang ditekankan pada paragraf sebelumnya mengantarkan komponen terakhir dalam suatu agenda positif. Wakil-wakil AS (dan bahkan sementara cendekiawan) hendaknya tegas menentang klaim-klaim sosialis di pasaran dunia untuk ide-ide. Kebenaran kapitalisme sebagai suatu rangkaian pranata luwes yang dimaksud untuk menjamin perjuangan yang terus-menerus bagi martabat manusia dan prestasi manusia memerlukan suatu perumusan yang mengobarkan semangat. Kita tidak boleh ragu-ragu menawarkan suatu visi tentang potensi manusia kita, biarpun hal ini mungkin menuntut perubahan-perubahan radikal dalam prosedur-prosedur dan kebiasaan-kebiasaan yang telah berakar, seperti diungkapkan dalam konperensi pers pertama pengganti Duta Besar Moynihan yang dilaporkan dalam pers Eropa. Menurut laporan itu, Duta Besar William Scranton menekankan bahwa tiada isu asas yang fundamental menuju suatu konfrontasi antara AS dan banyak negara di dunia. Pandangan ini mungkin merupakan verbalisme standar "birokrasi diplomasi", tetapi kenyataannya tetap: kita dihadapkan dengan suatu tantangan serius dan ujian berat bagi pengertian kita tentang isu-isu fundamental dari organisasi sosial. Mengapa wakil-wakil AS terus-menerus gagal melihat atau mengakui adanya suatu konfrontasi di bawahnya adalah suatu teka-teki. Mungkin, karena trend dalam negeri kita berpaling secara tajam ke arah yang secara implisit diperjuangkan TEIB, banyak politisi dan perumus profesional dapat menanggapi secara simpatik retorika sosialis yang disajikan oleh organisasi-organisasi PBB dan Dunia Ketiga. Tetapi biaya jangka panjang diukur dengan nilai-nilai manusia akan tinggi di jalan ini. Kita masih bisa belajar dan menggariskan suatu visi tentang kesempatan-kesempatan manusia yang harus ditawarkan kepada dunia.

NEOKOLONIALISME LAWAN TATA EKONOMI DUNIA BARU

Kirdi DIPOYUDO

Sesudah Perang Dunia II dunia mengalami suatu transformasi mendalam yang lambat laun akan mengubah perimbangan kekuatan global dan menciptakan dunia baru yang lebih baik. Di bawah tekanan-tekanan nasionalisme yang laksana taufan melanda negara-negara jajahan dan pendapat umum dunia yang mengutuk kolonialisme serta imperialisme serta menuntut penghapusannya, negara-negara imperialis Barat memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang mereka jajah. Portugal adalah negara penjajah yang lama menentang arus itu, tetapi akhirnya mengalah juga. Negara-negara yang baru merdeka itu segera tampil ke muka sebagai suatu kekuatan baru dalam percaturan politik dunia. Dalam negeri mereka segera mulai pembangunan nasional menuju kemerdekaan ekonomi, dan dalam politik luar negeri mereka bersatu untuk melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dengan maksud itu mereka membentuk Kelompok 77 untuk memperjuangkan pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru. Akan tetapi negara-negara industri sekuat tenaga mempertahankan sistem lama yang sangat menguntungkan mereka. Sistem ekonomi internasional lama itu adalah ciptaan dan warisan kolonialisme.

KOLONIALISME

Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara yang memiliki keunggulan militer, teknologi dan ekonomi demi

kepentingan nasionalnya untuk waktu lama menguasai dan memerintah bangsa lain. Kini kolonialisme sudah tidak dikaitkan dengan kolonisasi di mana orang-orang suatu negara menetap di negara lain seperti halnya dengan orang-orang Yunani kuno dan orang-orang Eropa di benua Amerika dan Australia. Kolonialisme kini dianggap sama dengan pemerintahan atas bangsa lain yang mendiami negara lain. Lebih khusus dia berarti pemerintahan negara-negara Eropa atas bangsa-bangsa lain di seberang lautan, terutama di Asia dan Afrika. Ciri-cirinya ialah dominasi oleh suatu minoritas asing atas mayoritas pribumi yang kalah dari segi material; kontak antara peradaban yang berorientasi pada mesin dengan kekuatan ekonomi yang besar dan irama hidup yang cepat dan peradaban yang tidak memiliki mesin-mesin dan ditandai oleh perekonomian terbelakang dan irama hidup lambat; dan dominasi peradaban yang pertama atas yang kedua,¹

Kolonialisme berhubungan erat dengan perkembangan kapitalisme dan revolusi industri di Eropa, yang mencari bahan mentah bagi industri dan pasaran bagi kelebihan hasilnya. Didorong oleh kebutuhan-kebutuhan itu negara-negara industri Barat melakukan ekspedisi-ekspedisi ke seberang laut, mula-mula untuk berdagang, tetapi kemudian dan untuk lebih menjamin keamanan suplai bahan mentah dan pasaran barang jadi itu serta untuk meningkatkan keuntungan, menaklukkan dan menjajah bangsa-bangsa lain. Sebagai akibatnya terjadi penindasan dan pemerasan bangsa-bangsa jajahan demi kepentingan negara-negara penjajah. Bukan saja seluruh impor dan ekspor koloni-koloni dikuasai penjajah sebagai monopoli, negara-negara jajahan itu juga dilarang memproses bahan mentah dan membangun industri yang dapat menjadi saingan. Perekonomian koloni dijadikan pelengkap perekonomian penjajah. Industri yang telah ada terpaksa gulung tikar. Secara demikian timbul suatu sistem pembagian kerja internasional, yang menempatkan negara-negara jajahan sebagai penghasil dan pengeksport bahan men-

¹ Lebih lanjut lihat Rupert Emerson, "Colonialism. Political Aspects", dalam David L. Sills, Ed., *International Encyclopaedia* (New York — London, 1972), 3, hal. 1-5; dan John P. Plamenatz, *On Alien Rule and Self-Government* (London, 1960)

tah dan pangan dengan harga murah dan pengimpor barang-barang jadi dengan harga tinggi dari negara-negara penjajah. Di samping itu pengakutan barang-barang ekspor mau pun impor mereka hampir seluruhnya di tangan negara-negara penjajah. Dalam keadaan serupa itu penjajah dapat menguras sumber-sumber daya alam jajahan dengan harga murah, mengolahnya menjadi barang jadi, menjual barang-barang itu dengan harga yang jauh lebih tinggi kepada negara-negara lain dan koloni-koloni, dan secara demikian menjadi makin kaya dan makmur, sedangkan bangsa-bangsa jajahan tetap miskin dan terbelakang. Dalam proses itu perekonomian negara-negara jajahan macet dan bahkan mundur. Itulah salah satu akar pokok kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi setelah mendapatkan kemerdekaan.¹

PROSES DEKOLONISASI

Mula-mula bangsa-bangsa jajahan terpaksa membiarkan dominasi dan pemerasan asing itu karena tidak berdaya menghadapi keunggulan militer dan teknologi penjajah mereka. Akan tetapi kolonialisme itu lambat laun mendapat tekanan semakin keras di negara-negara penjajah itu sendiri. Kritisi yang moderat dapat menerima kolonialisme kalau penguasa-penguasa kolonial berusaha menyiapkan bangsa jajahan mereka untuk kemerdekaan, tetapi karena semakin skeptis terhadap kejujuran negara-negara kolonial menuntut agar diadakan pengawasan internasional. Piagam PBB tahun 1945 mendukung kemerdekaan semua negara jajahan, memperketat pengawasan atas pemerintahan negara-negara perwalian sisa sistem mandat, dan menempatkan semua negara jajahan di bawah kekuasaan internasional. Sebaliknya kritisi yang lebih radikal mengutuk segala pemerintahan asing yang dipaksakan dan menuntut kemerdekaan sebagai satu-satunya penyelesaian. Sebagai hasil perjuangan mereka, bertolak dari resolusi anti kolonial Konferensi Afro-Asia di Bandung tahun 1955, Majelis Umum PBB pada tahun 1960 menerima suatu resolusi yang mengukuhkan pendapat itu dan oleh sebab itu dikenal sebagai Resolusi Dekolonisasi. Deklarasi

¹ Lihat D.K. Fieldhouse, "Colonialism. Economic Aspects", dalam David L. Sills, Ed., *op. cit.*, hal. 6-12; dan Stewart C. Easton, *The Rise and Fall of Western Colonialism* (New York — London, 1964), hal. 3—13

ini mengutuk penaklukan asing bangsa-bangsa sebagai penyanggahan hak-hak asasi dan hambatan perdamaian, menyatakan hak kemerdekaan semua bangsa, dan menolak doktrin perwalian dengan menegaskan bahwa kurangnya persiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh dijadikan dalih untuk menunda-nunda kemerdekaan (lihat lampiran). Pendapat Asia dan Afrika selalu menganut posisi radikal itu dan mengutuk kolonialisme serta imperialisme sebagai sumber kebanyakan masalah di dunia. Negara-negara yang masih mempunyai jajahan didesak agar secepat mungkin memberikan kemerdekaan.¹

Di bawah tekanan pendapat umum dunia yang mengutuk kolonialisme itu dan nasionalisme yang sebagai taufan melanda negara-negara jajahan, negara-negara imperialis Barat mempercepat proses dekolonisasi dan memberikan kemerdekaan kepada koloni-koloni mereka yang belum merdeka. Portugal adalah satu-satunya negara penjajah yang lama menentang arus itu, tetapi menyusul pemberontakan tahun 1974 yang menggulingkan rezim Salazar mengalah juga, khususnya karena pemimpin-pemimpin baru menyadari bahwa dekolonisasi adalah suatu proses sejarah yang tidak dapat dibendung.²

KOLONIALISME GAYA BARU

Akan tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa kolonialisme telah menjadi sejarah. Yang berakhir barulah kolonialisme gaya lama berupa penjajahan politik atau pemerintahan asing, sedangkan jenis-jenis lain penjajahan masih tetap hidup, khususnya penjajahan ekonomi. Jenis-jenis kolonialisme ini adalah lebih halus, tetapi sama jeleknya karena juga berarti dominasi dan pemerasan asing. Di antaranya terdapat penjajahan ekonomi yang berusaha menguasai bidang-bidang ekonomi, keuangan dan teknik negara lain; penjajahan ideologis yang berusaha

-
- 1 Mengenai proses dekolonisasi lebih lanjut lihat Rupert Emerson, *From Empire to Nation: The Rise and Self-Assertion of Asian and African Peoples* (Cambridge, Mass., 1960); lihat juga Stewart C. Easton, *op. cit.*, hal. 152-184 dan 366-372
 - 2 Lihat Peter Uebersex, "Self-Determination for Portugal's African Territories". *Indonesian Observer*, 30 Mei 1974; lihat juga Rupert Emerson, *From Empire to Nation: The Rise and Self-Assertion of Asian and African Peoples* (Cambridge, Mass., 1960)

memaksakan ideologi asing seperti yang dilakukan oleh Uni Soviet terhadap negara-negara di Eropa Timur sesudah Perang Dunia II; dan penjajahan militer yang berusaha memaksakan kehadiran militer asing dengan menempatkan secara paksa pasukan-pasukan serta pangkalan-pangkalan di negara yang lemah atau juga mengerahkan pasukan-pasukan ke negara lain dengan dalih untuk menyelamatkan warganegaranya atau kepentingan-kepentingannya, seperti penyerbuan tentara Soviet ke Cekoslowakia tahun 1968 dan pengerahan pasukan-pasukan Kuba ke berbagai negara di Afrika untuk memperkuat atau memperluas pengaruh merah. Jenis-jenis penjajahan itu adalah kolonialisme gaya baru dan lebih dikenal sebagai neo kolonialisme.¹

Yang paling banyak terdapat dan menonjol ialah penjajahan ekonomi. Negara-negara imperialis Barat memberikan kemerdekaan politik kepada negara-negara jajahan, tetapi tetap menguasai perekonomian mereka, khususnya lewat pola hubungan ekonomi ciptaan jaman kolonial. Hampir semua negara bekas jajahan itu bergantung pada negara-negara bekas penjajah mereka dan negara-negara industri lain untuk ekspor komoditi-komoditi primer mereka maupun untuk impor barang jadi, modal, teknologi dan keahlian manajemen mereka. Keadaan ini adalah akibat perkembangan mereka sebagai jajahan, yang dimaksud untuk menunjang kepentingan ekonomi negara-negara penjajah, sehingga perekonomian mereka macet dan bahkan mundur. Mereka adalah korban pembagian kerja internasional yang menempatkan mereka sebagai penghasil dan pengeksport bahan mentah dan pangan yang harganya ditekan dan pengimpor barang jadi yang mahal. Selain itu pengangkutan barang-barang ekspor maupun impor itu hampir seluruhnya di tangan negara-negara maju yang oleh sebab itu dapat menentukan biaya yang tinggi. Sebagai akibatnya harga komoditi-komoditi ekspor mereka ditekan lagi dan barang jadi menjadi lebih mahal secara yang menguntungkan negara-negara penjajah. Dengan demikian pada waktu mendapatkan kemerdekaan politik, negara-negara

¹ Lihat K. Brutents, *A Historical View of Colonialism* (Moskwa, 1972), hal. 16-38; dan Kwame Nkrumah, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism* (London, 1965)

jajahan itu miskin dan terbelakang perekonomiannya. Mereka tidak mempunyai modal, teknologi, tenaga-tenaga ahli dan sebagainya untuk melakukan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rendah rakyat mereka masing-masing. Untuk semuanya itu mereka bergantung sama sekali pada negara-negara industri kaya. Mereka berusaha mendapatkannya, tetapi oleh sebab persediaan terbatas dan tidak sebesar kebutuhan maka kedudukan tawar menawar mereka adalah lemah sehingga terpaksa menerima syarat-syarat yang lebih menguntungkan negara pemberi daripada negara penerima.¹

Pengalaman menyusul dekolonisasi politik menunjukkan bahwa penyaluran modal, teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang tidak memberikan hasil yang diharapkan, tetapi justru memperlebar jurang antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Sekitar 70-80% penduduk dunia yang hidup di Dunia Ketiga hanya memiliki 20-30% kekayaan dunia. Salah satu faktor pokok perkembangan itu ialah "terms of trade" yang sangat merugikan negara-negara berkembang. Negara-negara industri terus menguras bahan-bahan mentah negara-negara berkembang dengan harga serendah mungkin. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam angka-angka produksi baja Jepang, yang meningkat dengan cepat, dari 10 juta ton tahun 1956 menjadi 20 juta ton tahun 1960, 30 juta ton tahun 1963, 40 juta ton tahun 1965 dan sekitar 70 juta ton tahun 1968. Suatu perkembangan yang luar biasa, padahal Jepang tidak mempunyai bahan mentahnya. Hal itu berarti bahwa Jepang menguras bahan-bahan mentah untuk industri bajanya dari negara-negara lain, khususnya negara-negara berkembang.²

Sebaliknya negara-negara industri memerlukan pasaran bagi barang-barang industri mereka, baik dalam maupun luar negeri. Khususnya Jepang melancarkan suatu kampanye ekspor secara agresif karena produksinya jauh melebihi kebutuhannya

1 Lihat Harry Magdoff, *The Age of Imperialism* (New York - London, 1969); dan K. Brutents, *op. cit.* hal. 38-67 dan 151-192

2 Lihat *Kompas*, 9 September 1975; dan John Halliday dan Gavan McCormack, *Japanese Imperialism Today* (Penguin Books, 1974)

di dalam negeri. Karena harga-harga barang-barang industrinya lebih rendah dibandingkan dengan harga barang-barang negara-negara industri lainnya di Eropa dan Amerika, Jepang berhasil membanjiri negara-negara lain dengan hasil produksinya. Dalam proses itu dia menjadi kaya raya dengan cepatnya karena pendapatan ekspornya jauh lebih besar daripada biaya impornya, sehingga cadangan devisanya setiap tahun meningkat secara luar biasa. Sebagai akibat semuanya itu proses industrialisasi negara-negara berkembang sangat terhambat dan bahkan banyak industri yang telah ada terpaksa gulung tikar karena kalah bersaing.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang umumnya bersifat neokolonial. Meningkatnya ekspor dan GNP sangat dipengaruhi oleh injeksi bantuan luar negeri yang masif dan volume besar investasi asing yang harus meningkat. Sebagian besar investasi asing itu bersifat neokolonial, artinya dilakukan seperti di jaman kolonial dalam industri-industri ekstraktif seperti perminyakan, pertambangan, dan perikanan. Sebagian ekspor juga merupakan hasil kegiatan itu. Investasi dalam industri manufacturing meliputi tiga jenis pokok, dua di antaranya mempunyai akibat neokolonial. Pertama apa yang disebut investasi "coca cola", yang melayani kesenangan mewah elit asing dan lokal yang kecil. Kedua, industri yang bersaing dengan dan menggantikan barang-barang yang sebelumnya dihasilkan modal dan tenaga kerja lokal, termasuk sebagian investasi dalam pertekstilan, seperti terbukti dalam seruan-seruan pengusaha-pengusaha lokal kepada pemerintah agar dilindungi. Jenis ketiga meliputi industri barang-barang ganti impor seperti obat-obatan, assembling kendaraan bermotor, ban, bahan bangunan dan sebagainya. Investasi industri berpusat di sekitar kota-kota besar dan secara demikian memperlebar jurang gaya hidup dan kekayaan antara kota dan desa. Akhirnya kegiatan ekonomi asing itu sangat padat modal dan tidak dapat diharapkan mengurangi pengangguran secara berarti.¹

I Lihat Rex Mortimer, "Indonesia: Growth or Development?", dalam Rex Mortimer, Ed., *The Showcase State. The Illusion of Indonesia's Accelerated Modernization* (Sydney, 1973), hal. 51-66

Seperti investasi asing, demikianpun bantuan luar negeri umumnya berbau neokolonialisme. Bantuan berupa pinjaman yang diberikan itu sebagian besar dengan syarat-syarat dalam arti bahwa pinjaman harus digunakan untuk membeli barang-barang dari negara-negara donor dan untuk proyek-proyek yang harus disetujui dan diawasi oleh pemberi. Selain itu bantuan tersebut kerap kali menghambat perkembangan ekonomi karena dua hal. Pertama, sebagian besar bantuan proyek itu dimaksud untuk memperluas prasarana bagi operasi perusahaan-perusahaan multinasional. Hal itu memperkuat kedudukan ekonomi perusahaan-perusahaan itu, memperbesar tendensi ke arah perkembangan kantong-kantong dan memperkuat trend pembangunan padat modal. Kedua, bantuan yang diberikan itu adalah syarat bagi pengembalian pinjaman-pinjaman yang lebih dahulu dengan bunganya. Dengan perkataan lain, tanpa bantuan baru itu kemungkinan besar bantuan pinjaman lama tidak akan kembali.¹

NEOKOLONIALISME MASIH HIDUP

Neokolonialisme itu masih merupakan masalah yang hangat baik dalam negara berkembang masing-masing maupun pada tingkat internasional dan bahkan secara global. Penjajahan ekonomi masih terjadi di hampir semua negara Dunia Ketiga, biarpun banyak orang tidak menyadarinya. Banyak negara berkembang hanya namanya merdeka dan berdaulat, tetapi kenyataannya secara ekonomis dikuasai dan diperas oleh pemerintah-pemerintah dan perusahaan-perusahaan asing. Negara-negara industri yang kaya, untuk sebagian hasil pemerasan koloni-koloni mereka di masa lampau, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pola hubungan ekonomi jaman kolonial yang sangat menguntungkan mereka tetapi sangat merugikan secara tak adil negara-negara bekas jajahan, dan sejauh ini usaha mereka itu berhasil. Dengan perkataan lain, mereka berhasil

1 Lebih lanjut lihat Teresa Hayter, *Aid as Imperialism* (Penguin Books, 1974). Penulis membeberkan praktik-praktik bantuan luar negeri, khususnya di Amerika Latin, dan mengutip Presiden Kennedy sebagai mengatakan bahwa "bantuan asing adalah cara Amerika Serikat mempertahankan suatu kedudukan pengaruh dan kekuasaan di dunia"

menguasai perekonomian negara-negara berkembang lewat sistem ekonomi liberal dan investasi dalam investasi pertambangan dan barang-barang konsumsi untuk sebagian kecil masyarakat yang mampu membelinya. Hal itu adalah juga hasil bantuan-bantuan yang mengikat atau diberikan dengan syarat-syarat yang memberatkan negara-negara penerima. Negara-negara ini antara lain harus menganut ekonomi liberal, menggunakan bantuan kredit untuk membeli barang-barang di negara-negara pemberi, menggunakan penasihat-penasihat asing, dan mendapatkan persetujuan pemberi kredit bagi proyek-proyek pembangunan mereka. Secara demikian negara-negara industri kaya dapat menguasai politik pembangunan negara-negara berkembang demi kepentingan-kepentingan mereka. Khususnya mereka berusaha untuk mempertahankan sistem pembagian kerja internasional ciptaan jaman kolonial yang menempatkan mereka sebagai pengimpor bahan mentah dan pangan dengan harga murah dari negara-negara berkembang dan pengekspor barang-barang jadi dengan harga tinggi kepada negara-negara itu, dan sebaliknya menempatkan negara-negara berkembang sebagai penghasil dan pengekspor barang-barang primer serta pengimpor barang-barang industri. Dalam kata-kata negara-negara industri itu mendukung rencana industrialisasi negara-negara Dunia Ketiga dan memberikan bantuan, tetapi kenyataannya mereka menentangnya. Mereka menyadari bahwa industrialisasi negara-negara berkembang akan berarti matinya sebagian industri mereka sendiri, pengangguran dan berkurangnya kemakmuran. Bantuan bagi negara-negara berkembang diberikan demikian rupa sehingga industrialisasi tidak terwujud dan ketergantungan ekonomi mereka pada negara-negara pemberi tidak berkurang, melainkan bertambah. Negara-negara berkembang tidak boleh menjadi negara industri dan menjadi saingan. Mereka harus puas dengan kedudukan mereka sebagai penghasil dan pengekspor komoditi-komoditi primer serta pengimpor barang-barang jadi.

Sejalan dengan itu negara-negara industri juga berusaha mempertahankan kedudukan mereka untuk menentukan harga barang-barang baik impor maupun ekspor mereka. Secara konkrit mereka berusaha mempertahankan harga barang-barang

primer yang mereka impor pada tingkat yang rendah, sedangkan harga barang-barang jadi yang mereka ekspor terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kemakmuran dalam negeri mereka dan upah buruh. Sejauh ini mereka berhasil dalam usaha itu dan "terms of trade" semakin menguntungkan mereka. Hanya mengenai minyak tanah usaha mereka gagal. Setelah harga minyak itu beberapa dasawarsa ditekan, pada tahun 1973 dia meningkat sampai 5 kali berkat perjuangan negara-negara OPEC. Negara-negara industri yang bergantung pada minyak Timur Tengah menjadi berantakan dan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada negara-negara OPEC, tetapi tidak berdaya untuk melawan kenaikan harga itu. "Jaman kemajuan luar biasa dan pendapatan serta kekayaan yang lebih luar biasa yang didasarkan atas minyak murah telah berakhir". Demikian komentar Shah Iran mengenai hal itu. ¹

Didorong oleh sukses negara-negara OPEC itu, banyak negara Dunia Ketiga lainnya berusaha membentuk kartel yang dapat menentukan harganya sendiri bagi bahan-bahan mentah lainnya seperti tembaga, bijih besi, fosfat, karet, kopi, cokelat dan lain sebagainya. Akan tetapi usaha itu sejauh ini tidak memberikan hasil yang diharapkan karena negara-negara yang bersangkutan tidak cukup kompak, sedangkan negara-negara industri yang akan mengalami akibat buruknya berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkannya. Namun arti baru bahan-bahan mentah telah mendorong sementara produsen untuk secara sepihak meningkatkan harga-harga. Misalnya Jamaika membatalkan kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing dan meningkatkan penerimaan negara dari bauksitnya sebanyak 700%. Bagaimanapun juga, dunia telah memasuki suatu jaman di mana kekayaan alam lebih bernilai daripada sebelumnya dan penghematan lebih dihargai daripada pemborosan. ²

Untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup yang telah sangat tinggi, kini 35 kali lebih tinggi dari taraf hidup di negara-negara berkembang, negara-negara industri membutuhkan suplai aman bahan-bahan mentah dan minyak bagi indus-

1 Dikutip dari "Faisal and Oil. Driving Toward a New World Order", *Time*, 6 Januari 1975

2 Lihat "Faisal and Oil. Driving Toward a New World Order", *Time*, 6 Januari 1975; dan karangan "How Strong the New Cartels?" *Newsweek*, 8 September 1975

tri serta pasaran bagi barang-barang industrinya. Dalam rangka itu mereka berusaha mengamankan baik suplai bahan mentah dan bahan bakar serta pengangkutannya maupun pasaran barang-barang jadi itu. Baik Jepang maupun negara-negara Eropa Barat untuk sebagian besar suplai bahan mentah dan bahan bakar bergantung pada negara-negara berkembang Dunia Ketiga, khususnya Timur Tengah dan Afrika. Sehubungan dengan itu mereka berusaha mempertahankan kedudukan mereka untuk menguasai sumber-sumber daya alam kedua kawasan itu dan menangkis perluasan pengaruh Uni Soviet yang dilihat sebagai ancaman. Perebutan pengaruh di Timur Tengah dan Afrika antara blok Timur dan blok Barat yang berlangsung sekarang ini bukanlah semata-mata sengketa Timur-Barat, melainkan juga perebutan sumber-sumber daya alam yang vital bagi negara-negara Barat. Kedua pihak menyadari bahwa keamanan suplai bahan mentah dan bahan bakar dari kedua kawasan itu serta keamanan pengangkutannya merupakan soal mati hidup bagi negara-negara Barat dan Jepang. Kejadian-kejadian di Zaire baru-baru ini merupakan suatu ilustrasi yang baik. Uni Soviet dan Kuba membantu kaum pemberontak Katanga yang menyerbu propinsi Shaba untuk menggulingkan Pemerintah Mobutu yang tidak hanya dianggap tidak kompeten dan korup tetapi juga sebagai kaki tangan Barat dalam pengurusan sumber-sumber daya alam negara itu. Dengan tepat negara-negara Barat melihatnya sebagai ancaman bagi kepentingan-kepentingan vital mereka dan segera turun tangan untuk menyelamatkan Pemerintah Mobutu biarpun kurang senang dengannya. Apabila kaum pemberontak berhasil dan membentuk suatu pemerintah kiri yang pro Moskwa, suplai bahan mentah itu bisa dihentikan.¹

Khususnya hubungan antara Jepang dan negara-negara berkembang, bersifat neokolonial. Hubungan ini menempatkan negara-negara berkembang yang bersangkutan sebagai penghasil dan pengekspor bahan mentah dan bahan bakar dengan harga murah serta pengimpor barang jadi Jepang dengan harga yang tinggi. Memang harus diakui bahwa Jepang bergantung pada negara-negara itu untuk

1 Lihat karangan "Countering the Communists", *Time*, 5 Juni 1978; dan "New Gendarmes in Africa", *Newsweek*, 5 Juni 1978

impor dan ekspornya, tetapi ketergantungannya pada negara berkembang masing-masing adalah tidak sebesar ketergantungan negara-negara berkembang itu pada Jepang. Hubungan itu bersifat asimetris dan merugikan negara-negara berkembang. Dan kalau tidak terpaksa, Jepang tidak akan mengubah pola hubungan itu dan menggantinya dengan pola hubungan baru di mana saling ketergantungan bersifat simetris. Tidak mengherankan bahwa negara-negara berkembang itu merasa diperas oleh Jepang tetapi tidak berdaya untuk menghentikan pemerasan itu karena terlalu bergantung pada Jepang. Sebagai akibatnya timbul rasa benci terhadap Jepang yang bisa mengobarkan aksi-aksi anti Jepang seperti terjadi pada kunjungan PM Tanaka ke beberapa negara ASEAN tahun 1974. Bila ada kesempatan, suatu bangsa yang merasa diperas oleh bangsa lain akan bangkit dan menuntut perubahan.¹

Di banyak negara berkembang dominasi dan pemerasan asing dipermudah oleh sekelompok kecil birokrat kapitalis, yang terdiri atas pejabat-pejabat sipil maupun militer, yang berkat kedudukan kunci mereka dalam aparatur politik birokrat dapat memasuki sektor modern ekonomi yang di tangan pemerintah dan lewat manipulasi perusahaan-perusahaan negara, dana-dana pemerintah dan kegiatan bisnis swasta, menumpuk banyak kekayaan dan kekuasaan, kerap kali dalam waktu singkat. Sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan kenyataan-kenyataan ekonomi, mereka berambisi menciptakan bukan perusahaan-perusahaan besar yang jaya melainkan kelompok pengikut dan pangkalan-pangkalan strategis untuk meningkatkan status pribadi mereka dan menuntut hormat dari masyarakat. Orang-orang itu umumnya dikenal hidup mewah, meniru aspek-aspek cara hidup Barat yang kurang konstruktif, melakukan korupsi uang negara dan patronase dalam bidang politik.

Kelas kaya baru ini di sementara negara berkembang menjadi lebih kuat dengan terbukanya kesempatan-kesempatan yang lebih besar berkat masuknya perekonomian asing dan menjadi

1 Lihat *Antara*, 12 Januari 1974 dan 15 Januari 1975; lihat juga John Halliday dan Gavan McCormack, *op. cit.*, hal. 17-76

semakin berkuasa karena kekuatan-kekuatan politik lainnya ditindas atau dijinakkan. Dengan ambisi untuk memasuki bidang yang dikuasai modal asing mereka menjadi sekutu kekuatan-kekuatan ekonomi asing yang menguasai perekonomian nasional dan memeras bangsa. Dengan mengalirnya bantuan luar negeri dan modal investasi asing, mereka menyatukan kepentingan-kepentingan dan kegiatan-kegiatan mereka dengan kekuatan dan kepentingan asing itu demi keuntungan bersama. Dengan demikian mereka menjadi sekutu perusahaan-perusahaan asing untuk memeras negara mereka sendiri.

Sebagai perantara kepentingan asing mereka paling banyak mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan modal multinasional. Mereka tidak menentang perkembangan ekonomi. Sebaliknya, dalam keadaan boom ekonomi berkat bantuan luar negeri dan investasi asing, mereka senang menjadi pelancar masuknya ekonomi asing dan mendirikan perusahaan-perusahaan di tepi kegiatan bisnis asing. Tetapi sumbangan mereka bagi peningkatan kemampuan negara untuk mengadakan pembaruan-pembaruan di tingkat nasional adalah sangat kecil. Ikatan mereka dengan modal asing, konsentrasi mereka di jalan menuju pengumpulan kekayaan, dan aspirasi mereka akan status dan gengsi, semuanya itu mendorong mereka untuk bercokol dalam kantong-kantong, yang merupakan sektor kecil, modern dan dimanja dari perekonomian negara. Secara demikian mereka memperkuat kecenderungan kepentingan asing dan penasihat-penasihat ekonomi pemerintah untuk proyek-proyek yang besar, modern, mahal dan padat modal. Lambang gambaran mereka mengenai pembangunan ialah rumah-rumah megah, mobil-mobil mewah, kasino-kasino, klub-klub malam, toko-toko penuh sesak dengan barang-barang impor.

Mereka merupakan hambatan utama bagi perkembangan sejati. Di lain pihak tiada kekuatan sosial dan politik yang mampu melawan serangan perusahaan asing dan sekutu-sekutu lokalnya. Pengusaha-pengusaha lokal adalah terlalu lemah jumlah dan skala operasinya, dan dari segi politik impoten, untuk menantang dominasi mereka. Mahasiswa dan cendekiawan disadarkan bahwa peranan mereka terbatas pada kritik loyal. Lagi

pula kultus mereka akan pertumbuhan GNP meningkatkan kelompok dan frustrasi mereka. Partai-partai politik dan organisasi-organisasi dijinakkan. Rakyat banyak tidak boleh ikut berpolitik dan hanya boleh menyalurkan keluhan dan tuntutan-nya lewat saluran birokrasi yang tidak simpatik. Kekuasaan sangat terpusat, tersusun menurut garis hirarki. Hak-hak, tanggung jawab dan kekuasaan adalah pada kaum birokrat kapitalis tersebut,¹

AKSI MELAWAN NEOKOLONIALISME

Negara-negara berkembang semakin menyadari kepincangan-kepincangan hubungan-hubungan ekonomi internasional itu dan bertekad untuk menggantinya dengan suatu pola hubungan baru yang lebih adil. Dipelopori oleh negara-negara OPEC yang telah berhasil mendapatkan bagian yang lebih besar dari kekayaan minyak mereka, mereka memperjuangkan terbentuknya suatu tata baru dan melancarkan suatu revolusi ekonomi yang telah mulai menghasilkan pembagian kembali kekayaan dunia dan kekuasaan politik. Pemindahan kekayaan kepada negara-negara penghasil minyak telah memperlambat atau menghentikan laju peningkatan taraf hidup di banyak negara maju. Dalam rangka itu pada tahun 1965 mereka membentuk Kelompok 77 yang kini telah beranggotakan 121 negara.

Perjuangan itu makin lama makin kuat dan mencapai salah satu puncaknya dalam Sidang Khusus yang diadakan Majelis Umum PBB pada 9 April — 2 Mei 1974 untuk membicarakan masalah-masalah bahan mentah, pembangunan dan hubungan-hubungan perdagangan dunia, khususnya sehubungan dengan meningkatnya harga barang-barang, termasuk minyak tanah. Pada akhir sidang itu diterima tanpa pemungutan suara dua dokumen, yaitu *Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru* dan *Program Aksi* yang memuat serangkaian tindakan yang mendesak dan efektif yang perlu diambil oleh masyarakat internasional guna membantu negara-negara berkembang. Deklarasi itu memuat 20 *asas bagi penyusunan tata*

1 Lihat Rex Mortimer, *op. cit.*, hal. 57-59

baru yang menyangkut sumber-sumber daya alam, perdagangan dan keuangan internasional, perusahaan-perusahaan transnasional, teknologi dan lain sebagainya. Salah satu asas menyatakan "kedaulatan abadi setiap negara atas kekayaan alamnya" dan menegaskan bahwa "setiap negara berhak untuk menguasai secara efektif kekayaan alamnya dan eksploitasinya dengan cara-cara yang selaras dengan situasinya, termasuk hak nasionalisasi atau pemindahan pemilikan kepada warga-warganya". Suatu asas lain yang berkaitan menyatakan bahwa semua negara, wilayah dan bangsa di bawah pendudukan asing, kekuasaan kolonial atau apartheid mempunyai "hak atas ganti rugi dan kompensasi penuh bagi eksploitasi dan pengurusan serta kerugian terhadap kekayaan alam dan kekayaan lain negara-negara, wilayah-wilayah dan bangsa-bangsa itu". (lihat Lampiran 2)

Dalam serangkaian asas mengenai soal-soal perdagangan, Deklarasi menyerukan "suatu hubungan adil dan wajar antara harga bahan-bahan mentah, hasil-hasil primer, barang-barang jadi atau setengah jadi yang diekspor negara-negara berkembang dan harga bahan-bahan mentah, komoditi-komoditi primer, barang-barang jadi, barang-barang modal dan perlengkapan yang mereka impor". Sasarannya ialah melaksanakan suatu perbaikan dalam "terms of trade" yang sejauh itu sangat merugikan negara-negara berkembang dan perluasan ekonomi dunia.

Bagaimana asas-asas itu harus diterapkan dijelaskan secara panjang lebar dalam *Program Aksi*. Salah satu ketentuannya menyerukan agar diambil langkah-langkah untuk mempermudah berfungsinya, organisasi-organisasi produsen, termasuk pemasaran bersama, perdagangan teratur, perbaikan penerimaan ekspor negara-negara berkembang produsen dan dalam "terms of trade", dan pertumbuhan ekonomi dunia. Suatu seksi yang berkaitan menandakan bahwa "pengerahan secara yang semakin efektif oleh kelompok negara pengeksport minyak dari sumber-sumber daya alam mereka demi pembangunan ekonomi mereka harus disambut dengan baik". Selain itu *Program Aksi*

menyerukan penurunan tarif pengangkutan dan biaya asuransi bagi negara-negara berkembang, lagi pula menandakan bahwa harus diusahakan agar mereka mendapatkan teknologi dengan syarat-syarat yang lebih baik serta penyesuaiannya dengan kondisi khusus masing-masing negara.¹

Sebagai lanjutan, pada 17-20 Pebruari 1975 kelompok 77 mengadakan suatu konperensi di Aljazair yang dihadiri 66 negara berkembang. Konperensi ini menghasilkan suatu Deklarasi Bersama yang memuat hal-hal berikut: (1) mengenai industrialisasi meningkatkan hasil industri dari 7% menjadi 20-25% seluruh produksi dunia pada tahun 2000, membangun industri dasar dan industri yang mencakup semua tahap produksi yang saling melengkapi; (2) dalam bidang perdagangan meningkatkan devisa dan diversifikasi sumbernya, mendesak negara-negara industri agar menghilangkan hambatan tarif dan nontarif serta menghentikan harga impor yang ditentukan oleh negara-negara industri lewat pasaran bursa; (3) mengenai bantuan asing meningkatkan bantuan keuangan dan teknik tanpa ikatan politik atau ekonomi, serta mendesak perusahaan-perusahaan multinasional agar tidak merugikan negara-negara berkembang; (4) menggalakkan kerjasama langsung antara negara-negara berkembang; dan (5) mengusahakan agar UNIDO di Lima mendesak PBB supaya statusnya diubah menjadi organisasi otonom seperti FAO dan WHO, dan kursi negara-negara berkembang ditingkatkan dari 25 menjadi 40.²

Langkah berikutnya ialah diadakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada 1-12 September 1975 untuk membicarakan pelaksanaan Tata Ekonomi Internasional Baru. Pada 16 September Sidang mengesahkan suatu rencana menyeluruh untuk membantu negara-negara berkembang dalam krisis ekonomi dunia. Rencana itu menggariskan langkah-langkah untuk memberikan kepada mereka suatu bagian yang lebih baik dan lebih menguntungkan dalam usaha mereka meningkatkan produksi industri dan pertanian. Dia merupakan suatu kompromi

1 Lihat *Sinar Harapan*, 3 Mei 1974; lihat juga ulasan dalam *Survey of Current Affairs*, 4 (1974), hal. 157-159

2 Lihat laporan *Antara*, 20 Pebruari 1975

antara tuntutan minimal negara-negara berkembang dan kesanggupan negara-negara maju untuk menolong tanpa mengorbankan kepentingan-kepentingan dasar mereka. Amerika Serikat, Pasaran Bersama Eropa dan Jepang menerimanya, tetapi mengajukan reservasi-reservasi mengenai sementara langkah. Langkah-langkah itu diterima dalam suatu resolusi, yang memuat pokok-pokok berikut.

1. Mengenai perdagangan internasional "harus dilakukan gabungan usaha-usaha internasional dan nasional menuju perluasan dan diversifikasi perdagangan negara-negara berkembang, perbaikan lewat diversifikasi kapasitas produktif mereka, perbaikan produktivitas mereka dan peningkatan penerimaan ekspor mereka dengan maksud untuk mengatasi akibat-akibat buruk inflasi dan secara demikian mempertahankan pendapatan nyata mereka". Sidang berikut UNCTAD diberi mandat khusus untuk memperbaiki struktur pasaran bahan-bahan mentah dan komoditi yang penting bagi negara-negara berkembang, termasuk cadangan internasional untuk menjamin harga-harga yang mantap, menguntungkan dan adil. UNCTAD juga diminta untuk mempelajari hubungan antara harga-harga ekspor negara-negara industri dan harga bahan-bahan mentah negara-negara berkembang yang dikenal sebagai soal indeksasi harga-harga.
2. Mengenai bantuan pembangunan negara-negara industri hendaknya berusaha sebaik mungkin untuk memindahkan 0,7% GNP mereka ke negara-negara berkembang. Prosentase itu adalah sasaran Dasawarsa Pembangunan II PBB. IMF akan menciptakan tambahan SDR untuk pembangunan dan mengadakan dana trust baru dengan maksud itu, yang sebagian akan dibiayai dengan penjualan emasnya dan sebagian dengan iuran-iuran. Langkah-langkah lain untuk memberikan bantuan keuangan harus dibiayai lewat Bank Dunia dan IMF. Juga perlu dipikirkan penciptaan suatu fasilitas keamanan pembangunan sesuai dengan usul Kissinger untuk "memperlunak berkurangnya penerimaan ekspor negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang paling miskin."
3. Dalam bidang ilmu dan teknologi negara-negara industri hendaknya membantu negara-negara berkembang. "Semua negara harus bekerjasama dalam mengembangkan suatu kode tingkah laku pemindahan teknologi. Negara-negara maju harus membuka pintu mereka selebar mungkin bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan teknologi yang pengalihannya tidak tunduk pada keputusan-keputusan swasta". Suatu konferensi PBB tentang teknologi pembangunan hendaknya diadakan pada tahun 1978 atau 1979.
4. Mengenai industrialisasi UNIDO hendaknya memajukan bantuan dalam proses industrialisasi negara-negara berkembang menurut Rencana Aksi Lima.
5. Mengenai pangan dan pertanian "Pemecahan masalah pangan dunia pertama-tama terletak dalam peningkatan produksi pangan di negara-negara berkembang dengan cepat". Dicantumkan pula usul Amerika Serikat untuk membentuk suatu dana internasional US\$ 1.000 juta untuk pengembangan pertanian dengan target tahunan minimal 10 juta ton pangan.

6. Kerjasama ekonomi antara negara-negara berkembang perlu ditingkatkan.
7. Hendaknya dibentuk suatu komite di mana semua anggota Majelis Umum PBB diwakili untuk menyusun kembali sistem ekonomi.

Wakil Amerika Serikat menandakan bahwa negaranya menyetujui konsensus itu tetapi tidak dapat menerima implikasi bahwa dunia kini mulai menyusun apa yang disebut 'Tata Ekonomi Dunia Baru'. Dalam bidang perdagangan Amerika Serikat tidak dapat menyetujui ditetapkannya harga-harga dunia atau manipulasi "terms of trade". Dia tidak dapat mendukung indeksasi harga-harga.¹

Di atas kertas semuanya itu merupakan suatu hasil yang gemilang, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Sejauh ini ketentuan-ketentuan itu tidak dilaksanakan, khususnya karena ditentang oleh Amerika Serikat, Jerman Barat dan Jepang. Ketiga negara ini berpendapat bahwa tidak diperlukan Tata Ekonomi Dunia Baru karena menurut mereka tata ekonomi yang berlaku sejauh ini adalah baik dan hanya perlu perbaikan di sana sini. Mereka dengan tegas menolak tuntutan negara-negara Dunia Ketiga agar kekayaan dunia dibagi kembali. Pada Sidang UNCTAD IV di Nairobi, 5-31 Mei 1976, yang diadakan untuk membicarakan pelaksanaan resolusi Sidang Khusus Majelis Umum PBB tahun 1975, terjadi perdebatan sengit antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang. Dengan tegas negara-negara industri menolak konsep yang diajukan oleh negara-negara berkembang untuk menjamin kestabilan harga komoditi-komoditi, yaitu "program komoditi terpadu" (integrated programme for commodities) dan "dana bersama" (common fund). Khususnya mereka menolak indeksasi harga-harga barang-barang ekspor dan impor negara-negara berkembang sebagai manipulasi "terms of trade" yang bertolak belakang dengan ekonomi bebas negara-negara industri. Dengan demikian sidang UNCTAD IV itu dapat dikatakan gagal.² Demikianpun Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional yang dilangsungkan di Paris (Desember 1975 — Juni 1977) tidak

1 Lihat ulasan dalam *The New Standard*, 20 September 1975; lihat juga karangan Daniel P. Moynihan, "The United States in Opposition", *Commentary*, Maret 1975

2 Lihat laporan *Sinar Harapan*, 13 Mei 1976 dan *Kompas*, 26 Mei 1976

berhasil memecahkan sengketa itu. Negara-negara industri kaya atau Utara tetap menolak pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru yang diperjuangkan negara-negara berkembang atau Selatan. Mereka tidak bersedia membagi kembali kekayaan dan pendapatan dunia secara yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Mereka sekuat tenaga berusaha mempertahankan sistem ekonomi lama yang sangat menguntungkan mereka dan hanya bersedia mengadakan perubahan-perubahan kecil-kecilan di sana sini. Hal itu dapat dimengerti karena tata baru akan berarti tutupnya banyak pabrik mereka, pengangguran dan menurunnya kemakmuran rakyat mereka.¹

Semuanya itu berarti bahwa neokolonialisme masih sangat kuat di dunia, dan tidak mudah dihancurkan. Akan tetapi negara-negara berkembang Dunia Ketiga telah bertekad untuk meneruskan perjuangan mereka untuk tata dunia baru sampai berhasil. Mereka yakin bahwa bagaimanapun perjuangan itu akhirnya akan berhasil juga, karena dekolonisasi ekonomi adalah suatu proses sejarah yang tidak dapat dibendung.

SIKAP INDONESIA DAN PERANANNYA

Sejak merdeka Indonesia dengan tegas menolak kolonialisme dan imperialisme seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Sikap itu diperkuat dengan penetapan persatuan Indonesia yang seperti ditegaskan oleh Bung Hatta adalah identik dengan nasionalisme sebagai satu di antara lima sila dasar negara. Dengan demikian Indonesia Merdeka tidak hanya dibangun atas dasar nasionalisme tetapi juga wajib ikut memperjuangkannya di forum dunia. Dengan kekuatan-kekuatan anti kolonial lain Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaan politik maupun ekonomi segala bangsa dan dalam rangka itu berjuang untuk menghapus kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk sistem eko-

1. Tentang kegagalan Dialog Utara-Selatan lebih lanjut lihat Jahangir Amuzegar, "A Requiem for the North-South Dialogue", *Foreign Affairs*, Oktober 1977

nomi internasional ciptaan jaman kolonial yang memeras negara-negara berkembang dengan menguras sumber-sumber daya alam mereka dengan harga murah. Sebagai gantinya Indonesia wajib ikut memperjuangkan pembentukan suatu sistem ekonomi dunia baru yang benar-benar suatu tata atau orde. Oleh sebab itu dalam Pembukaan UUD 1945 juga ditetapkan bahwa pemerintah Indonesia selain mengemban tugas-tugas intern juga wajib "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dengan demikian jauh sebelum Kelompok 77 dibentuk, Pemerintah Indonesia telah ditugaskan untuk memperjuangkan terbentuknya suatu tata dunia baru yang didasarkan atas kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa dan atas keadilan sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara masyarakat dunia dan bangsa-bangsa anggotanya. Sebagai hasilnya akan muncul perdamaian abadi di dunia. Secara demikian sejak permulaan Indonesia juga mengakui dan menegaskan bahwa keadilan sosial bukan saja berlaku dalam negara tetapi juga dalam masyarakat dunia.

Sesuai dengan itu Indonesia tidak hanya berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah dinyatakan terhadap usaha negara penjajah untuk menguasainya kembali, tetapi juga ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah baik di forum PBB maupun di forum-forum lain. Antara lain Indonesia ikut menggoalkan deklarasi dekolonisasi PBB tahun 1960 dan resolusi-resolusi anti kolonial yang dikeluarkan oleh PBB untuk melaksanakannya.

Indonesia juga ikut mempelopori gerakan Nonblok yang sejak semula menjauhkan diri dari sengketa Timur-Barat dan dengan gigih memperjuangkan dekolonisasi bangsa-bangsa yang masih dijajah secara formal atau dikuasai oleh minoritas-minoritas kulit putih seperti Rhodesia, Namibia dan Afrika Selatan. Kemudian Indonesia ikut membentuk Kelompok 77 yang secara lebih terarah memperjuangkan kemerdekaan ekonomi negara-negara berkembang lewat pembagian kembali kekayaan dunia, perubahan pola hubungan ekonomi global, perbaikan "terms of trade", perubahan sistem pembagian kerja internasional dan lain

sebagainya. Dengan perkataan lain. Indonesia selalu ikut memperjuangkan pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru sebagai ganti sistem ekonomi lama ciptaan jaman kolonial.¹

Bangsa Indonesia juga menyadari perlunya mencapai kemerdekaan ekonominya sendiri sesuai dengan tuntutan nasionalisme yang seperti kita lihat di atas merupakan salah satu dasar negaranya. Berdasarkan keyakinan bahwa kemerdekaan ekonomi itu hanya dapat dicapai lewat diversifikasi ekonomi dan industrialisasi, Indonesia melaksanakan suatu rencana pembangunan yang berusaha melakukan keduanya. Dalam GBHN 1978 ditandaskan bahwa dalam Repelita II negara harus "meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku", dalam Repelita III "meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi", dan dalam Repelita IV "meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita berikutnya".² Dengan demikian Indonesia tidak bermaksud untuk membiarkan sistem pembagian kerja internasional lama dan membatasi diri pada produksi dan ekspor komoditi-komoditi primer, tetapi bertekad untuk mengolah sumber-sumber daya alamnya menjadi barang jadi. Sementara itu Indonesia juga ikut memperjuangkan perbaikan "terms of trade" bagi ekspor negara-negara berkembang. Semuanya itu dilakukan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari kekayaan alamnya dan secara demikian lambat laun mencapai kemerdekaan ekonomi sejauh hal itu mungkin dalam konteks saling ketergantungan negara-negara di jaman modern ini. Ketergantungan antar negara itu hendaknya bersifat simetris, tidak boleh asimetris. Secara konkrit, Indonesia tidak boleh lebih bergantung pada suatu negara lain daripada ketergantungan negara ini padanya. Ketergantungan yang berlebihan pada suatu negara lain harus dikurangi secara berangsur-ang-

1 Lihat karangan "Sikap Indonesia mengenai Tata Ekonomi Internasional Baru", *Kompas*, 9 Oktober 1975; lihat juga Adam Malik, *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru* (Jakarta, 1976)

2 Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1978), 90-91

sur. Dalam rangka itu perlu diadakan diversifikasi impor maupun ekspor.

Agar industrialisasi itu berhasil, bangsa dan negara Indonesia antara lain harus hidup hemat dan menabung untuk ikut membiayainya, lagi pula menghargai barang-barang buatan dalam negeri. Segala pemborosan dan pengeluaran yang belum pada waktunya pada tahap perkembangan ekonomi sekarang ini harus dihindari. Seluruh bangsa harus benar-benar berpegang teguh pada *pola hidup sederhana* yang berulang kali dianjurkan oleh pemerintah.¹ Sehubungan dengan itu pola konsumsi harus diatur dan disesuaikan dengan kemampuan bangsa sebagai keseluruhan. Dia harus dibatasi pada kebutuhan-kebutuhan pokok. Iklan-iklan yang melakukan manipulasi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan mempromosikan barang-barang yang tidak perlu harus dilarang. Demikianpun strategi produksi perlu ditinjau kembali dalam arti bahwa produksi harus lebih diarahkan pada kebutuhan-kebutuhan rakyat banyak, sedangkan produksi barang-barang yang tidak perlu dibatasi. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian ialah *peningkatan daya beli rakyat banyak*. Usaha industrialisasi tidak akan berhasil kalau daya beli rakyat banyak tidak memadai. Produksi untuk ekspor besar-besaran sukar dilakukan karena menghadapi saingan yang sangat berat, sedangkan pasaran yang terdiri atas golongan elit kecil cepat jenuh. Dengan demikian satu-satunya jalan untuk menggalakkan industri ialah menciptakan pasar dalam negeri dengan meningkatkan daya beli rakyat banyak. Hal ini pada gilirannya menuntut agar prioritas utama diberikan kepada *perluasan kesempatan kerja* yang produktif penuh. Bagi kebanyakan orang kesempatan kerja merupakan satu-satunya sumber pendapatan dan daya beli. Dengan maksud itu alokasi dana untuk perluasan kesempatan kerja perlu ditingkatkan, khususnya karena pengangguran telah mencapai suatu proporsi yang benar-benar menakutkan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa perluasan kesempatan kerja mempunyai kaitan dengan kemerdekaan ekonomi bangsa dan merupakan salah satu tuntutan pokok nasionalisme.

1 Antara lain *Keputusan Presiden* 5 Maret 1974, No. 10/1974 dan Instruksi Presiden 27 Mei 1978 kepada Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim, *Kompas*, 29 Mei 1978

Lampiran 1

DEKLARASI DEKOLONISASI MAJELIS UMUM PBB

Resolusi 14 Desember 1960, No. 1514

"Majelis Umum,

Memperhatikan tekad yang dinyatakan oleh rakyat-rakyat dunia dalam Piagam PBB untuk mengukuhkan kepercayaan mereka akan hak-hak asasi manusia, akan harkat dan martabat pribadi manusia, akan persamaan hak pria dan wanita serta bangsa-bangsa besar maupun kecil dan untuk memajukan kemajuan sosial dan taraf-taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar,

Sadar akan perlunya menciptakan kondisi stabilitas dan kesejahteraan serta hubungan-hubungan yang damai dan bersahabat atas dasar hormat terhadap asas-asas persamaan hak dan penentuan diri semua rakyat, dan hormat universal terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar untuk semua tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa atau agama,

Mengakui adanya aspirasi yang kuat akan kebebasan pada semua rakyat yang bergantung dan peranan menentukan rakyat-rakyat itu dalam perjuangan kemerdekaan mereka,

Sadar akan meningkatnya konflik yang berakar pada penolakan atau hambatan-hambatan terhadap kebebasan rakyat-rakyat itu, yang merupakan suatu ancaman serius bagi perdamaian dunia,

Mengingat peranan penting PBB dalam membantu gerakan kemerdekaan di Wilayah-wilayah Perwalian dan Non-Swa-Praja,

Mengakui bahwa rakyat-rakyat dunia sangat menginginkan agar kolonialisme dalam segala manifestasinya diakhiri,

Yakin bahwa terus berlangsungnya kolonialisme mencegah berkembangnya kerjasama ekonomi internasional, menghambat perkembangan sosial, budaya dan ekonomi rakyat-rakyat jajahan dan bertentangan dengan cita-cita perdamaian universal PBB,

Mengukuhkan bahwa rakyat-rakyat, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat leluasa memakai kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka tanpa merugikan kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, atas dasar asas saling menguntungkan, dan hukum internasional,

Percaya bahwa proses pembebasan tak dapat ditahan dan bahwa, untuk menghindari krisis-krisis serius, kolonialisme dan segala praktek segregasi dan diskriminasi yang berkaitan harus diakhiri,

Menyambut munculnya pada tahun-tahun belakangan ini sejumlah besar wilayah jajahan ke arah kebebasan dan kemerdekaan, dan mengakui meningkatnya trend-trend yang kuat menuju kebebasan di wilayah-wilayah yang belum mencapai kemerdekaan,

Yakin bahwa semua rakyat mempunyai hak yang tidak dapat dipindahkan atas kebebasan penuh, pelaksanaan kedaulatan mereka dan atas keutuhan wilayah nasional

ANALISA

mereka, *secara khidmat menyatakan* perlunya segera mengakhiri tanpa syarat kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,

Dan dengan maksud itu

Menyatakan bahwa:

1. Penaklukan, penguasaan dan pemerasan rakyat-rakyat oleh kekuasaan asing itu melanggar hak-hak asasi manusia, bertentangan dengan Piagam PBB, dan merupakan suatu hambatan bagi usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia.
2. Semua rakyat mempunyai hak penentuan diri; berdasarkan hak itu mereka leluasa menentukan status politik mereka dan mengusahakan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
3. Kurang memadainya persiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh menjadi dalih untuk menunda kemerdekaan.
4. Segala aksi bersenjata atau segala macam tindakan represif terhadap rakyat-rakyat jajahan harus dihentikan agar mereka dapat melaksanakan hak mereka atas kemerdekaan penuh secara damai, dan keutuhan wilayah mereka harus dihormati.
5. Di Wilayah-wilayah Perwalian dan Non-Swa-Praja atau semua wilayah lain yang belum mencapai kemerdekaan harus segera diambil tindakan-tindakan untuk memindahkan seluruh kekuasaan kepada rakyat-rakyat wilayah-wilayah itu, tanpa syarat atau reservasi apapun, sesuai dengan kemauan dan keinginan mereka yang dinyatakan secara bebas, tanpa membedakan ras, kepercayaan atau warna kulit, agar mereka dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan sepenuhnya.
6. Setiap percobaan yang bertujuan merusak secara parsial atau total kesatuan dan keutuhan wilayah suatu negara adalah tidak selaras dengan tujuan-tujuan dan asas-asas Piagam PBB.
7. Semua Negara harus melaksanakan secara lengkap dan tepat ketentuan-ketentuan Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia dan Deklarasi ini atas dasar persamaan, tidak mencampuri urusan intern semua negara, dan hormat terhadap hak-hak kedaulatan segala rakyat dan keutuhan wilayah mereka."

Diambil dari Ian Browlie, *Basic Documents on Human Rights* (Oxford, 1971), hal. 114-115

Lampiran 2

DEKLARASI PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU

Resolusi Sidang Khusus Majelis Umum PBB ke-VI, 3201 (S-VI)

Majelis Umum

Menerima Deklarasi berikut:

DEKLARASI PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU

Kami, anggota-anggota PBB,

Setelah mengundang suatu sidang khusus Majelis Umum untuk mempelajari untuk pertama kalinya masalah-masalah bahan-bahan mentah dan pembangunan, yang dimaksud untuk membahas masalah-masalah ekonomi paling penting yang dihadapi masyarakat dunia,

Memperhatikan semangat, tujuan dan asas-asas Piagam PBB untuk memajukan kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial segala bangsa,

Dengan khidmat menyatakan tekad kami bersama untuk bekerja secara mendesak bagi

PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU berdasarkan keadilan, persamaan kedaulatan, interdependensi, kepentingan bersama dan kerjasama antara semua negara, tidak peduli sistem-sistem ekonomi dan sosial mereka, yang akan memperbaiki kepincangan-kepincangan dan membetulkan ketidakadilan-ketidakadilan yang ada, memungkinkan menghilangkan jurang yang melebar antara negara-negara maju dan berkembang dan secara mantap menjamin akselerasi perkembangan ekonomi dan sosial serta perdamaian dan keadilan untuk generasi-generasi sekarang dan mendatang, dan dengan maksud itu menyatakan:

1. Hal paling besar dan paling berarti yang dicapai selama dasawarsa-dasawarsa terakhir adalah kemerdekaan dari dominasi kolonial dan asing bagi sejumlah besar rakyat dan bangsa yang memungkinkan mereka menjadi anggota masyarakat rakyat-rakyat merdeka. Kemajuan teknologi juga dicapai di segala bidang kegiatan ekonomi dalam tiga dasawarsa terakhir, dan secara demikian memberikan suatu potensi yang kokoh untuk memperbaiki kesejahteraan semua rakyat. Akan tetapi sisa-sisa dominasi asing dan kolonial, pendudukan asing, diskriminasi rasial, apartheid dan neokolonialisme dalam segala bentuknya masih tetap merupakan hambatan-hambatan yang paling besar bagi pembebasan dan kemajuan penuh negara-negara berkembang dan semua rakyat yang bersangkutan. Manfaat kemajuan teknologi tidak dinikmati secara adil oleh semua anggota masyarakat internasional. Negara-negara berkembang, yang merupakan 70% penduduk dunia, hanya sebagian 30% pendapatan dunia. Ternyata tidak mungkin mencapai suatu perkembangan yang sama dan berimbang bagi masyarakat internasional dalam tata ekonomi internasional yang ada. Jurang antara negara-negara maju dan berkembang terus melebar dalam suatu sistem yang disusun pada waktu ketika negara-negara berkembang bahkan belum ada sebagai negara merdeka dan yang mengabadikan ketidaksamaan.
2. Tata ekonomi internasional sekarang ini langsung bertolak belakang dengan perkembangan-perkembangan dalam hubungan-hubungan politik dan ekonomi internasional sekarang ini. Sejak 1970 perekonomian dunia mengalami serangkaian krisis berat yang mempunyai reperkusi-reperkusi mendalam, khususnya atas negara-negara berkembang yang umumnya lebih rawan terhadap tekanan-tekanan ekonomi dari luar. Dunia berkembang telah menjadi suatu faktor yang sangat kuat yang pengaruhnya dirasakan di segala bidang kegiatan internasional. Perubahan-perubahan yang tidak dapat dibalik dalam perbandingan kekuatan di dunia ini mengharuskan partisipasi negara-negara berkembang yang aktif, penuh dan sama dalam perumusan dan penerapan segala keputusan yang menyangkut masyarakat internasional.
3. Perubahan-perubahan ini semua telah menonjolkan kenyataan interdependensi semua anggota masyarakat dunia. Kejadian-kejadian sekarang ini dengan tajam menyoroti kesadaran bahwa kepentingan-kepentingan negara-negara maju dan

kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang sudah tidak dapat diasingkan satu sama lain, bahwa terdapat satu kaitan erat antara kemakmuran negara-negara maju dan pertumbuhan serta perkembangan negara-negara berkembang, dan bahwa kemakmuran masyarakat internasional sebagai keseluruhan bergantung pada kemakmuran bagian-bagian komponennya. Kerjasama internasional untuk pembangunan adalah tujuan dan kewajiban bersama semua negara. Dengan demikian kesejahteraan politik, ekonomi dan sosial generasi-generasi sekarang dan mendatang lebih dari sebelumnya bergantung pada kerjasama semua anggota masyarakat internasional atas dasar persamaan kedaulatan dan dihapusnya ketidakseimbangan yang terdapat antara mereka.

4. Tata Ekonomi Internasional Baru itu harus disusun atas dasar hormat penuh terhadap asas-asas berikut:
 - (a) Persamaan kedaulatan negara-negara, penentuan diri semua rakyat, tidak diijinkannya mendapatkan wilayah-wilayah dengan kekerasan, keutuhan wilayah dan tidak mencampuri urusan intern negara-negara lain.
 - (b) Kerjasama seluas mungkin semua negara anggota masyarakat internasional, atas dasar keadilan, di mana perbedaan-perbedaan di dunia sekarang ini dapat disingkirkan dan kemakmuran dijamin untuk semua.
 - (c) Partisipasi penuh dan efektif atas dasar persamaan semua negara dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi dunia demi kepentingan bersama semua negara, sambil memperhatikan perlunya menjamin akselerasi pembangunan semua negara berkembang, secara istimewa memperhatikan agar diambil tindakan-tindakan khusus untuk negara-negara berkembang yang paling terbelakang, terkurung daratan dan terdiri atas pulau maupun negara-negara berkembang yang paling serius menderita akibat krisis-krisis ekonomi dan bencana-bencana alam, tanpa melupakan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang lainnya.
 - (d) Hak setiap negara untuk menganut sistem ekonomi dan sosial yang dirasanya paling cocok untuk perkembangannya dan untuk tidak mengalami diskriminasi apa pun sebagai akibatnya.
 - (e) Kedaulatan permanen penuh setiap negara atas sumber-sumber daya alamnya dan segala kegiatan ekonomi. Untuk menjamin sumber-sumber daya ini setiap Negara berhak untuk melaksanakan penguasaan efektif atasnya dan eksploitasinya dengan sarana-sarana yang selaras dengan situasinya, termasuk hal nasionalisasi atau pemindahan pemilikan kepada warga-warganya, hal mana merupakan ungkapan kedaulatan permanen penuh Negara. Tiada Negara boleh dikenakan paksaan ekonomi, politik atau lain untuk mencegah pelaksanaan bebas dan penuh hak yang tak terpindahkan ini.
 - (f) Hak semua Negara, wilayah dan rakyat di bawah pendudukan asing, dominasi asing dan kolonial atau *apartheid* atas ganti rugi atau kompensasi penuh bagi eksploitasi dan pengurusan dan pengrusakan sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya lain negara-negara, wilayah-wilayah dan rakyat-rakyat itu.
 - (g) Pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengambil tindakan-tindakan demi kepentingan perekonomian nasional negara-negara di mana perusahaan-perusahaan transnasional itu beroperasi atas dasar kedaulatan penuh negara-negara itu.

- (h) Hak negara-negara berkembang dan rakyat-rakyat wilayah-wilayah di bawah dominasi kolonial dan rasial serta pendudukan asing untuk mencapai pembebasannya dan mendapatkan kembali penguasaan efektif atas sumber-sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan ekonominya.
 - (i) Memberikan pertolongan kepada negara-negara, rakyat-rakyat dan wilayah-wilayah berkembang yang di bawah dominasi kolonial dan asing, pendudukan asing, diskriminasi rasial atau *apartheid* atau tunduk pada tindakan-tindakan paksaan ekonomi, politik atau lain yang diambil untuk mendapatkan dari mereka subordinasi pelaksanaan hak kedaulatan mereka dan mendapatkan dari mereka keuntungan jenis apa pun, atau pada neokolonialisme dalam segala bentuknya, dan yang telah berhasil menegakkan atau berusaha untuk menegakkan penguasaan efektif atas sumber-sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka yang pernah atau masih di bawah kekuasaan asing.
 - (j) Perbandingan adil dan wajar antara harga-harga bahan-bahan mentah, hasil-hasil primer, barang-barang jadi dan setengah jadi yang diekspor negara-negara berkembang dan harga-harga bahan-bahan mentah, komoditi-komoditi primer, barang-barang jadi, barang-barang modal dan perlengkapan yang diimpor oleh mereka dengan maksud untuk mencapai perbaikan yang mantap dalam term of trade mereka yang tidak memuaskan dan dalam perluasan perekonomian dunia.
 - (k) Peningkatan bantuan aktif kepada negara-negara berkembang oleh seluruh masyarakat internasional, bebas dari segala syarat politik atau militer.
 - (l) Menjamin agar salah satu tujuan pokok pembaruan sistem moneter internasional adalah memajukan pembangunan negara-negara berkembang dan arus sumber-sumber daya nyata yang memadai.
 - (m) Meningkatkan daya saing bahan-bahan alam yang menghadapi saingan pengganti sintetis.
 - (n) Perlakuan preferensi tanpa batasan bagi negara-negara berkembang, kapan saja mungkin, di segala bidang kerjasama ekonomi internasional di mana saja mungkin.
 - (o) Mendapatkan syarat-syarat baik untuk pemindahan sumber-sumber daya finansial ke negara-negara berkembang.
 - (p) Memberi negara-negara berkembang akses ke penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan memajukan pemindahan teknologi dan penciptaan teknologi pribumi demi keuntungan negara-negara berkembang dalam bentuk-bentuk dan sesuai dengan prosedur yang cocok untuk perekonomian mereka.
 - (q) Perlunya bagi semua Negara untuk menghentikan pemborosan sumber-sumber daya alam, termasuk hasil-hasil pangan.
 - (r) Perlunya bagi negara-negara berkembang untuk memusatkan seluruh sumber daya mereka bagi pembangunan.
 - (s) Dengan tindakan-tindakan individual dan kolektif meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, keuangan dan teknis antara negara-negara berkembang, terutama atas dasar preferensi.
 - (t) Mempermudah peranan yang mungkin dimainkan oleh perhimpunan-perhimpunan produsen dalam kerangka kerjasama internasional dan, dalam mengejar tujuan-tujuannya, antara lain membantu dalam memajukan pertumbuhan mantap ekonomi dunia dan mempercepat pembangunan negara-negara berkembang.
5. Penerimaan secara unanim Strategi Pembangunan Internasional Dasawarsa Pembangunan Kedua PBB merupakan suatu langkah penting dalam memajukan kerjasama

ekonomi internasional atas dasar yang adil dan wajar. Akselerasi implementasi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen yang diterima oleh masyarakat internasional dalam rangka Strategi itu, khususnya yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang yang harus dilakukan, yang akan banyak menyumbang pada pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Deklarasi ini.

6. PBB sebagai suatu organisasi universal harus mampu menangani masalah-masalah kerjasama ekonomi internasional secara menyeluruh dan secara sama menjamin kepentingan-kepentingan semua negara. Dia harus memainkan peranan yang bahkan lebih besar dalam pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru. Piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara-negara, yang persiapannya akan mendapatkan ilham tambahan dari Deklarasi ini, akan merupakan suatu sumbangan yang berarti dalam hal ini. Semua negara anggota PBB oleh sebab itu diminta agar melakukan usaha maksimal untuk menjamin implementasi Deklarasi ini, yang merupakan salah satu jaminan utama bagi terciptanya kondisi yang lebih baik untuk semua rakyat guna mencapai suatu kehidupan yang layak bagi martabat manusia.
7. Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru ini harus merupakan salah satu dasar yang paling penting untuk hubungan-hubungan ekonomi antara semua rakyat dan semua bangsa.

Sidang Pleno ke-2229, 1 Mei 1974



INDONESIA DAN DUNIA INTERNASIONAL

Diterbitkan setiap tahun oleh CSIS; memuat ringkasan peristiwa dalam negeri dan dunia internasional. Buku ini penting sekali untuk referensi dan dokumentasi bagi para petugas pemerintahan, mahasiswa, sarjana maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang ingin mendalami permasalahan yang dihadapi di Indonesia khususnya dan dalam dunia internasional pada umumnya. Masih tersedia:

Indonesia dan Dunia Internasional 1974 a Rp. 1.750,-
Indonesia dan Dunia Internasional 1975 a Rp. 4.000,-
Indonesia dan Dunia Internasional 1976 a Rp. 5.000,-
Indonesia dan Dunia Internasional 1977 a Rp. 5.000,-
Indonesia dan Dunia Internasional 1978

Pesanan luar kota tambah ongkos kirim 15%

AKSES KE PASAR JEPANG : SUATU "MISSION IMPOSSIBLE"?*

J. PANGLAYKIM

Akhir-akhir ini majalah *Business Times* menurunkan banyak tulisan yang membahas tentang hubungan dagang antara Jepang dan Singapura. Latar belakang turunya pembahasan tersebut adalah bahwa Jepang dengan persetujuan investasinya di bidang petro-kimia dapat dikatakan merupakan investor yang terbesar di Singapura, dan dewasa ini terdapat banyak perusahaan Jepang yang beroperasi sebagai anak perusahaan di Singapura, tetapi dimiliki sepenuhnya dan dikendalikan dari Tokyo. Dari berbagai pandangan para usahawan dan para menejer nasional Singapura penulis Quek Peck Lim mengemukakan bahwa mereka itu nampaknya mempunyai keberatan-keberatan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Singapura.

ASPEK-ASPEK KEBERATAN MEREKA

Aspek pertama dari keberatan yang diajukan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang tersebut adalah bahwa pucuk pimpinan perusahaan sebagian terbesar masih dipegang oleh para menejer Jepang, sedang menejer lokal Singapura dalam banyak hal kurang sekali mendapat kesempatan atau peranan

* Karangan ini ditulis bulan September 1977, tetapi persoalan yang dibahasnya masih aktual

untuk memegang pucuk pimpinan perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Singapura itu. Dan apabila ada menejer lokal Singapura yang berada dalam pucuk pimpinan perusahaan Jepang yang beroperasi di Singapura itu, mereka ini pada umumnya tidak berhubungan langsung dengan kantor pusatnya. Hal ini berlainan dengan hubungan yang selama ini terjadi antara menejer lokal Singapura dalam perusahaan Amerika yang beroperasi di Singapura; mereka ini, apabila sudah mendapat kepercayaan untuk memimpin perusahaan Amerika yang beroperasi di Singapura, dianggap sebagai staf internasional dan setingkat dengan yang lain sehingga karenanya langsung melapor pada kantor pusatnya di Amerika. Kelainan hubungan antara menejer lokal Singapura dengan kantor pusatnya itu dapat dimengerti, karena terdapatnya sistem dan proses pengambilan keputusan yang jauh berlainan antara perusahaan Jepang dan perusahaan Amerika. Pertama, sistem "ringo" (sistem pengambilan keputusan atas dasar konsensus) dicetak atau ditulis dalam bahasa Jepang. Nampaknya bukan hanya faktor bahasa, tetapi juga mungkin faktor-faktor latar-belakang kebudayaan, pendidikan, disiplin, cara pengajuan dan sebagainya secara keseluruhan membutuhkan pengalaman yang bertahun-tahun. Kemudian sistem senioritas dan sistem grup yang telah kuat sekali berakar di antara para pengusaha Jepang. Seorang menejer lokal dari Singapura yang dapat diterima di Singapura tetapi tidak memiliki hubungan batin, hubungan pribadi, hubungan atas dasar teman sebangku-kuliah atau atas dasar senioritas dengan para pengusaha Jepang dan lain sebagainya akan selalu merupakan seorang "luar", sehingga karena itu dalam sistem pengorganisasian dan manajemen Jepang adalah sulit — bahkan kami cenderung berpendapat, mustahil ("impossible") — bagi seorang menejer lokal untuk menjadi menejer pamuncak dan memberikan perintah-perintah kepada para menejer dari Jepang yang bekerja di perwakilan-perwakilan atau anak-perusahaan-anak-perusahaan di tempat-tempat yang lain. Dalam hubungan dengan kesulitan ini, penulis sendiri belum atau tidak dapat membayangkan kapan hal yang sebaliknya dapat terjadi.

Kelainan atau perbedaan hubungan antara menejer lokal Singapura dengan kantor pusatnya itu menyolok sekali bila

mereka itu memperbandingkan pengalaman mereka dalam hubungan usaha dengan Amerika dan dengan Jepang. Para manajer lokal Singapura yang berhasil mencapai kedudukan puncak pimpinan di dalam perusahaan Amerika mungkin sekali mempunyai kualifikasi yang lebih tinggi daripada orang-orang Amerika sendiri. Mereka itu semua adalah lulusan sekolah bisnis internasional yang terkenal dan diakui sebagai tempat latihan yang berbobot tertinggi dalam manajemen bisnis seperti Harvard, Berkeley, Stanford, Columbia dan sebagainya. Kesamaan bahasa, kesepakatan nilai dan tata-cara yang sudah dimiliki dan diketahui bersama merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan seorang manajer lokal tidak atau kurang sulit untuk masuk dan memadukan diri dalam sistem pengambilan keputusan dalam perusahaan-perusahaan multinasional Amerika. Bahkan banyak dari tenaga lokal Singapura yang, setelah mengalami latihan dan penempatan di Amerika, kembali sebagai manajer yang memperoleh tanggung jawab yang cukup besar. Dan dari perbandingan kedua pola hubungan itulah muncul keberatan-keberatan terhadap puncak pimpinan perusahaan Jepang sebagaimana dilihat oleh penulis di dalam analisisnya atas hubungan dagang antara usahawan Singapura dan Jepang.

Selain dari aspek keberatan itu terdapat pula aspek lain yang dewasa ini sedang dipelajari secara mendalam oleh para wiraswasta termasuk organisasi-organisasi perusahaan di Singapura. Aspek lain ini adalah bagaimana perdagangan Singapura dapat memasuki pasar Jepang secara baik dan berhasil. Berikut ini diberikan gambaran tentang perkembangan ekspor dari Singapura ke Jepang. Peningkatan ekspor di tahun 1974 dapat dikata-

TABEL I

EKSPOR SINGAPURA KE JEPANG (dalam jutaan \$)

1971	379,8
1972	392,4
1973	713,3
1974	1.610,5
1975	1.112,9
1976	1.668,8

Sumber: "Singapore's External Statistics" *Business Times*, August 30, 1977

kan lebih dari 100%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang besar sekali dari ekspor "mineral fuels" yang pada tahun 1973 berjumlah S\$ 303,7 juta menjadi S\$ 937,0 juta pada tahun 1974.

Bila kita sekarang mengambil komposisi terperinci dari ekspor Singapura ke Jepang pada tahun 1976, gambaran adalah sebagai berikut:

TABEL II

KOMPOSISI EKSPOR SINGAPURA KE JEPANG PADA TAHUN 1976
(dalam jutaan S\$)

	Jumlah	Prosentase
1. Makanan (food)	60,0	3,6%
2. Minuman dan tembakau (beverage and tobacco)	1,2	0,1%
3. Bahan-bahan mentah (crude materials)	83,6	5,0%
4. Minyak hewan dan nabati (animal and vegetable oil)	43,9	2,6%
5. Barang kimia (chemicals)	94,5	5,7%
6. Barang-barang hasil industri	43,1	2,6%
7. Mesin-mesin dan alat pengangkutan	153,2	9,2%
8. Berbagai barang jadi industri	32,7	1,9%
9. Transaksi khusus, kap dan perbekalan pesawat terbang (aircraft stores)	86,6	5,2%
10. Mineral fuels	1.070,0	64,1%
	1.668,8	100,0%

Sumber: "Singapore's External Statistics", *Business Times*, August 30, 1977

Dari angka-angka tersebut di atas serta perincian barang-barang yang diekspor ke Jepang dapat dipahami betapa besar kesediaan Jepang untuk mengadakan investasi dalam kompleks petro-kimia. Hampir 65% dari seluruh ekspor Singapura ke Jepang adalah berasal dari bidang "mineral fuels". Sedang ekspor hasil-hasil industri Singapura ke Jepang nampaknya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Singapura, karena kalau perusahaan-perusahaan Singapura sendiri yang mengekspornya ke Jepang tentunya perusahaan-perusahaan nasional Singapura tidak akan mengeluh tentang betapa sulitnya memasuki pasar Jepang. Bagi perusahaan-per-

usaha Jepang yang beroperasi di Singapura, ekspor ke Jepang dan lain-lain negara merupakan suatu hal yang mudah, karena pemasukan barang-barang yang dibuat oleh perusahaan-perusahaannya di Singapura itu dalam banyak hal dapat dianggap oleh Jepang sebagai suatu hasil dari "pabrik milik Jepang"; dan mungkin pula karena yang mengimpornya termasuk dalam "the Big Ten" (Mitsubishi, Mitsui, Marubeni dan lain-lain), pemasukan tersebut tidak mengalami birokrasi yang berbelit-belit, seperti yang dialami oleh perusahaan-perusahaan Singapura yang ingin memasarkan hasil-hasilnya di Jepang. Perusahaan-perusahaan multinasional Jepang ini sudah mempunyai pengalaman, relasi dan aparat yang dapat menyelesaikannya.

Untuk memperjelas beberapa pembahasan dari kesulitan-kesulitan yang terkandung dalam kritik dan keluh kesah seperti terlihat oleh pembahas dari Singapura itu, berikut ini diberikan angka-angka penjualan dan ekspor dari perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Singapura.

TABEL III

JUMLAH PENJUALAN/EKSPOR 149 PERUSAHAAN JEPANG YANG BEROPERASI DI SINGAPURA TAHUN 1973—1975 (dalam jutaan S\$)					
	Jumlah penjualan	Jumlah ekspor	%-tase dari penjualan	Jumlah ekspor ke Jepang	%-tase dari jumlah ekspor
Semua industri					
1973	1.155,4	441,9	38,2%	105,9	24 %
1974	1.690,2	763,2	46,9%	325,8	41,1%
1975	2.088,4	1.127,1 ^x	54,0%	372,2	33,0%
Manufacturing					
1973	383,8	223,6	58,3%	29,3	13,1%
1974	566,8	375,8	63,1%	67,3	18,8%
1975	724,3	468,9	64,7%	76,8	16,4%
Perdagangan					
1973	657,5	218,3	33,2%	76,6	35,1%
1974	1.011,6	435,4	43,0%	258,5	59,4%
1975	1.167,6	658,2	56,4%	295,4	44,9%

Sumber: *Jetro Bulletin*, October/November 1976; *The Straits Times*, August 27, 1977

Catatan: x Terdapat perbedaan angka antara sumber *Jetro Bulletin*, October/November 1976, dan sumber "Singapore's External-Statistics", *Business Times*, August 30, 1977

Apabila kita melihat tabel ekspor Singapura tahun 1976, nampaklah bahwa barang-barang yang diekspor di luar "mineral fuels" adalah kurang lebih S\$ 600 juta; sedangkan dalam tabel jumlah penjualan/ekspor 149 perusahaan Jepang terdapat kurang lebih S\$ 372 juta yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Apabila kedua hal ini dihubungkan, maka ini berarti bahwa kurang lebih 62% dari ekspor Singapura ke Jepang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Dan bila hal yang terakhir ini dihubungkan dengan keluhan kesah perusahaan-perusahaan ekspor Singapura tentang sulitnya memasuki pasar Jepang, maka mungkin pula bahwa sisanya sebagian besar disalurkan melalui 10 besar perusahaan Jepang. Atas dasar semua ini, dapatlah ditanyakan: Apakah semua itu berarti bahwa monopoli ekspor barang-barang buatan Singapura, terutama yang diekspor ke Jepang, berada dalam tangan perusahaan-perusahaan Jepang yang berada di Singapura dan yang berada di Jepang sendiri? Dan selanjutnya tampak bahwa dari jumlah penjualan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Singapura sebesar S\$ 2 milyar lebih itu tidak kurang dari 54%-nya diekspor — berarti bahwa hanya sampai sebesar 46% saja dijual di dalam negeri (Singapura) — serta tidak kurang sepertiga bagian dari jumlah ekspor diekspor oleh ke-149 perusahaan Jepang ke Jepang. Dari itu dapat pula ditanyakan: Apakah keberhasilan Singapura dalam memperkembangkan industri dalam negerinya mulai tergantung pada perusahaan-perusahaan Jepang dan bahkan, khususnya di bidang perindustrian, sudah berkembang menjadi suatu sub-sistem dari perekonomian Jepang?

Meskipun demikian, tampaknya dewasa ini para pengusaha Singapura sendiri sudah mulai tergugah oleh adanya dominasi perusahaan Jepang dalam bidang ekspor barang-barang buatan Singapura, bukan saja dalam ekspor ke Jepang tetapi juga ke negara-negara lain. Jepang dengan perusahaan-perusahaan multinasionalnya mungkin melakukan ekspor dalam jumlah yang cukup besar, karena mereka memiliki jaringan kerja yang terbaik apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan multinasional dari Amerika Serikat dan dari negara-negara lain. Perwakilan-perwakilan dan kantor-kantor perusahaan-perusa-

haan multinasional Jepang tersebar di seluruh dunia, adakalanya Marubeni di Philipina dapat mensuplai bahan-bahan mentah seperti benang tenun ke Indonesia, dan sebaliknya Marubeni di Brazil dapat membeli barang-barang tertentu yang diperlukannya di pasar Singapura, Hongkong, Muangthai dan sebagainya melalui kantor-kantor Marubeni di tempat-tempat itu. Semua ini mungkin dilakukan karena sistem informasi mereka yang telah mempergunakan teleks dan para pimpinan perusahaan multinasional Jepang yang berada di berbagai tempat di seluruh dunia yang satu sama lain saling kenal dan saling mengetahui memudahkan lalu lintas perdagangan antar perusahaan-perusahaan mereka. Jaringan kerja yang baik serta penggolongan jenis jasa dan produk telah menjadikan perusahaan-perusahaan Jepang terutama "The Big Ten" suatu kekuatan yang mengagumkan.

FAKTOR-FAKTOR DI JEPANG YANG MENGHALANGI AKSES KE PASARNYA

Faktor yang pertama adalah orientasi para pengusaha Jepang. Apabila dilihat dari sudut orientasi para pengusaha di Jepang, mereka nampak lebih berorientasi untuk mengekspor barang-barang hasil industri mereka. Hal ini berarti bahwa struktur organisasi dan manajemen perusahaan-perusahaan mereka didasarkan atas kepentingan nasionalnya, yaitu mengekspor sebanyak mungkin barang-barang hasil industri Jepang ke seluruh dunia. Maka mereka mempunyai suatu jaringan kerja yang tidak ada bandingannya dengan perusahaan-perusahaan dari negara manapun. Demikianlah secara singkat yang dapat dikaji dari struktur organisasi dan manajemen serta pengalaman perusahaan-perusahaan Jepang, khususnya "The Big Ten". Tentu saja impor tetap dilakukan pula, tetapi hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan untuk pengadaan logistik nasional di mana persediaan bahan-bahan mentah harus dapat terselenggarakan secara teratur, dengan jaminan adanya keteraturan dan kelestarian sumber-sumber suplai, sampai pada pengawasan serta penguasaan sumber-sumber suplai, dengan harga-harga yang cukup "murah" dan sebagainya. Pola pelaksanaan impor ini dianggap sebagai suatu kewajiban nasional guna terjaminnya kegiatan-kegiatan industri dan perekonomian Jepang sendiri.

Semua pihak di Jepang, baik MITI, birokrasi, "The Big Ten", bank-bank Jepang, perusahaan-perusahaan asuransi dan sebagainya, turut serta dalam kegiatan impor dalam rangka pengadaan logistik nasional ini.

Jadi dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa impor Jepang berorientasi pada pemasukan bahan-bahan mentah dan bukan pemasukan barang-barang hasil industri. Dan sebagai akibatnya, perusahaan-perusahaan multinasional Jepang dan usaha-usaha lain di Jepang bukan saja tidak atau kurang mempunyai pengalaman dalam memasukkan barang-barang hasil industri, tetapi juga mempunyai sikap menolak untuk memasukkannya ke Jepang. Menurut keterangan, dewasa ini terdapat kurang lebih 2.500 perusahaan dagang ("trading houses") di Jepang. Dari semua perusahaan dagang itu, "The Big Ten"¹ (yakni: Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, C. Itoh yang mungkin akan menempati urutan ketiga setelah mengadakan "merger" dengan Ataka, Nissho Iwai, Sumitomo, Toyo Menka, Nichimen, Kanematsu Goshō) menguasai kurang lebih 70% dari perdagangan ekspor-impor Jepang.

Faktor lain yang menghalangi adalah peraturan-peraturan pemerintah Jepang yang bersifat nontarif. Sehubungan dengan peraturan-peraturan itu dapat disebutkan bahwa dewasa ini terdapat 27 peraturan mengenai pemasukan barang yang diatur oleh tujuh departemen dan instansi pemerintah. Walaupun hanya terdapat 27 macam barang yang termasuk dalam sistem kuota, namun pelaksanaan peraturan-peraturan ini berbelit-belit sekali dan makan waktu lama. Berikut ini diberikan beberapa contoh:

- a. Pemerintah Singapura dengan perhatian penuh dari kedutaan dan instansinya sampai dewasa ini belum berhasil mendapatkan keputusan Jepang perihal apakah mereka dapat mengirimkan "frozen pork", padahal hal ini telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun.

¹ Sebelum Ataka mengadakan "merger" dengan C. Itoh, perusahaan-perusahaan dagang besar yang nama-namanya berturut-turut disebutkan dikenal sebagai "The Big Ten"

- b. Peraturan-peraturan mengenai pemasukan barang-barang makanan jadi bersifat keras/ketat sekali sehingga karenanya semua rahasia harus dibuka. Karena hal ini, ada perusahaan yang tidak bersedia membuka rahasianya hingga tidak jadi masuk ke pasar Jepang.
- c. Peraturan-peraturan mengenai pembungkusan dan penempelan etiket mengharuskan terdapatnya nama importir, alamat dan tanggal diimpornya. Hal ini berarti bahwa barang-barang yang dikirimkan ke Jepang, setelah sampai di Jepang harus diberi etiket lagi, dan ini berarti pula suatu penambahan ongkos sehingga barang-barang tersebut menjadi kurang kompetitif sifatnya.
- d. Ada barang-barang yang sudah dapat diterima di pasar Jepang, seperti barang-barang jadi dari kulit, akan tetapi barang ini justru sudah masuk dalam sistem kuota.

Faktor penghalang lain yang penting adalah struktur distribusi Jepang. Nampaknya impor dan distribusinya harus mempergunakan perusahaan Jepang. Menurut keterangan, sistem distribusi Jepang bersifat demikian kompleks sehingga hampir tidak memungkinkan perusahaan asing (non-Jepang) untuk melakukan penetrasi dalam sektor ini. Hubungan dagang di Jepang dilakukan atas dasar paternalisme dan diorganisasikan secara "guild system". Demikianlah setelah melalui berbagai tingkat, harga barang-barang yang didistribusikan di Jepang pada akhirnya harus bertambah sebesar 200% sampai di tangan para pengecer. Selisih harga yang demikian tinggi ini tentu saja menyulitkan, kalau tidak berarti sebagai suatu penghalang terbesar untuk memasuki pasar Jepang. Namun demikian, nampaknya terdapat beberapa barang buatan luar negeri yang berhasil memasuki pasar Jepang melalui penggunaan saluran salah satu dari "The Big Ten". Tetapi "The Big Ten", apabila sudah berhasil memasukkan suatu jenis produk ke pasar Jepang, akan menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka agar dapat membeli hak patennya saja dan membayar sejumlah royalty untuk suatu jangka waktu tertentu. Kemudian, setelah diadakan berbagai macam perbaikan dan perubahan, jenis barang ini akan

dipasarkan sebagai produk yang baru ke pasar Jepang sehingga mereka tidak perlu membayar royalty lagi, bahkan mungkin sekali barang-barang ini lalu diekspor ke negara asal pembuat barang itu semula.

Dari pihak para konsumen Jepang terdapat pula faktor penghalang. Mereka dalam hal ini tampak mempunyai rasa patriotisme yang besar pula sehingga dalam pola konsumsi mereka barang-barang buatan Jepang memperoleh prioritas utama. Memang benar bahwa bagi kalangan yang sudah berada, barang-barang impor seperti misalnya dasi buatan Paris mempunyai daya tarik, akan tetapi karena sebagian terbesar konsumen Jepang merupakan atau berasal dari golongan menengah, barang-barang luar negeri nampaknya tidak dan kurang mereka perhatikan.

KESIMPULAN

Bila kita melihat dan memperhatikan pola orientasi pengusaha-pengusaha Jepang pada ekspor, terdapatnya peraturan-peraturan nontarif di Jepang yang pelik, kompleks dan pelaksanaannya memakan waktu lama serta menjengkelkan, serta cara-cara bersaing dari perusahaan-perusahaan multinasional Jepang dengan metode eliminasi, rasa patriotisme yang tinggi dari para konsumen Jepang, sistim distribusi Jepang yang demikian kompleks berikut dengan "guild system" mereka, peningkatan jaringan kerja di antara para pengusaha-pengusaha Jepang dengan adanya bank-bank dan usaha-usaha jasa yang lain seperti asuransi dan pengangkutan, maka tentu saja kita akan bertanya-tanya: sampai seberapa jauhkah artinya akses ke pasar Jepang untuk barang-barang hasil industri negara-negara ASEAN, dalam keadaan seperti itu? Selanjutnya pertanyaan ini akan menjadi: Apakah PM Fukuda bersedia sampai sedemikian jauh untuk mengakomodasikan permintaan negara-negara ASEAN?

Mungkin beliau dapat mengadakan usaha meluruskan dan menyatugariskan peraturan-peraturan nontarif yang demikian berbelit-belit dan kompleks serta makan waktu dalam pelaksanaannya. Dengan suatu satuan tugas yang khusus mungkin

beliau dapat mengadakan berbagai penyederhanaan prosedur pemasukan barang-barang ke pasar Jepang misalnya. Andaikata dalam hal ini beliau berhasil mempersingkat waktu yang dibutuhkannya dari tiga tahun sampai satu tahun misalnya, proses selanjutnya adalah mengadakan berbagai macam diskusi dan perundingan dengan tokoh-tokoh pengusaha Jepang yang pada dasarnya memegang teguh penguasaan di bidang distribusi dalam negeri. Dan sehubungan dengan hal ini, yang mungkin sulit dan dapat dikatakan "mustahil" adalah mengadakan perubahan dan modernisasi termasuk pengurangan ongkos-ongkos distribusi, karena untuk ini tidak dapat dilakukan secara mendadak dan dalam waktu yang singkat. Memang sampai saat ini perekonomian Jepang sudah berhasil dalam modernisasi produksi, perbankan, perkapalan pengangkutan dan lain sebagainya, akan tetapi sistem distribusi dewasa ini masih didasarkan, antara lain, pada "guild system" — walaupun sudah terdapat saluran-saluran penjualan yang modern seperti toko-toko serba ada, supermarket dan department store.

Dari semua itu dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat memasuki pasar Jepang dan berhasil mencapai akses dalam pasar Jepang hanya mungkin dilakukan dengan bekerjasama dengan "The Big Ten" atau dengan perusahaan Jepang yang spesialis sifatnya. Akan tetapi di sini terdapat pula bahaya, yaitu bahwa terdapat kecenderungan dari oknum-oknum yang ditugaskan oleh "The Big Ten" untuk mengadakan eliminasi, padahal sistem eliminasi sudah membudaya di Jepang.

Gambaran di atas itu semua menyebabkan negara-negara ASEAN menjadi agak pesimistis sehubungan dengan pelaksanaan akses ke pasar Jepang. Secara lain dapat dikatakan bahwa proses penetrasi ke pasar Jepang dapat disebut sebagai suatu "mission impossible". Tetapi bila kita melihat film "mission impossible", nampaknya tugas yang mustahil itu dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara yang inkonvensional. Apakah dalam usaha penetrasi ke pasar Jepang atau untuk dapat melaksanakan akses ke dalamnya juga harus dilakukan cara-cara inkonvensional, karena hal itu dapat dianggap sebagai suatu "mission impossible"?

DAFTAR PUBLIKASI CSIS



I. SERI BUKU

1. Some Basic Thoughts on the Acceleration and Modernization of 25 Years Development, Ali MOERTOPO
2. Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, Ali MOERTOPO
3. Dua pemikiran tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional, Daood JOESOEF a Rp. 1.500,—
4. The World of Strategy and the Foreign Policy of Nation
5. Economic Development and National Resilience, R.B. SOEHARTONO a Rp. 500,—
6. Persoalan Masa Kini: Perusahaan-perusahaan Multinasional, J. PANGLAYKIM a Rp. 1.500,—
7. Strategi Politik Nasional, Ali MOERTOPO a Rp. 1.000,—
8. Business Relations between Indonesia and Japan, J. PANGLAYKIM a Rp. 500,—
9. Indonesia dan Dunia Internasional 1974 a Rp. 1.750,—
10. Trends in Marketing, J. PANGLAYKIM a Rp. 1.000,—
11. Regionalism in Southeast Asia a Rp. 1.250,—
12. Buruh dan Tani dalam Pembangunan, Ali MOERTOPO a Rp. 400,—
13. Seminar Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional a Rp. 2.000,—
14. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi luks) a Rp. 1.200,—
15. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi biasa) a Rp. 350,—
16. Self Reliance and National Resilience a Rp. 1.250,—
17. Second Indonesian — Japanese Conference a Rp. 1.500,—
18. Indonesia dan Dunia Internasional 1975 a Rp. 4.000,—
19. Indonesia dan Dunia Internasional 1976 a Rp. 5.000,—
20. Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia a Rp. 2.000,—
21. Japan — Indonesia Relations in the Context of Regionalism in Asia a Rp. 1.500,—
22. Indonesia's Economic and Business Relations with ASEAN and Japan, J. PANGLAYKIM a Rp. 3.000,—
23. Timur Tengah dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO a Rp. 1.500,—
24. Afrika dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO a Rp. 1.500,—
25. Southeast Asia and the World of Tomorrow a Rp. 3.000,—
26. Strategi Kebudayaan, Ali MOERTOPO a Rp. 750,—
27. Indonesia dan Dunia Internasional 1977 a Rp. 5.000,—
28. P-4 and GBHN (bhs Inggris) a Rp. 600,—
29. Japan — Indonesia Cooperation: Problems and Prospects a Rp. 1.500,—
30. ASEAN dalam Berita, Harapan dan Kenyataan 1967-1977 a Rp. 4.500,—
31. Situasi Pendidikan di Indonesia selama Sepuluh Tahun Terakhir, Bagian 1 (Permasalahan), Onny S. PRIJONO dan A.M.W. PRANARKA a Rp. 1.750,—
32. Indonesia dan Dunia Internasional 1978 a Rp.

II. TERBITAN BERKALA

1. RINGKASAN PERISTIWA
(terbit setiap 2 minggu) a Rp. 350,— Rp. 8.400,— per tahun
2. ANALISA
(terbit setiap bulan) a Rp. 500,— Rp. 6.000,— per tahun
3. MONOGRAF a Rp. 700,—
4. THE INDONESIAN QUARTERLY
(terbit setiap 3 bulan) a Rp. 800,— Rp. 3.200,— per tahun

Pesanan dengan pembayaran di muka. Untuk Seri Buku, pesanan luar kota ditambah ongkos kirim \pm 15%; dialamatkan pada CSIS, Biro Publikasi, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telepon 349489